RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025 – 2029

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Bidang Perhubungan. Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tidak terlepas dari arah kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029.

Visi RPJMD yaitu "Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua" serta misi RPJMD :

Misi 1:

Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.

Misi 2:

Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Misi 3:

Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4:

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5:

Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6:

Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 7:

Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan local.

Tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas dengan Sasaran Strategis yaitu :

[1] Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi,

[2] Meningkatnya Layanan Transportasi,

[3] Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah;

Untuk mengukur tercapainya Sasaran Strategis telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2029 sebagai berikut :

[1] Rasio konektivitas transportasi sebesar 0,735

[2] V/C Ratio Jalan Provinsi 0,382

[3] Rata – rata load faktor angkutan umum 73%

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai pedoman arah kinerja dalam orientasi, responsif, adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Terima Kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang baik penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 semoga menjadi bahan untuk membangun perhubungan maju terus untuk semua.

Palembang, 29 September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR GRAFIK xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 11

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 20

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia 20

2.1.2.2 Sumber Daya Kelembagaan Perangkat Daerah 27

2.1.2.3 Sumber Daya Aset 29

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.1.3.1 Capaian Kinerja Periode Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024 44

2.1.3.1.1 Transportasi Darat 45

2.1.3.1.2 Transportasi Perkeretaapian 94

2.1.3.1.3 Transportasi Sungai 104

2.1.3.1.4 Transportasi Danau 125

2.1.3.1.5 Trasportasi Penyebrangan 125
2.1.3.1.6 Transportasi Laut 130
2.1.3.1.7 Transportasi Udara (Non Kewenangan) 132
2.1.4 Kelompok Sasaran dan Layanan 148
2.2 Permasalahan dan Isu Perangkat Daerah 154
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan 154
2.2.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 157
2.2.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD 164
2.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 181
2.2.5 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) . 192
2.2.6 Telaah Pembangunan Perspektif Gender 198
2.2.7 Telaah Terhadap Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi 202
2.2.8 Penentuan Isu – Isu Strategis 205
2.2.9 Dukungan Lintas Sektoral..... 210
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2925-2029..... 212
3.2 Pohon Kinerja Dinas Perhubungan..... 218
3.3 Strategi dan Arahan Kebijakan..... 227
3.4 Manajemen Pengelola Risiko 232
BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 237
4.1 Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator..... 237
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Kelompok Sasaran Serta Pendanaan..... 268

4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 290
4.4 Indikator Kinerja Utama..... 292
4.5 Indikator Kinerja Kunci..... 293
BAB V PENUTUP 290

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Dinas Perhubungan Sumatera Selatan	29
Tabel II.2	Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi Tahun 2019-2022	52
Tabel II.3	Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi Tahun 2023-2024	57
Tabel II.4	Tipe Terminal Berdasarkan Kewenangan di Provinsi Sumatera Selatan	61
Tabel II.5	Kinerja Pengelolaan Terminal Tipe B di Provinsi Sumatera Selatan	62
Tabel II.6	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Jakabaring	64
Tabel II.7	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Jakabaring	64
Tabel II.8	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Jakabaring	65
Tabel II.9	Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Jakabaring	65
Tabel II.10	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Petanang	67
Tabel II.11	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Petanang	68
Tabel II.12	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Petanang	68
Tabel II.13	Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Terminal Tipe B Petanang	69
Tabel II.14	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Randik	71
Tabel II.15	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Randik	71
Tabel II.16	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Randik	71
Tabel II.17	Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Randik	72
Tabel II.18	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya	74
Tabel II.19	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya	74
Tabel II.20	Fasilitas Utama Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya	75
Tabel II.21	Fasilitas Penunjang Terminal dan Fasilitas Umum Tipe B KM.32 Inderalaya	76
Tabel II.22	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Martapura	78
Tabel II.23	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Martapura	78
Tabel II.24	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Martapura	78

Tabel II.25 Fasilitas Penunjang Terminal dan Fasilitas Umum Tipe B Martapura 79

Tabel II.26 Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Lubuk Harjo 81

Tabel II.27 Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo 81

Tabel II.28 Fasilitas Utama Terminal Tipe B Lubuk Harjo 82

Tabel II.29 Fasilitas Penunjang Terminal dan Fasilitas Umum Tipe B Lubuk Harjo 83

Tabel II.30 Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Muara Dua 85

Tabel II.31 Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Muara Dua 85

Tabel II.32 Fasilitas Utama Terminal Tipe B Muara Dua 85

Tabel II.33 Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Muara Dua 86

Tabel II.34 Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan 88

Tabel II.35 Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi di Provinsi Sumatera Selatan 89

Tabel II.36 Jumlah Trayek dan Bus Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Selatan..... 89

Tabel II.37 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020 – 2024 91

Tabel II.38 Data Kecelakaan Lalu Lintas Per kabupaten / Kota Tahun 2020-2024 92

Tabel II.39 Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 93

Tabel II.40 Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel..... 99

Tabel II.41 Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 100

Tabel II.42 Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan .. 102

Tabel II.43 Trayek Angkutan Sungai dan Danau Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan..... 105

Tabel II.44 Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai 108

Tabel II.45 Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan 110

Tabel II.46 Daftar TambahanPerahu Bantuan Bersifat Khusus Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin..... 114

Tabel II.47 Data Kapal Sungai yan Beroperasi pada Perairan Sumatera

Selatan 116

Tabel II.48 Luas dan Panjang Sungai Wilayah Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan 117

Tabel II.49 Klasifikasi Alur Pelayaran Sungai 117

Tabel II.50 Jumlah Rambu Sungai Provinsi Sumatera Selatan 118

Tabel II.51 Tarif Angkutan Sungai 124

Tabel II.52 Jumlah Kunjungan Penumpang Lima Tahun Terakhir (2017-2022) 126

Tabel II.53 Jumlah Kapal Yang Beroperasi 127

Tabel II.54 Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api 128

Tabel II.55 Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan 129

Tabel II.56 Produktifitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api – api 133

Tabel II.57 Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan 135

Tabel II.58 Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara SMB II Palembang 136

Tabel II.59 Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara Silampari Lubuk Linggau 137

Tabel II.60 Pencapaian Kinerja Pelayaran Dinas Perhubunga Provinsi Sumatera Selatan 138

Tabel II.61 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 147

Tabel II.62 Analisis Isu Tantangan dan Peluang Sesuai Kewenangan 150

Tabel II.63 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 164

Tabel II.64 Telaah Sinkronisasi Visi dan Misi RPJMD Dengan Visi dan Misi Kementrian Perhubungan 166

Tabel II.65 Telaah Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan Dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD 171

Tabel II.66 Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD Provinsi terhadap Sasaran Renstra PD Kabupaten/ Kota dan Renstra K/L 181

Tabel II.67 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 181

Tabel II.68 Hasil Telaah Struktur Ruang Provinsi Sumatera Selatan 182

Tabel II.69 Hasil Telaah Pola Ruang Provinsi Sumatera Selatan 190

Tabel II.70 Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 191

Tabel II.71 HAsil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Selatan OPD Dinas Perhubungan 192

Tabel II.72 Capain SDG's Goal 9 Sektor Transportasi 195

Tabel II.73 Capaian SDG's 11 Sektor Transportasi 198

Tabel II.74 Analisa Gender Terhadap Renstra 199

Tabel II.75 Target Penurunan Emisi GRK (AKSARA) Sektor Transportasi 203

Tabel II.76 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis 206

Tabel II.77 Identifikasi Isu Strategis Penyelenggaraan Urusan Transportasi Berdasarkan Kewenangan 207

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan 216

Tabel III.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan 217

Tabel III.3 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan 218

Tabel III.4 Tabel Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 219

Tabel III.5 Meta Indikator Kinerja Utama 225

Tabel III.6 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Jangka Menengah Pelayanan PD 229

Tabel III.7 Resiko Strategis Dinas Perhubungan 240

Tabel III.8 Risiko Operasional Dinas Perhubungan 242

Tabel IV.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra PD 246

Tabel IV.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 275

Tabel IV.3 Rincian Komponen Belanja Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 294

Tabel IV.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 291

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 298

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 299

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 19
Gambar II.2 Terminal Tipe B Jakabaring 63
Gambar II.3 Terminal Tipe B Petanang 67
Gambar II.4 Terminal Tipe B Randik..... 70
Gambar II.5 Terminal Tipe B KM.32 Inderalaya 74
Gambar II.6 Terminal Tipe B Martapura..... 77
Gambar II.7 Terminal Tipe B Lubuk Harjo..... 81
Gambar II.8 Terminal Tipe B Muara Dua 84
Gambar II.9 Peta Jalur Kereta Api Sumatera Selatan 100
Gambar II.10 Kapal Motor Ketek 120
Gambar II.11 Kapal Long Boat dan Speed Boat 121
Gambar III.1 Konsep Hubungan RPJMD dan Renstra 238
Gambar III.2 Proses Manajemen Risiko 239

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik II.1	Jumlah Perusahanan dan Bus Pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan	88
Grafik II.2	Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi di Provinsi Sumatera Selatan	89
Grafik II.3	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024.....	92
Grafik II.4	Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	94
Grafik II.5	Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	101
Grafik II.6	Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan	129
Grafik II.7	Produktivitas Agkutan Penyeberangan Tanjung Api –api.....	129

dishub_sumsel

BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam Pembangunan Daerah. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu dokumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). RPJMD disusun berisi indikasi program Pemerintah Daerah selama lima 5 (lima) tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis PD. Rencana Strategis PD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Dalam tahun berjalan pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2030 maka membawa konsekuensi bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 untuk mendukung perwujudan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan melalui

serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah hasil evaluasi Rencana Strategis periode lima tahun sebelumnya dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan.

Alur penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 berdasarkan ketentuan dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder), politis, serta atas - bawah (top-down) dan bawah – atas (bootom – up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), meliputi :

a) Persiapan penyusunan,
b) Penyusunan rancangan awal,
c) Penyusunan rancangan,
d) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat daerah,
e) Perumusan rancangan akhir,
f) Penetapan

Wilayah Sumatera Selatan saat ini mempunyai infrastruktur transportasi yang lengkap, dari darat, laut, udara serta kereta api, yang semua itu harus dirangkai menjadi satu kesatuan demi mendukung tujuan pembangunan daerah yang mampu berdaya saing baik ditingkat nasional maupun internasional. Segala aspek yang ada harus mampu menjadi potensi dan kekuatan untuk pembangunan daerah yang merata.

Untuk itu peranan dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan harus mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan, arah dan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan harus mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mengarah pada perbaikan sistem transportasi dengan pendekatan pembangunan infrastruktur perhubungan yang strategis. Isu – isu strategis penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada beradasarkan kewenangan serta perkembangan dinamika pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur perhubungan strategis mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu terwujudnya jaringan transportasi wilayah yang sustainable, multimoda, tumbuh merata serta keterpaduan multimoda yang bersifat massal. Adanya jaringan transportasi wilayah akan menimbulkan simpul-simpul transportasi yang strategis diantaranya terminal, stasiun, pelabuhan serta bandar udara. Transportasi massal yang berteknologi tinggi diantaranya LRT Sumatera Selatan.

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) bidang perhubungan dilakukan dalam upaya meningkatkan baik keandalan maupun kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Kelaikan prasarana transportasi antara lain :

1. Peningkatan jaringan transportasi jalan yang menjangkau seluruh

wilayah Sumatera Selatan serta simpul transportasi berupa terminal di setiap wilayah Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan prasarana angkutan sungai dan danau yang menjangkau daerah terpencil;
3. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan dan Laut Tanjung Api-api;
4. Mendorong Pembangunan New Palembang Port di Tanjung Carat;
5. Mendorong Pembangunan terminal terpadu multimoda Karya Jaya;
6. Mendorong penyediaan infrastruktur angkutan batu bara di Sumatera Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Perempuan.
5. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
6. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Instruksi Presiden. No. 9 tahun 2000. Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional;
8. Inpres 3/2010 ttg Program Pembangunan yang Berkeadilan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
15. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Darat yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
16. Peraturan tentang angkutan sungai danau dan penyeberangan dan Transportasi Laut yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
17. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Udara yaitu Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional

18. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Kereta Api yaitu Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
19. Permendagri 67 Tahun 2011 mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.
20. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 6 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029
24. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mendukung tujuan, sasaran arah dan kebijakan serta program kegiatan dan sub kegiatan, kerangka pendanaan indikatif yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029;
2. Sebagai alat ukur untuk mendukung target pencapaian Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029;
3. Memberikan pedoman dasar bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya berjalan sesuai dengan perencanaan awal;

4. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas, dengan komitmen bahwa tidak ada seorang pun tertinggal (no one left behind) dalam memperoleh akses dan manfaat terhadap pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan atau transportasi;
2. Sebagai bahan kajian yang akan diintegrasikan kedalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 - 2029;

Tahapan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan :

a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra

Pembentukan Tim penyusun Renstra dimulai dari penyiapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SKEP.10/0007/DISHUB/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Tahun 2025 – 2029 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Susunan keanggotaan Tim berasal dari pejabat dan staf Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang masing-masing.

Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja Bidang/UPTD yang ada. Tugas tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.

b. Orientasi Mengenai Renstra

Orientasi mengenai Renstra kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan

perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra.

Bahan orientasi mengenai Renstra, mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten / kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

c. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi penyusunan Renstra bidang perhubungan dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja 3 (tiga) tahunan pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan kewilayahan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;

2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang perhubungan;
2. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;
3. Dokumen-dokumen lainnya yaitu :
   a. Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029;
   b. Dokumen RPJPD tahun 2005 – 2025;
   c. Dokumen RPJMD tahun 2019 – 2023;
   d. Hasil evaluasi Renstra periode lalu;
   e. Data statistik perhubungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
    - 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia
    - 2.1.2.2 Sumber Daya Kelembagaan Perangkat Daerah
    - 2.1.2.3 Sumber Daya Aset
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
    - 2.1.3.1 Capaian Kinerja Periode Renstra Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024
2.1.3.1.1 Transportasi Darat
2.1.3.1.2 Transportasi Perkeretaapian
2.1.3.1.3 Transportasi Sungai
2.1.3.1.4 Transportasi Danau
2.1.3.1.5 Transportasi Penyeberangan
2.1.3.1.6 Transportasi Laut
2.1.3.1.7 Transportasi Udara (Non-Kewenangan)
2.1.4 Kelompok Sasaran dan Layanan
2.2 Permasalahan dan Isu Perangkat Daerah
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan
2.2.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
2.2.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD
2.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2.2.5 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)
2.2.6 Telaah Pembangunan Perspektif Gender
2.2.7 Telaah Terhadap Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi
2.2.8 Penentuan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.9 Dukungan Lintas Sektoral
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Pohon Kinerja Dinas Perhubungan
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.4 Manajemen Pengelola Risiko
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP

dishub_sumsel

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan & Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;

b. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan

penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;

e. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan;

f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, informasi dan teknologi perhubungan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas;

g. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara / daerah;

h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan, informasi dan teknologi, urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan Dinas;

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

c. Penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;

d. Penataan organisasi dan tata laksana;

e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan;

f. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara / daerah;

g. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengembangan informasi dan teknologi Perhubungan; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;

b. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi;

c. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelaksanaan pengendalian

operasional lalu lintas jalan dan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

d. Pembangunan Prasarana Lalu Lintas Jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang Angkutan Jalan, Angkutan Orang, Angkutan Barang dan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan barang dan pemaduan moda, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
2. Penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan barang, dan pemadu moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
3. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan barang, dan pemadu moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

5. Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi antara lain :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Bidang Pelayaran;

d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pekretaapian dan Pengembangan

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;

b. Penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;

c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengembangan transportasi;

d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan ini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

a. Penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
b. Pelaksanaan kegiatan operasional angkutan kapal penumpang dengan menggunakan bus air milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c. Pengawasan terhadap pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya di perairan;
d. Pengawasan terhadap illegal logging dan illegal fishing;
e. Penertiban terhadap kelengkapan administrasi dan alat-alat keselamatan kapal-kapal sungai dan danau;
f. Pelaksanaan patroli sungai secara reguler;
g. Pengkoordinasian dalam pencegahan penanggulangan bencana ataupun musibah/kecelakaan di perairan.

8. Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pengelolaan Terminal

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan di bidang terminal.

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan di bidang terminal, UPTD Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pengoperasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pengelolaan terminal;
b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait pengoperasian terminal;
c. pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan terkait pengoperasian terminal;
d. pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi terminal dan/atau pungutan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pengoperasian terminal;
f. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api dan Kereta Api Indralaya.

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pengoperasian dan pengendalian Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api dan Kereta Api Indralaya;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan;
c. melaksanakan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional dan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api dan Kereta Api Indralaya;
d. menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan;
e. melaksanakan dan mengawasi pemungutan retribusi pelayanan jasa dan/atau pungutan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait operasional dan pelayanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
g. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar II.1
Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

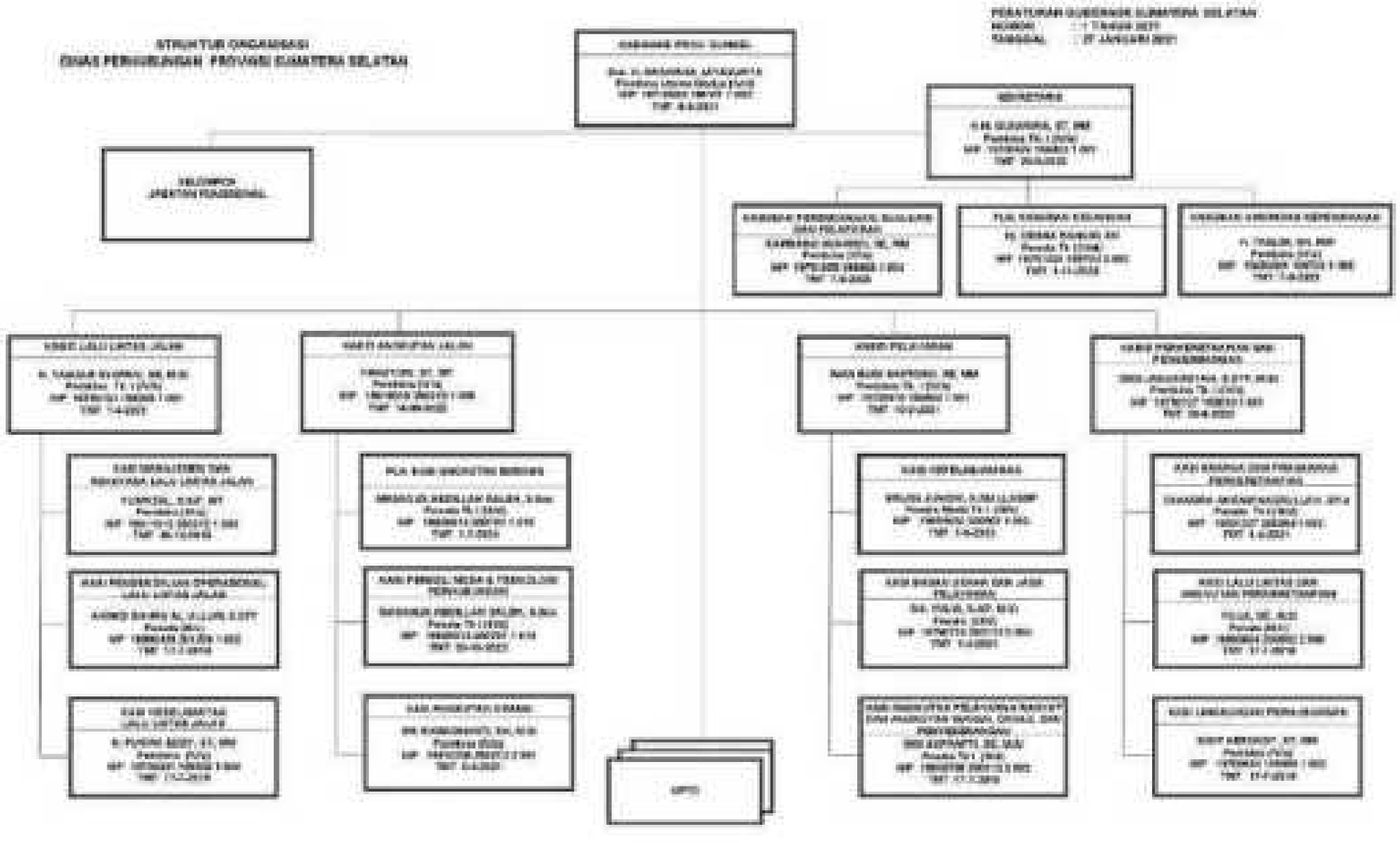

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.1.2.1Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan seperti tersebut diatas, maka sumber daya yang dimiliki dapat dikelompokan menjadi : Sumber Daya Manusia dan Kompetensi

Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 430 pegawai yang terdiri dari 130 PNS, 91 PPPK dan tenaga non ASN sebanyak 151 pegawai yang tersebar pada Sekretariat, 4 Bidang dan 3 UPTD dengan komposisi sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat

NO	JUMLAH PEGAWAI (68 orang)		JENJANG PENDIDIKAN		KOMPETENSI
	Laki - laki	Perempuan			
1.			S3	-	Diklat Anjab dan ABK
2.	7 orang	1 Orang	S2	8 orang	Diklat AKPK
3.	11 orang	19 orang	S1	30 orang	Diklat Keuangan
4.	4 orang	-	D4	4 orang	Diklat Perencanaan
5.	4 orang	5 orang	D3	9 orang	Diklat PBJ
6.			D2	-	Diklat Manajemen ASN
7.			D1	1 orang	
8.	10 orang	4 orang	SMA	14 orang	
9.	1 orang		SMP	1 orang	
10.	1 orang		SD	1 orang	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Sekretariat sebagai berikut :

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				
1.	JF Perencana Ahli Pertama	2	0	2
2.	JF Perencana Ahli Muda	2	0	2
3.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	1	1	0
4.	JF Arsiparis Terampil	1	1	0
5.	Penelaah Teknis Kebijakan	8	6	2
6.	Penata Layanan Operasional	8	3	5
7.	Pengolah Data dan informasi	4	0	4
8.	Pengadministrasi Perkantoran	4	0	4
Jumlah		30	11	19

NO	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Umum dan Kepegawaian				
1.	JF Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	4	0	4
2.	JF Arsiparis Ahli Pertama	4	0	4
3.	JF Arsiparis Penyelia	4	0	4
4.	JF Arsiparis Mahir	4	0	4
5.	JF Pranata Komputer Mahir	4	1	3
6.	JF Arsiparis Terampil	4	1	3
7.	Penelaah Teknis Kebijakan	6	6	0
8.	Penata Layanan Operasional	9	9	0
9.	Pengolah Data dan informasi	6	4	2
10.	Pengelola Layanan Operasional	4	4	0
11.	Pengadministrasi Perkantoran	6	2	4
12.	Operator Layanan Operasional	5	4	1
13.	Pengelola Umum Operasional	5	5	0
Jumlah		65	36	29
Subbag Keuangan				
1.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	2
2.	JF Arsiparis Terampil	2	1	1
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	8	6	2
4.	Penata Layanan Operasional	6	4	2
5.	Pengolah Data dan Informasi	6	4	2
6.	Pengelola Layanan Operasional	6	4	2
7.	Pengadministrasi Perkantoran	6	5	1
Jumlah		36	24	12

2. Bidang Lalu Lintas Jalan

NO	JUMLAH PEGAWAI (80 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki -laki	Perempuan		
1.			S3 -	Diklat PPNS
2.	5 orang	2 orang	S2 7 orang	Diklat Orientasi LLAJ
3.	17 orang	5 orang	S1 22 orang	Diklat JT
4.	9 orang	7 orang	D4 16 orang	Diklat ANDA LALIN
5.	1 orang	-	D3 1 orang	Diklat KA
6.			D2 -	
7.		1 orang	D1 1 Orang	
8.	32 orang	1 orang	SMA 33 orang	
9.			SMP -	
10.			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Lalu Lintas Jalan sebagai berikut :

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Manajamen Rekayasa Lalu Lintas Jalan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Penata Layanan Operasional	4	1	3
Jumlah		8	4	4
Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan				
1.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	2	1	1
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	25	20	5
3.	Penata Layanan Operasional	4	3	1
4.	Pengolah Data dan informasi	4	1	3
5.	Pengelola Layanan Operasional	4	3	1
6	Operator Layanan Operasional	50	38	12
Jumlah		89	66	23
Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	10	6	4
2.	Penata Layanan Operasional	5	3	2
Jumlah		15	9	6

3. Bidang Angkutan Jalan

NO	JUMLAH PEGAWAI (15 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1			S3	-	Diklat PPNS
2	2 orang	2 orang	S2	4 orang	Diklat Orientasi LLASDP
3	3 orang	2 orang	S1	5 orang	Diklat JT
4	3 orang		D4	3 orang	
5			D3	-	
6			D2	-	
7	2 orang	1 orang	SMA	3 orang	
8			SMP	-	
9			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Angkutan Jalan sebagai berikut :

NO	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Angkutan Orang				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
3.	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
Jumlah		6	3	3
Seksi Angkutan Barang				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	2	0
3.	Operator Layanan Operasional	4	4	0
Jumlah		8	7	1
Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	2	2

4. Bidang Pelayaran

NO	JUMLAH PEGAWAI (15 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1			S3 -	Diklat PPNS
	1 orang	4 orang	S2 5 orang	Diklat HILO
	3 orang	3 orang	S1 6 orang	
	1 orang		D4 1 orang	
	1 orang		D3 1 orang	
			D2 -	
	1 orang	1 orang	SMA 2 orang	
			SMP -	
			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Pelayaran sebagai berikut :

NO	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Kepelabuhanan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	2	2

Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	3	3	0
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
3.	Operator Layanan Operasional	2	2	0
Jumlah		7	6	1
Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2	1
2.	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
Jumlah		5	3	2

5. Bidang Perekeretaapian dan Pengembangan

NO	JUMLAH PEGAWAI (11 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1			S3 -	Diklat ANDA LALIN
2	3 orang	1 orang	S2 4 orang	Diklat Audit Keselamatan
3	2 orang	3 orang	S1 5 orang	Diklat Perkeretaapian
4		1 orang	D4 1 orang	Diklat Perlintasan Sebidang
5			D3 -	
6			D2 -	
7	1 orang		SMA 1 orang	
8			SMP -	
9			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan sebagai berikut :

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
Jumlah		4	2	2
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	1	3
Seksi Lingkungan Perhubungan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	2	2

6. UPTD PASDPL

NO	JUMLAH PEGAWAI (21 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1			S3 -	Diklat Orientasi LLASDP
	6 orang	2 orang	S2 8 orang	Diklat SAR
	5 orang	1 orang	S1 6 orang	Diklat MOP
	1 orang		D4 1 orang	
	4 orang		D3 4 orang	
			D2 -	
	2 orang		SMA 2 orang	
			SMP -	
			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD PASDPL sebagai berikut :

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Tata Usaha				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Pengadministrasi Perkantoran	5	5	0
Jumlah		9	8	1
Seksi Operasional				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
3.	Pengelola Data dan Informasi	2	1	1
Jumlah		8	5	3
Seksi Sarana dan Prasarana				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Pengelola Data dan Informasi	2	1	1
Jumlah		6	4	2

7. UPTD Pengelolaan Terminal

NO	JUMLAH PEGAWAI (104 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1			S3 -	Diklat Pengujian
2	3 orang	2 orang	S2 5 orang	Diklat Pengelolaan Terminal
3	29 orang	6 orang	S1 35 orang	
4	1 orang		D4 1 orang	
5	5 orang		D3 5 orang	
6			D2 -	
7	54 orang	3 orang	SMA 57 org	
8	1 orang		SMP 1 Org	
9			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD Pengelolaan Terminal sebagai berikut :

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Tata Usaha				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	2	2
2.	Penata Layanan Operasional	6	5	1
3.	Pengadministrasi Perkantoran	5	4	1
Jumlah		15	11	4
Seksi Operasional				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	14	10	4
2.	Penata Layanan Operasional	6	1	5
3.	Pengadministrasi Perkantoran	20	14	6
4.	Operator Layanan Operasional	20	16	4
Jumlah		60	41	19
Seksi Sarana dan Prasarana				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	4
2.	Penata Layanan Operasional	10	7	3
Jumlah		14	7	7

8. UPTD Pelabuhan Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Indralaya

NO	JUMLAH PEGAWAI (57 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1			S3 -	Diklat Perkeretaapian
2	2 orang	1 orang	S2 3 orang	Diklat Pengawasan Pelabuhan
3	18 orang	4 orang	S1 22 orang	
4	2 orang		D4 2 orang	
5	4 orang	5 orang	D3 9 orang	
6			D2 -	
7	20 orang	1 orang	SMA 21 orang	
8			SMP -	
9			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD Pelabuhan Tanjung Api api dan Stasiun Kereta Api Indralaya sebagai berikut :

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Tata Usaha				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Penata Layanan Operasional	5	1	4
3.	Pengelola Layanan Operasional	5	3	2
4.	Operator Layanan Operasional	5	2	3
Jumlah		19	9	10
Seksi Operasional Pelabuhan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	5	5	0
2.	Operator Layanan Operasional	20	1	19
Jumlah		25	6	19
Seksi Operasional Kereta Api Inderalaya				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	4
2.	Penata Layanan Operasional	10	4	6
3.	Pengelola Layanan Operasional	10	1	9
4.	Operator Layanan Operasional	50	33	17
Jumlah		74	38	36

2.1.2.2 Sumber Daya Kelembagaan Perangkat Daerah

Penataan, penguatan serta evaluasi organisasi merupakan Program ke-3 dari Sembilan Program Reformasi Birokrasi. Keorganisasian yang akan dijabarkan terkait dengan struktur, tugas, dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang menangani urusan bidang Perhubungan. Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah, peraturan yang mendasarinya adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan tersebut menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain tujuan dan sasaran

yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Sesuai dengan peraturan diatas, susunan organisasi dinas yang merupakan sumber daya kelembagaan sebagai sumber kekuatan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) subbag :
    a. Subbag Umum dan Kepegawaian
    b. Subbag Keuangan
    c. Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari 3 (tiga) seksi :
    a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan
    b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan
    c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan
4. Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari 3 (tiga) seksi :
    a. Seksi Angkutan Orang
    b. Seksi Angkutan Barang
    c. Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan
5. Bidang Pelayaran, terdiri dari 3 (tiga) seksi :
    a. Seksi Kepelabuhanan
    b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran
    c. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP
6. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan, terdiri dari 3 (tiga) seksi :
    a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
    b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian
    c. Seksi Lingkungan Perhubungan
7. UPTD PPASDPL, terdiri dari 3 (tiga) seksi :
    a. Subbag Tata Usaha
    b. Seksi Operasional
    c. Seksi Sarana dan Prasarana
8. UPTD Pengelolaan Terminal, terdiri dari 3 (tiga) seksi :
    a. Subbag Tata Usaha
    b. Seksi Operasional
    c. Seksi Sarana dan Prasarana
9. UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api dan Kereta Api Indralaya, terdiri dari 3 (tiga) seksi :
    a. Subbag Tata Usaha
    b. Seksi Operasional Pelabuhan
    c. Seksi Operasional Kereta Api Indralaya

2.1.2.3 Sumber Daya Aset

Tabel II.1
Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

NO	Nama Barang	Alamat Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
1	Kantor Dinas Perhubungan	Jl. Kpt. A. Rivai No. 51 Palembang	Tanah dan 2 (dua) buah Bangunan Gedung 2 lt Kantor Dinas Perhubungan
2	Rumah Dinas Talang Betutu	Jl. Cempaka Kel. Talang Betutu Palembang	Tanah dan Rumah Dinas No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23, dan Rumah Ibadah Dimanfaatkan
3	Rumah Dinas Pendawa	Jl. pandawa kel 2 ilir Palembang	Tanah dan 11 (sebelas) Bangunan Rumah Dinas
4	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api - Api	Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin	Tanah dan Gedung Kantor, Dermaga, Kantin, Fasilitas perbankan Sumsel Babel Pelabuhan Penyeberang TAA
5	Stasiun Kereta Api UNSRI Indralaya	Jl. Palembang - Indralaya	Bangunan Gedung Stasiun dan Gedung Kantor
6	Bangunan Gedung Terminal Type B Jakabaring	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Palembang	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Jakabaring
7	Bangunan Gedung Terminal Type B Indralaya	Jl Lintas Sumatera Indralaya KM 33	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Indralaya
8	Bangunan Gedung Terminal Type B Randik Musi Banyuasin	Jl. Terminal Randik kab. Muba	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD serta Mushola Terminal Type B Randik Muba
9	Bangunan Gedung Terminal Type B Muaraduo OKUS	Muaraduo Liwa Kab, Oku Selatan	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD, kios Terminal Type B Muaraduo
10	Bangunan Gedung Terminal Type B Martapura	Jl. lintas Sumatera km. 7 Kotabaru Selatan Martapura 32182	Tanah dan Bangunan Gedung 2 Lt. UPTD Terminal Type B Martapura

NO	Nama Barang	Alamat Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
11	Bangunan Gedung Terminal Type B Lubuk Harjo	Desa Lubuk Harjo Belitang Madang Raya	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Lubuk Harjo
12	Bangunan Gedung Terminal Type B Petanang	Jl. A. Yani Petanang Kota Lubuk Linggau	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD Terminal Type B Petanang
13	UPPKB Pematang Panggang	Pematang Panggang, Kec. Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir	Tanah dan Bangunan Gedung Timbangan
14	UPPKB Nibung	Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Lesung Batu Muda, Kec. Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas	Tanah dan Bangunan Gedung Timbangan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan ukuran untuk menilai terhadap standart pelayanan minimal yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023 – 2024. Ukuran kinerja pelayanan dapat berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dinyatakan dalam Level Indeks.

Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana perhubungan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah yang termasuk kategori wajib non pelayanan dasar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang menangani urusan perhubungan, keberadaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai instansi yang mengurusi transportasi yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Sebagaimana amanat Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Pasal 5 ayat (2) Perhubungan termasuk salah satu ruang lingkup Pelayanan Publik. Upaya pembangunan transportasi di Provinsi Sumatera

Selatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2024, harus mendapat penilaian dari pengguna layanan transportasi atau masyarakat sebagai umpan balik bagi organisasi menuju Reformasi Birokrasi dari sektor pelayanan publik. Penilaian terhadap pelayanan publik diukur melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan barang dan jasa publik serta administratif, sehingga dapat memberikan gambaran level penyelenggaraan organisasi dari sektor pelayanan publik.

Terdapat 6 (enam) elemen yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat yaitu pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan Profesionalisme SDM, peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan (termasuk penerapan LAPOR!), serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan transportasi yang menjadi kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

I. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada :

1. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api;
2. Terminal Tipe B Jakabaring Palembang;
3. Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya;
4. Terminal Tipe B Randik Sekayu;
5. Terminal Tipe B Petanang Lubuk Linggau;
6. Terminal Tipe B Martapura OKU Timur;
7. Terminal Tipe B Lubuk Harjo OKU Timur;
8. Terminal Tipe B Muara Dua OKU Selatan;
9. Pelayanan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan;
10. Pelayanan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
11. Pelayanan Angkutan Penumpang Sungai;

12. Pelayanan Rekomendasi Pengangkutan Barang Khusus di Perairan; dan
13. Pelayanan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas.

II. Responden Masyarakat

Adapun yang menjadi responden dalam survei kepuasan masyarakat ini adalah masyarakat pengguna layanan transportasi dan/atau pihak ketiga yang menggunakan layanan rekomendasi teknis perhubungan

III. Metodologi Penilaian

Metodologi yang dilakukan untuk menganalisis penilaian tingkat kepuasan masyarakat dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada calon responden dengan ukuran kualitatif, kemudian penilaian kualitatif diberikan score nilai.

Penilaian kualitatif dan score nilai sebagai berikut :

NO.	PENILAIAN KUALITATIF	SCORE NILAI	LEVEL INDEKS	KET
1.	Sangat Baik/Setuju/Mudah/Sesuai/Layak/Puas	5	5 = 5,00 – 5,99	
2.	Baik/Setuju/Mudah/Sesuai/Layak/Puas	4	4 = 4,00 – 4,99	
3.	Cukup Baik/Setuju/Mudah/Sesuai/Layak/Puas	3	3 = 3,00 – 3,99	
4.	Kurang Baik/Setuju/Mudah/Sesuai/Layak/Puas	2	2 = 2,00 – 2,99	
5.	Tidak Baik/Setuju/Mudah/Sesuai/Layak/Puas	1	1 = 0,00 – 1,99	

Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadapap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.
b. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

c. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
d. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
e. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hokum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
f. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
g. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
h. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian keglatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepadamasyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Berikut hasil indeks pelayanan publik Tahun 2024 yang merupakan hasil dari evaluasi pelayanan publik sebagai berikut :

1. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api

- U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,17
- U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,20
- U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,15
- U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 2,68
- U5 Kesesuaian produk pelayanan dalam standar pelayanan Level Indeks 3,10
- U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,27
- U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,27
- U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,71
- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,75
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,70

Rata – rata IKM Pelabuhan Tanjung Api – api 3,3

2. Terminal Tipe B Jakabaring Palembang

- U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,14
- U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,19
- U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,04
- U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 3,09

- U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,33
- U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,14
- U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,33
- U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,57
- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,76
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,76

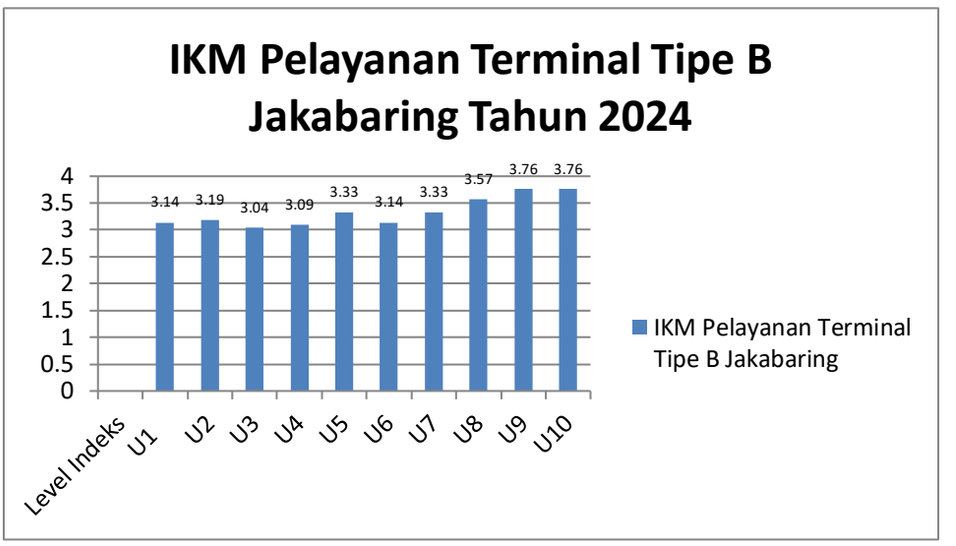

Rata – rata IKM Pelayanan Terminal Tipe B Jakabaring 3,3

3. Terminal Tipe B Petanang Musi Rawas
   - U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 2,85
   - U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,3
   - U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,1
   - U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 3
   - U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,4
   - U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,15
   - U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,1

- U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,4
- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,25
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,25

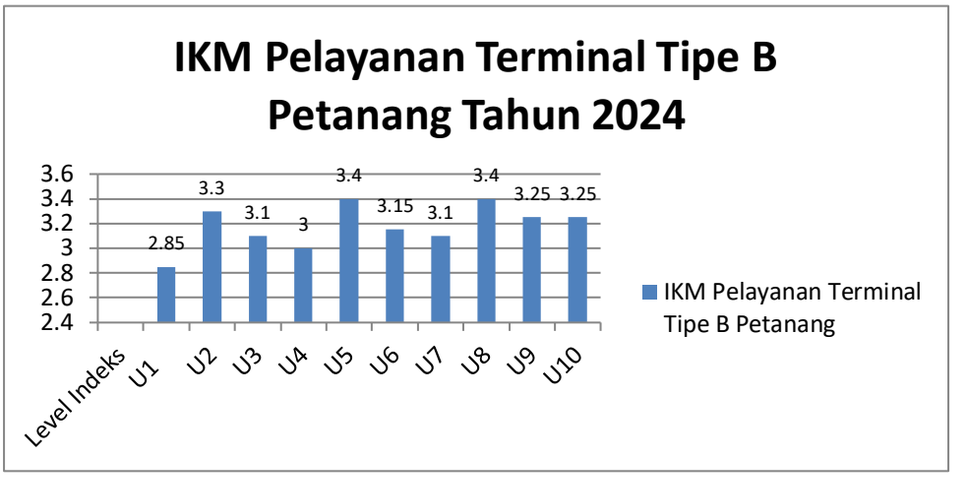

Rata – rata IKM Pelayanan Terminal Tipe B Petanang 3,18

4. Terminal Tipe B Randik Sekayu
   - U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,10
   - U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,05
   - U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 2,94
   - U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 2,78
   - U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,05
   - U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,42
   - U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,21
   - U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,15
   - U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 2,94
   - U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 2,94

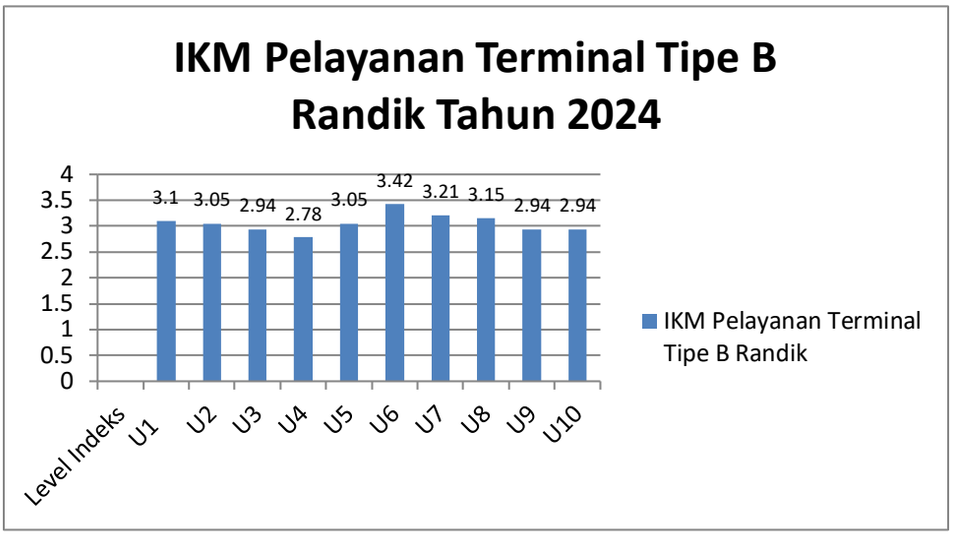

Rata – rata IKM Pelayanan Terminal Tipe B Randik 3,05

5. Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya

- U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,16
- U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,32
- U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,12
- U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 3,2
- U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,24
- U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,24
- U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,2
- U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,32
- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,52
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,52

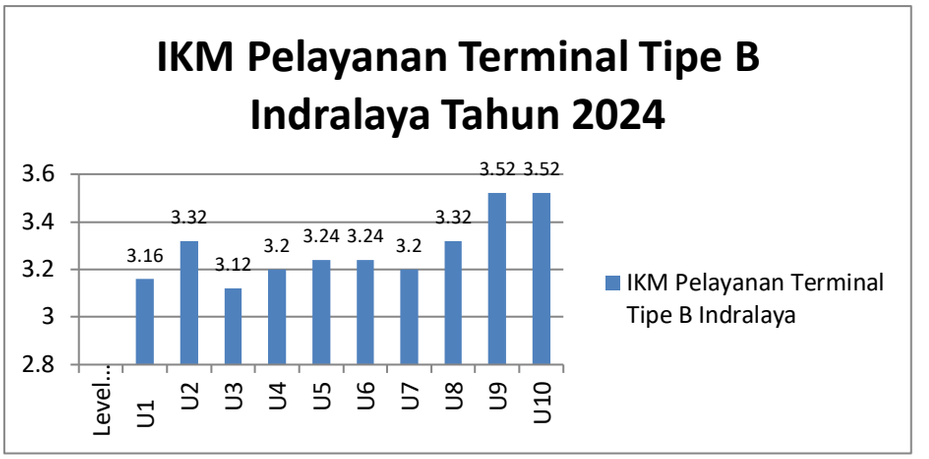

Rata – rata IKM Pelayanan Terminal Tipe B Indralaya 3,28

6. Terminal Tipe B Lubuk Harjo OKU Timur

- U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,15
- U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,15
- U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,1
- U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 3,0
- U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,55
- U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,3
- U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,25
- U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,4
- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,4
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,4

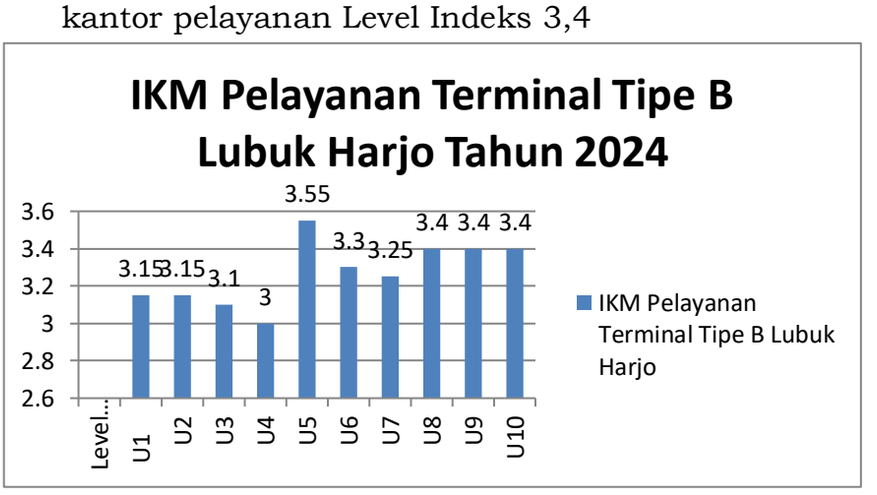

Rata – rata IKM Pelayanan Terminal Tipe B Lubuk Harjo 3,27

7. Terminal B Martapura OKU Timur

- U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,1
- U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,1
- U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,15
- U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 2,95
- U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,25
- U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,2
- U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,15
- U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,65
- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,65
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,65

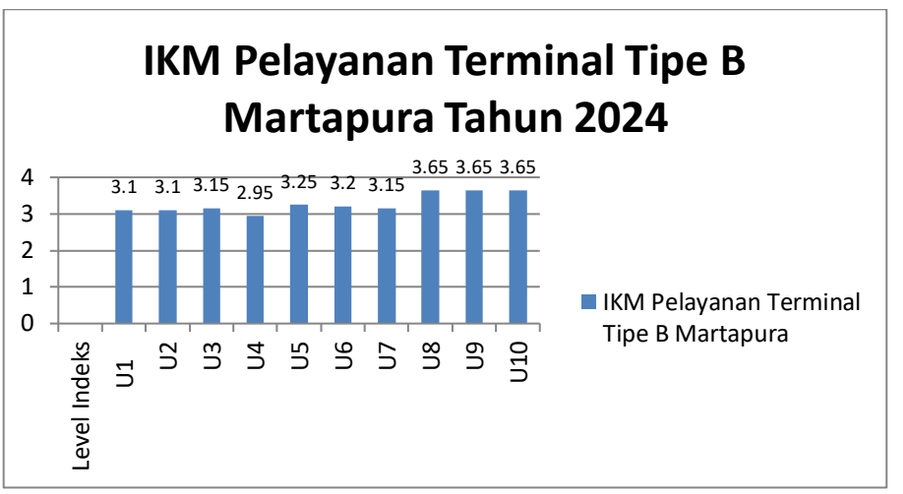

Rata – rata IKM Pelayanan Terminal Tipe B Martapura 3,28

8. Terminal Tipe B Muara Dua OKU Selatan

- U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,15
- U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,2
- U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,15
- U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 2,95

- U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,35
- U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,15
- U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,25
- U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,3
- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,45
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,45

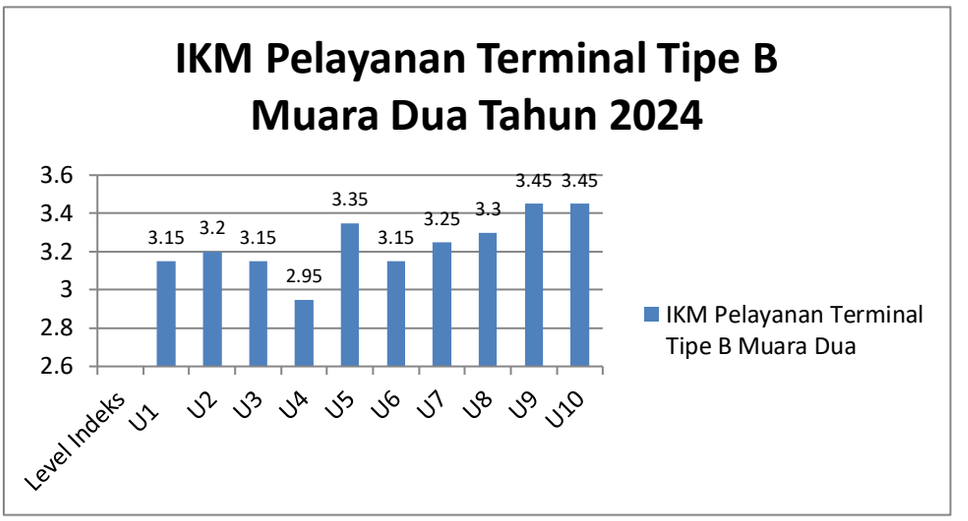

Rata – rata IKM Pelayanan Terminal Tipe B Muara Dua 3,24

9. Pelayanan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan
   - U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,2
   - U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,3
   - U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,2
   - U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 3,0
   - U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,2
   - U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,2
   - U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,3
   - U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,4

- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,5
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,5

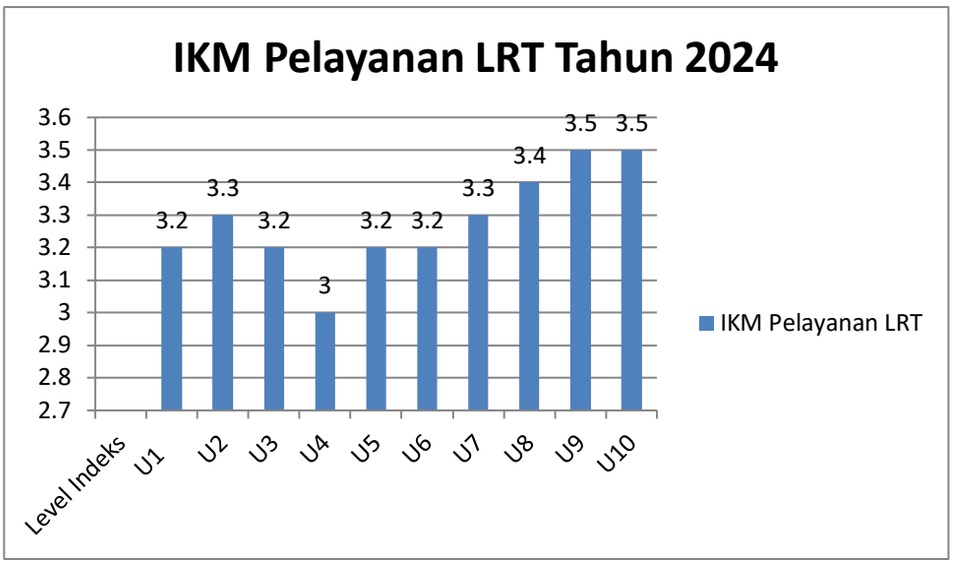

Rata – rata IKM Pelayanan LRT 3,3

10. Pelayanan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
    - U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,27
    - U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,35
    - U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,31
    - U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 3,31
    - U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,24
    - U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,29
    - U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,33
    - U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,68
    - U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,73
    - U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,42

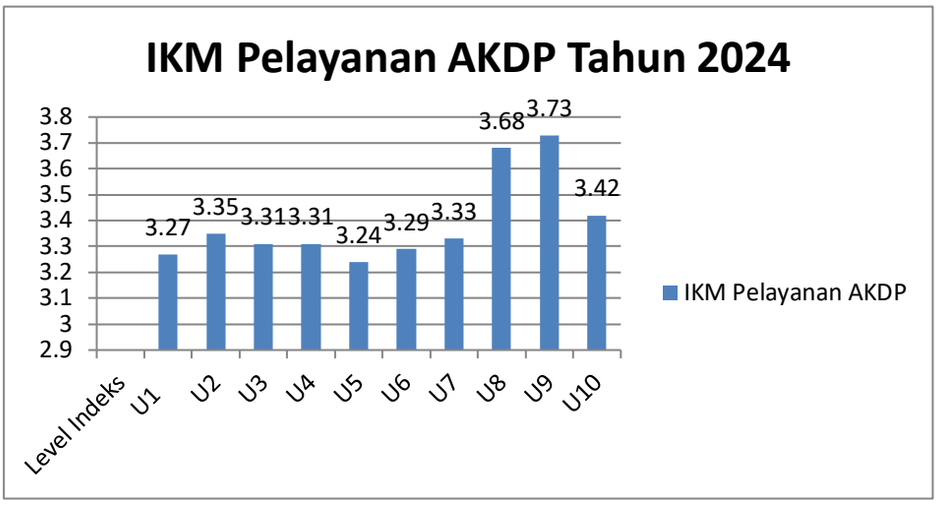

Rata – rata IKM Pelayanan AKDP 3,39

11. Pelayanan Angkutan Penumpang Sungai

- U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,27
- U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,35
- U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,31
- U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 3,31
- U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,24
- U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,29
- U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,33
- U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,68
- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,73
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,42

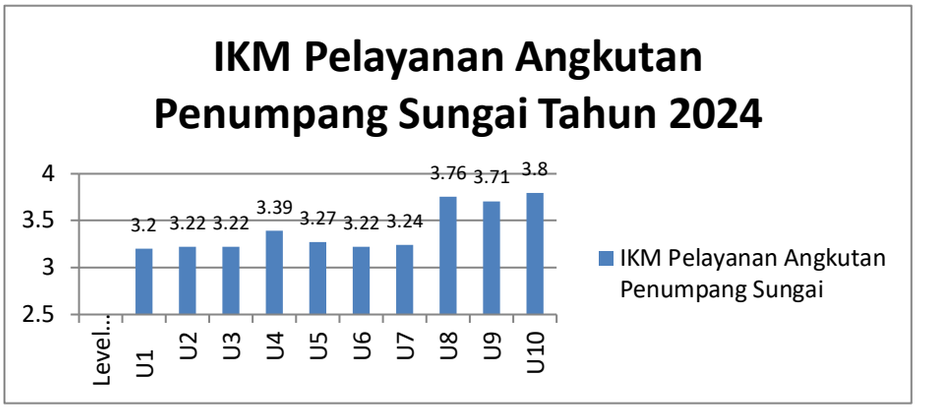

Rata – rata IKM Pelayanan Angkutan Penumpang Sungai 3,4

12. Pelayanan Rekomendasi Pengangkutan Barang Khusus di Perairan

- U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,46
- U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,51
- U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,44
- U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 3,78
- U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,44
- U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,46
- U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,49
- U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,55
- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,51
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,51

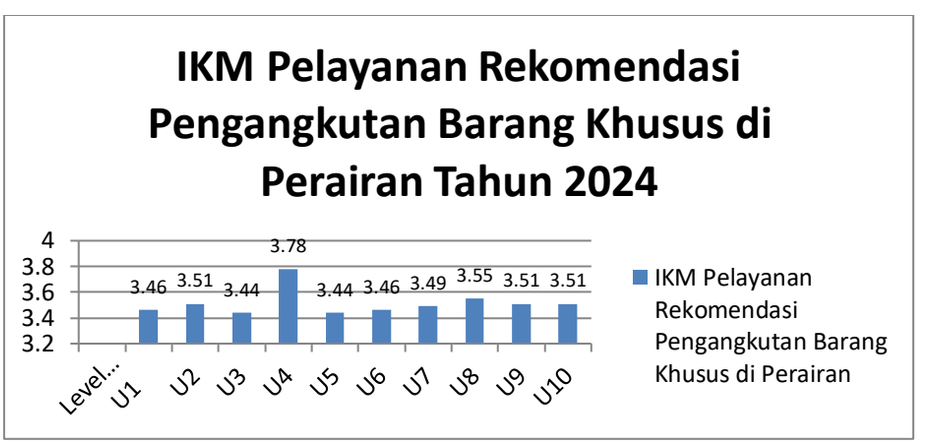

Rata – rata IKM Pelayanan Rekomendasi Pengangkutan Barang Khusus di Perairan 3,52

13. Pelayanan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas

- U1 Kesesuaian persyaratan pelayanan Level Indeks 3,49
- U2 Kemudahan Prosedur Pelayanan Level Indeks 3,51
- U3 Kecepatan waktu dalam pelayanan Level Indeks 3,51
- U4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Level Indeks 3,71
- U5 Pelayanan yang diberikan oleh petugas terminal Level Indeks 3,51
- U6 Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan Level Indeks 3,58
- U7 Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Level Indeks 3,57
- U8 Ketersediaan maklumat pelayanan/pengumuman tentang cuaca dll Level Indeks 3,83
- U9 Penanganan pengaduan pengguna layanan Level Indeks 3,83
- U10 Sarana dan prasarana untuk masyarakat di kantor pelayanan Level Indeks 3,86

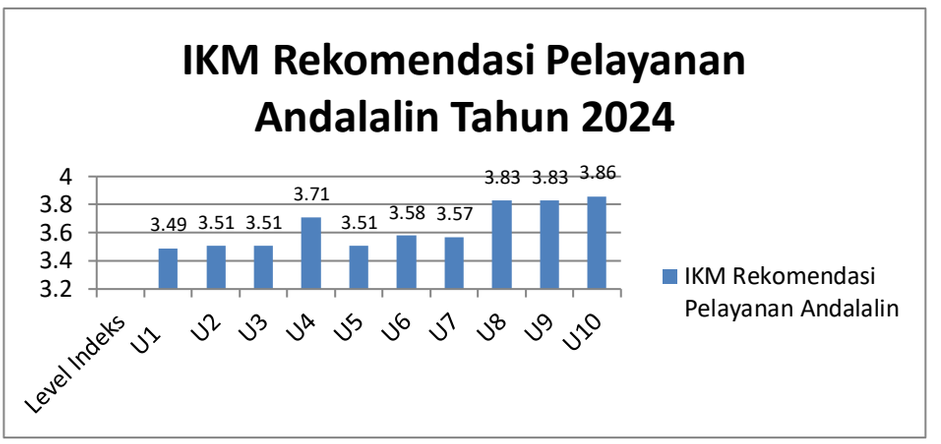

Rata – rata IKM Pelayanan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas 3,64

2.1.3.1 Capaian Kinerja Periode Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Sistem transportasi yang terintegrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang. Sehingga dengan adanya ketersediaan sistem transportasi yang terintegrasi akan menunjang berbagai

kegiatan ekonomi untuk [1] meningkatkan pertumbuhan ekonomi, [2] memantapkan stabilitas daerah, [3] meningkatkan pemerataan yang berkeadilan serta [4] mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana. Oleh karena itu sistem transportasi harus dikembangkan secara terpadu inter dan intra moda khususnya dalam rangka menunjang terwujudnya arahan struktur ruang wilayah yang telah direncanakan, mencakup transportasi darat dan perkeretaapian, sungai, danau dan penyeberangan, laut, dan transportasi udara.

Pertumbuhan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari berbagai event yang diselenggarakan di Sumatera Selatan baik nasional maupun internasional. Semua itu membutuhkan transportasi yang baik. Provinsi Sumatera Selatan memiliki moda transportasi yang lengkap baik transportasi darat dan pekeretaapian, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut serta udara.

Profil transportasi Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada penjelasan sebagai berikut.

2.1.3.1.1 Transportasi Darat

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 129/KPTS/ DIS.PUBMTR /2023 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 901/ KPTS/ DIS.PUBMTR/2021 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor Primer-2 bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki panjang jalan, panjang jalan provinsi 1.779,27Km

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) ruas jalan utama, dimana 2 (dua) diantaranya memiliki fungsi strategis dan sangat vital sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Adapun ketiga ruas jalan utama tersebut adalah :

(a) Lintas Timur Sumatera

Membentang dari Batas Lampung – Pematang Panggang – Simpang Penyandingan – Kayu Agung – Simpang Indralaya – Palembang – Betung – Batas Jambi sepanjang 405,32 Km dan melewati 5 (lima) kabupaten/kota dan pada umumnya terletak pada daerah dataran rendah serta rawa-rawa.

(b) Lintas Tengah Sumatera

Membentang dari batas Lampung Martapura – Baturaja – Simpang Sugiwaras – Muara Enim – Lahat – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau – Terawas – Batas Jambi sepanjang 472,35 Km dan melewati 6 (enam) kabupaten/kota. Pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi (pegunungan) dan permukaan bergelombang.

(c) Penghubung Antar Jalan Lintas

Pada saat ini jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar jalan lintas terdiri dari 2 (dua) jalan penghubung :

(1) Simpang Indralaya – Prabumulih – Muara Enim

Jalan ini sepanjang 147,46 Km melewati 3 (tiga) kabupaten/kota. Secara umum ruas jalan ini terletak pada daerah dataran rendah.

(2) Betung – Sekayu – Muara Beliti

Sepanjang 253,43 Km dan melewati 2 (dua) kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada di pinggiran Sungai Musi.

(d) Penghubung Alternatif Bagian Timur

Jalan penghubung alternatif antar 2 (dua) jalan lintas utama (Lintas Timur dan Lintas Tengah) di bagian sebelah timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani ruas jalan Simpang Penyandingan – Simpang Kepuh – Kurungan Nyawa – Martapura sepanjang 138,74 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(e) Penghubung Alternatif Bagian Tengah

Jalan penghubung alternatif ini dilayani ruas Prabumulih – Simpang Prabumulih – Simpang Beringin – Baturaja sepanjang 106,14 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(f) Penghubung Alternatif Bagian Barat (Tengah Barat)

(1) Ruas Jalan Martapura – Ujan Mas – Batas Bengkulu

Penanganan jalan ini masih secara terus menerus dilaksanakan peningkatannya. Pada ruas jalan ini kondisi geometriknya belum memenuhi persyaratan, sebagian besar alignment vertikal masih bergelombang karena berada di daerah perbukitan.

(2) Ruas Jalan Lahat – Pagar Alam – Tanjung Sakti – Batas Bengkulu

Jalan ini terletak di dataran tinggi yang rawan longsor dan patahan dengan kondisi jalan dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti – Batas Bengkulu dalam kondisi relatif dengan lebar jalan antara 3,5 – 4,5 meter.

(3) Ruas Jalan Pagar Alam – Tanjung Raya – Batas Bengkulu

Panjang ruas jalan ini adalah 52,7 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,5 meter dengan jenis perkerasan lapisan aspal dengan kondisi 60% baik. Trase jalan terletak di daerah perbukitan dan menyusuri sungai. Lokasi rawan longsor dan daerah patahan.

Kondisi angkutan umum yang melintasi Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1892 kendaraan per hari dan 1092 smp/jam. Asal daerah yang paling banyak adalah dari Kota Palembang yaitu sebesar 17,03%, urutan kedua yang terbanyak adalah Kabupaten OKU Selatan 10,92%, Kota Lubuk Linggau berada diurutan ketiga 9,17%. Sedangkan daerah tujuan yang paling banyak Kota Palembang 17,92%, Kabupaten Ogan Ilir 7,04% dan kabupaten/kota lainnya.

Jaringan angkutan barang berupa batubara di wilayah Sumatera Selatan yaitu :

- Desa Darmo, Tanjung Enim
  Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Tanjung Lago (Banyuasin)
- Desa Darmo, Tanjung Enim
  Muara Enim – PLTU – Tanjung Enim
- Desa Darmo, Tanjung Enim
  Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang
- Pendopo, Muara Enim
  Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Kertapati, Palembang
- Merapi Timur, Lahat
  Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan Tanjung Lago, Banyuasin
- Merapi Timur, Lahat
  Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang
- Merapi Barat, Lahat
  Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan Tanjung Lago, Banyuasin
- Merapi Barat, Lahat
  Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang
- Merapi Selatan, Lahat
  Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan Tanjung Lago, Banyuasin.

Dalam rangka mendukung kelancaran distribusi komoditas pertambangan serta menjaga keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas umum, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap operasional jalan khusus angkutan batubara di wilayah provinsi, khususnya yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak swasta. Pengoperasian jalan khusus ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi beban jalan umum, yang selama ini kerap mengalami kemacetan dan kecelakaan

akibat lalu lintas truk batubara. Dengan dialihkannya angkutan batubara ke jalur khusus, telah terjadi peningkatan signifikan dalam aspek keselamatan jalan, pengurangan kerusakan infrastruktur publik, serta menurunnya tingkat gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan turut berperan aktif dalam:

- Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan kelancaran operasional jalan khusus.
- Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengalihan truk batubara dari jalan umum ke jalur khusus.
- Memberikan rekomendasi teknis untuk peningkatan standar keselamatan, kelayakan operasional, dan integrasi sistem logistik berbasis darat.

Untuk mewujudkan Langkah strategis tersebut, maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan berbagai pihak pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan efisiensi logistik nasional. Di masa mendatang seiring dengan pengembangan jaringan jalan khusus yang lebih luas dan terintegrasi serta mendukung kebijakan pusat melalui Kementerian Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendorong implementasi kebijakan Zero Over Dimensi Over Loading (ODOL).

Sebagaimana diketahui Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya mineral berupa Batubara yang cukup besar dan tersebar dibeberapa daerah, termasuk di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagaimana daerah penghasil batubara lainnya, isu angkutan batubara selalu memiliki potensi gesekan terhadap lingkungan seperti gangguan penggunaan jalan umum, kerusakan jalan dan lain sebagainya.

Investasi dan gerak ekonomi mesti tetap berjalan dengan tetap memperhatikan lingkungan yang kondusif, untuk itu diperlukan adanya pemecahan atau solusi atas berbagai potensi permasalahan yang terjadi. Permasalahan angkutan batubara tersebut sedapat mungkin diminimalisir dengan memenuhi infrastruktur pembangunan jalan khusus ataupun moda transportasi lainnya seperti Kereta Api.

Pengangkutan batubara merupakan elemen krusial dalam mendukung perekonomian dan keberhasilan distribusi batubara keberangkatan dari lokasi awal tambang ke lokasi tujuan seperti pelabuhan barang, stasiun khusus barang dan pusat industri lainnya sangat bergantung pada keberadaan jaringan transportasi angkutan barang yang efektif dan efisien. Kereta api menjadi moda transportasi pilihan karena mampu mengangkut volume besar batubara dalam sekali perjalanan dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan angkutan darat.

Selain itu, penggunaan kereta api juga berkontribusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas serta menurunkan emisi karbon, sehingga memberikan manfaat lingkungan yang signifikan. Dengan kapasitas pengangkutan yang besar, kereta api mampu mengurangi penggunaan truk berat yang selama ini menjadi penyebab kerusakan jalan dan gangguan keselamatan di jalan umum.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan efisiensi angkutan batubara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong ketersediaan terwujudnya jaringan transportasi angkutan barang dengan fasilitasi, kolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Adapun salah satu fokus pengerjaan hal tersebut adalah berupaya mengembangkan jaringan rel kereta api ataupun stasiun khusus yang berada pada potensi lokasi di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya mendukung perluasan jalur rel kereta api, tetapi juga memperkuat infrastruktur pendukung seperti terminal multimoda dan fasilitas penunjang lainnya untuk memastikan kelancaran pengiriman batubara melalui peti kemas. Dukungan ini sejalan dengan regulasi yang melarang angkutan batubara melalui jalan umum, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga.

Melalui sinergi yang baik, diharapkan pengangkutan batubara menggunakan kereta api di Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan optimal, memberikan manfaat ekonomi yang besar, serta menjaga keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan Masyarakat.

Tabel II.2
Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi Tahun 2019 - 2022

NO.	NOMOR RUAS JALAN			NAMA RUAS JALAN	KAPASITAS	V/C RATIO			
						2019	2020	2021	2022
1	39			PLAJU – SP. SUNGAI PINANG-BTS. KAB. OKI (BANYUASIN)	2990,1	0.19	0.22	0.18	0,22
2	39	12	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)	2453	0.3	0.28	0.34	0,34
3	39	13	K	JLN.KAPT. ABDULLAH – JLN. ROBANI KADIR (PALEMBANG)	2843	0.21	0.19	0.21	0,22
4	40			BTS. KAB. BANYUASIN – KAYU AGUNG	4582	0.17	0.18	0.16	0,18
5	41	11	K	JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG)	1335	0.2	0.17	0.15	0,35
6	41	12	K	JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG)	2990,1	0.16	0.2	0.19	0,19
7	41	13	K	JLN. JAKSA AGUNG R. SUPRAPTO (PALEMBANG)	1598,16	0.48	0.49	0.51	0.53
8	41	14	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)	2990,1	0.26	0.25	0.25	0.24
9	41	16	K	JLN. RADIAL (PALEMBANG)	2428	0.44	0.41	0.41	0.4
10	41	17	K	JLN. SULTAN M. MANSYUR (PALEMBANG)	7033,1	0.38	0.42	0.43	0.46
11	42	11	K	JLN. KOLONEL ATMO (PALEMBANG)	1504,2	0.38	0.38	0.36	0.36
12	43	11	K	JLN. MERDEKA (PALEMBANG)	2453	0.38	0.38	0.36	0.36
13	43	12	K	JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG)	2422	0.46	0.48	0.48	0.49
14	43	13	K	JLN. PSW SUBEKTI (PALEMBANG)	1746,4	0.72	0.65	0.65	0.6
15	43	14	K	JLN. LETKOL ISKANDAR (PALEMBANG)	1335	0.07	0.07	0.07	0.07
16	43	18	K	JLN. LINGKAR MASJID AGUNG / JLN. CIK AGUS KEMAS (PALEMBANG)	1288,38	0.13	0.13	0.13	0.13
17	43	19	K	JLN. LETTU KARIM KADIR (GANDUS) – BTS. KAB. BANYUASIN	1406,1	0.35	0.35	0.34	0.33

18	43	20	K	JLN. PANGERAN RATU – PASAR INDUK – SP. JL. PENDIDIKAN	1445	0.42	0.39	0.48	0,48
19	43	21	K	JL. PENDIDIKAN – JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	1445	0.21	0.21	0.2	0.2
20	44	11	K	JLN. M. ISA (PALEMBANG)		0.44	0.46	0.48	0.49
21	44	12	K	JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	4582	0.46	0.48	0.48	0.49
22	44	13	K	JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG)	2494	0.34	0.34	0.33	0.32
23	44	14	K	JLN. PANGERAN AYIN (KOTA PALEMBANG) – BTS. BANYUASIN	2843	0.41	0.41	0.4	0.39
24	44	14.A	K	BTS. KOTA PALEMBANG – KENTEN LAUT (BANYUASIN)	5510	0.52	0.53	0.56	0.57
25	44	15	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	5611,94	0.14	0.17	0.18	0.2
26	44	17	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	5916,76	0.44	0.44	0.45	0.45
27	44	18	K	JLN. ADI SUCIPTO – BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	5698,72	0.33	0.35	0.36	0.41
28	44	19	K	JLN. H. M. NOERDIN PANDJI (PALEMBANG)	1750	0.65	0.65	0.6	0.6
29	46			SP. MERANJAT – BTS. KAB. MUARA ENIM	1750	0.18	0.2	0.17	0,19
30	47			BTS. KAB.OGAN ILIR - BERINGIN	5611,76	0.19	0.21	0.18	0,19
31	50	11	K	JLN. SOETOMO (BATURAJA)	4582	0.23	0.24	0.2	0,21
32	51			TANJUNG RAJA – SP. TAMBANG RAMBANG	5698,72	0.18	0.16	0.14	0,16
33	52			SP. TAMBANG RAMBANG – BTS. KAB. OKI	5510	0.1	0.11	0.08	0,09
34	53			BTS. KAB. OGAN ILIR – LUBUK BATANG	1445	0.08	0.09	0.06	0,08
35	54			SP. PENYANDINGAN – BTS. KAB. OKUT	1445	0.23	0.26	0.24	0,24
36	55			BTS. KAB. OKI – SP. KEPUH	1406,1	0.2	0.22	0.19	0,21
37	56			SP. KEPUH – KURUNGAN NYAWA	1504,2	0.19	0.22	0.21	0,21
38	57			KURUNGAN NYAWA - MARTAPURA	2453	0.18	0.22	0.21	0,22
39	58			KURUNGAN NYAWA – GUMAWANG	1335	0.21	0.2	0.24	0,23

40	59			GUMAWANG – PETANGGAN	1288,38	0.2	0.21	0.18	0,19
41	60			PETANGGAN – TJ. KEMUNING – BTS. KAB. OKI	1746,4	0.18	0.19	0.16	0,18
42	61			DABUK REJO – BTS. KAB. OKUT	1598,16	0.1	0.12	0.09	0,10
43	62			BATURAJA – BTS. KAB. OKUT	2990,1	0.3	0.25	0.28	0,28
44	62	11	K	BTS. KAB. OKU – SP. MARTAPURA	991	0.4	0.4	0.4	0.4
45	63			MARTAPURA – SP. MARTAPURA	1335	0.18	0.21	0.24	0,24
46	64			SP. MARTAPURA – MUARA DUA	2453	0.21	0.24	0.23	0,23
47	65			MUARA DUA – KOTA BATU – BTS. PROV. LAMPUNG	2453	0.22	0.19	0.21	0,22
48	66			MUARA DUA – SP. HAJI	1406,1	0.19	0.22	0.18	0,17
49	67			SP. HAJI – SP. CAMPANG	1598,16	0.23	0.18	0.14	0,17
50	68			SP. CAMPANG – UJAN MAS – BTS. PROV. BENGKULU	1288,38	0.14	0.12	0.08	0,09
51	69			SEKAYU – BTS. KAB. PALI	2679,95	0.33	0.34	0.35	0.36
52	70			BTS. KAB. MUBA – SP. AIR ITAM	2453	0.26	0.15	0.07	0,09
53	71			SP. AIR ITAM – SP. TALANG BULANG	1659,84	0.63	0.65	0.65	0.67
54	72			SP. SUGIHWARAS – BTS. KAB. LAHAT	2538,9	0.21	0.17	0.12	0,14
55	73			BTS. KAB. MUARA ENIM – SP. AIR DINGIN	2244,6	0.32	0.33	0.33	0.34
56	74			TEBING TINGGI – TANJUNG RAYA	2462,733	0.25	0.28	0.3	0.31
57	75			TANJUNG RAYA – BTS. PROV. BENGKULU	2538,9	0.19	0.21	0.23	0.24
58	76			PAGARALAM – TANJUNG RAYA	1925,1	0.4	0.44	0.46	0.48
59	78			MUARA SIBAN – SP. EMBACANG	2648,1	0.15	0.16	0.18	0.2
60	82			SP. PERIUK – TUGU MULYO – TERAWAS	1925,1	0.048	0.05	0.06	0.059
61	83			TERAWAS – TABATINGGI – MAUR	2513,511	0.4	0.42	0.42	0.43
62	84			BTS. KAB. MUARA ENIM - PAYARAMAN	1989,27	0.12	0.13	0.16	0.18
63	85			LEMBAK – BTS. KAB. OGAN ILIR	1659,84	0.24	0.11	0.1	0,12
64	87			JLN. SAUNG NAGA – TUGU BATU KUNING	2244,73	0.16	0.16	0.14	0,15

65	88			JLN. KTM RAMBUTAN – BTS. KAB. MUARA ENIM	5611,76	0.23	0.26	0.24	0,24
66	89			JLN. AKSES MENUJU KEBUN RAYA SRIWIJAYA – BTS. KAB. OGAN ILIR	5916,76	0.22	0.2	0.19	0,19
67	90			JLN. PRABUMULIH – SP. MEO	4582	0.16	0.08	0.13	0.13
68	91			JLN. SP. BELIMBING – PENDOPO (PALI)	5698,72	0.13	0.07	0.15	0.14
69	92			JLN. AKSES MENUJU TPI SUNGSANG (BANYUASIN)	2453	0.18	0.21	0.28	0.28
70	93			BTS. KOTA PALEMBANG – SUKOMORO (BANYUASIN)	1335	0.18	0.19	0.17	0.18
71	94			BTS. KOTA PALEMBANG – SUKAJADI (BANYUASIN)	1335	0.18	0.17	0.19	0.19
72	95			TEBING TINGGI – PENDOPO	4582	0.2	0.19	0.21	0.20
73	96			TJ. CERMIN – PERANDONAN	2538,74	0.33	0.29	0.34	0.33
74	97			KEBAN AGUNG – SP. TJ. ARO	2538,74	0.2	0.19	0.21	0.20
75	98			MUARA RUPIT- KARANG DAFO – SP.4 KELINGI / a (BTS. MUARA)	2822	0.2	0.22	0.22	0,22
76	99	21	K	JLN. HANDAYANI – TUGU MULYO	2765	0.21	0.22	0.22	0,23
77	100			BTS. KAB. PALI – SP. SEMAMBANG	2654	0.18	0.19	0.21	0,21
78	101			SP.3 MARGA BARU (BTS. MURATARA) – MUARA LAPITAN	2765	0.2	0.19	0.22	0,22
79	102			SP. LIMA PENDOPO (KAB. PALI) – BTS. KAB. MURA	2622	0.21	0.23	0.22	0,23
80	103			SP. RAJA – MODONG	2742	0.2	0.2	0.23	0,23
81	104			LEMBAK – GELUMBANG	1435	0.2	0.21	0.2	0,21
82	105			SUNGAI DUA – SP. INPRES RSA – MUARA SUGIHAN	1615	0.15	0.17	0.18	0,19
83	106			SP. INPRES RSA – MUARA PADANG	1615	0.14	0.16	0.18	0,18
84	107			MUARA PADANG – MUARA SUGIHAN	1627	0.13	0.15	0.18	0,18

85	108			SP. OPI – BABATAN SAUDAGAR – SRIJABO	2750	0.2	0.19	0.21	0,20
86	109			TRANS SP2 TANAH ABANG – SP. TANAH ABANG	2567	0.18	0.19	0.2	0,19
87	110			SUMBU SARI – SURYA ADI	1627	0.12	0.14	0.17	0,17
88	111			LUBUK SEBERUK – SURYA ADI	1627	0.13	0.15	0.17	0,17
89	112			BETUNG – PETANGGAN	2781	0.16	0.19	0.21	0,21
90	113			GUMAWANG – RASUAN (SP. KEPUK)	2581	0.21	0.22	0.3	0,29
91	114			JLN. AKSES JEMBATAN CEMPAKA – TRANS SP2 TANAH ABANG	5916,76	0.35	0.37	0.38	0,38
92	115			JL. MATA MERAH (KOTA PALEMBANG) – JLN. MERAH MATA KAB. BANYUASIN	2581	0.22	0.25	0.25	0,26
	RATA – RATA					0,26	0,25	0,25	0,31

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2022

Tabel II.3
Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi Tahun 2023 - 2024

NO	NOMOR RUAS JALAN			NAMA RUAS JALAN	Kapasitas (SMP/JAM)	V/C Rasio	
						2023	2024
1	1	1	K	JLN. LINGKAR MASJID AGUNG (PALEMBANG)	2.834,00	0,33	0,33
2	1	2	K	JLN. MERDEKA (PALEMBANG)	3.643,00	0,40	0,40
3	1	3	K	JLN. KOL ATMO (PALEMBANG)	5.881,00	0,37	0,37
4	1	4	K	JLN. BRIGJEN. HM. DHANNY EFFENDY (PALEMBANG)	2.652,00	0,51	0,51
5	1	5	K	JLN. KOL. AHMAD BADARUDDIN - JLN. LETKOL ISKANDAR (PALEMBANG)	2.940,50	0,51	0,51
6	1	6	K	JLN. PSW. SUBEKTI (PALEMBANG)	3.421,00	0,60	0,60
7	1	7	K	JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG)	2.842,00	0,44	0,44
8	1	8	K	JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG)	3.324,00	0,58	0,58
9	1	9	K	JLN. WALIKOTA H. HUSNI (PALEMBANG)	3.258,00	0,35	0,35
10	1	10	K	JLN. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO (PALEMBANG)	3.000,00	0,76	0,76
11	1	11	K	JLN. M. ISA (PALEMBANG)	2.492,00	0,62	0,62
12	1	12	K	JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG)	2.940,50	0,59	0,59
13	1	13	K	JLN. SULTAN M. MANSYUR (PALEMBANG)	2.290,00	0,59	0,59
14	1	14	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)	3.322,00	0,33	0,33
15	1	15	K	JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	3.000,00	0,54	0,54
16	1	16	K	JLN. PANGERAN RATU – PASAR INDUK – SP. JL. PENDIDIKAN (PALEMBANG)	2.940,50	0,48	0,48
17	1	17	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)	2.940,50	0,43	0,43
18	1	18	K	JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG)	3.197,50	0,78	0,78

19	1	19	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	3.013,00	0,76	0,76
20	1	20	K	JLN. PANGERAN AYIN (KOTA PALEMBANG) – BTS. BANYUASIN	2.690,00	0,39	0,39
21	1	21	K	JL. PENDIDIKAN - JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	2.290,00	0,26	0,26
22	1	22	K	JLN. KAPT ABDULLAH - JLN. ROBANI KADIR	3.048,00	0,46	0,46
23	1	23	K	JLN. LETTU KARIM KADIR (GANDUS) - BTS. KAB. BANYUASIN	2.490,00	0,41	0,41
24	1	24	K	JLN. NOERDIN PANDJI (PALEMBANG)	3.196,00	0,54	0,54
25	1	25	K	BTS. KOTA PALEMBANG - KENTEN LAUT (BANYUASIN)	2.530,00	0,40	0,40
26	1	26	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	2.346,97	0,37	0,37
27	1	27	K	JLN. TAQWA MATA MERAH (PALEMBANG) - MERAH MATA (BTS. BANYUASIN)	2.490,00	0,28	0,28
28	1	28	K	JLN. ADI SUCIPTO - BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	2.690,00	0,45	0,45
29	2			BTS. KOTA PALEMBANG - SUKAJADI (BANYUASIN)	2.690,00	0,35	0,35
30	3			BTS. KOTA PALEMBANG - SUKOMORO (BANYUASIN)	2.690,00	0,34	0,34
31	4			PLAJU - SP. SUNGAI PINANG - BTS. KAB. OKI	2.690,00	0,33	0,33
32	5			JLN. KTM RAMBUTAN - SP. LOROK	2.290,00	0,27	0,27
33	6			SP. OPI – BABATAN SAUDAGAR – SRIJABO	2.750,00	0,24	0,24
34	7			JLN. AKSES MENUJU KEBUN RAYA SRIWIJAYA - SP. LOROK	1.750,00	0,27	0,27
35	8			BTS. KAB. BANYUASIN - CELIKAH (KAYU AGUNG)	2.697,00	0,36	0,36
36	9			SP. MERANJAT - BTS. KAB. MUARA ENIM	1.650,00	0,24	0,24
37	10			BTS. KAB. MUARA ENIM - PAYARAMAN	2.150,00	0,20	0,20
38	11			TANJUNG RAJA - SP. TAMBANG RAMBANG	2.797,00	0,26	0,26
39	12			SP. PENYANDINGAN - BTS. KAB. OKUT	1.537,39	0,27	0,27
40	13			JLN. AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN)	2.453,00	0,19	0,19
41	14			TRANS SP. 1 - SP. TANAH ABANG	2.567,00	0,20	0,20
42	15			CEMPAKA - TRANS SP. 1	2.436,59	0,38	0,38

43	16			SP. TAMBANG RAMBANG - BTS. KAB. OKU	2.797,00	0,19	0,19
44	17			LUBUK SEBERUK - SUMBU SARI - MATARAM JAYA	1.664,26	0,19	0,19
45	18			BTS. KAB. OKI - SP. KEPUH	1.664,26	0,23	0,23
46	19			BTS. KAB. OGAN ILIR - PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII)	1.664,26	0,13	0,13
47	20			SEKAYU – BTS. KAB. PALI	2.679,95	0,36	0,36
48	21			BETUNG – PETANGGAN	1.664,26	0,22	0,22
49	22			DABUK REJO - BTS. KAB. OKUT	1.564,26	0,18	0,18
50	23			PETANGGAN - TJ. KEMUNING - BTS. KAB. OKI	1.764,26	0,19	0,19
51	24			GUMAWANG – RASUAN (SP. KEPUH)	1.664,26	0,26	0,26
52	25			PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII) - SP. LUBUK BATANG	1.764,26	0,14	0,14
53	26			GUMAWANG - PETANGGAN	1.288,88	0,24	0,24
54	27			SP. KEPUH - KURUNGAN NYAWA	1.504,63	0,25	0,25
55	28			KURUNGAN NYAWA - GUMAWANG	1.335,00	0,25	0,25
56	29			KURUNGAN NYAWA - MARTAPURA	2.453,00	0,25	0,25
57	30			MARTAPURA - SP. MARTAPURA	2.127,30	0,27	0,27
58	31			SP. SUKJADI (BATURAJA) - SP. LENGKITI	2.427,30	0,35	0,35
59	32			SP. LENGKITI - SP. MARTAPURA	2.167,87	0,27	0,27
60	33			SP. MARTAPURA - MUARA DUA	2.327,30	0,28	0,28
61	34			MUARA DUA - SP. HAJI	2.064,17	0,19	0,19
62	35			SP. HAJI - SP. CAMPANG	2.064,70	0,18	0,18
63	36			SP. CAMPANG - SP. MUARA SINDANG	1.664,26	0,13	0,13
64	37			SP. MUARA SIDANG - BTS. PROV BENGKULU	1.457,76	0,12	0,12
65	38			MUARA DUA - SP. SENDER	1.664,26	0,16	0,16
66	39			SP. SENDER - BTS. PROV. LAMPUNG	1.764,26	0,21	0,21
67	40			LEMBAK - BTS. KAB. OGAN ILIR	1.664,26	0,13	0,13

68	41			LEMBAK - MODONG (BTS. KAB. MUARA ENIM)	1.564,26	0,12	0,12
69	42			BTS. KAB. OGAN ILIR - BERINGIN	1.335,00	0,10	0,10
70	43			SP. RAJA – MODONG (BTS. KAB. MUARA ENIM)	2.742,00	0,25	0,25
71	44			SP. AIR ITAM - SP. TALANG BULANG	1.664,26	0,69	0,69
72	45			BTS. KAB. MUBA - SP. AIR ITAM	2.453,00	0,13	0,13
73	46			JLN. SP. BELIMBING - PENDOPO (PALI)	2.742,00	0,17	0,17
74	47			SP. LIMA PENDOPO (KAB. PALI) - BTS. KAB. MURA	2.767,00	0,24	0,24
75	48			SP. 9 BANGUN JAYA - SP. KULIM (BTS. PALI)	2.679,95	0,22	0,22
76	49			SP. SUGIHWARAS - BTS. KAB. LAHAT	2.538,90	0,16	0,16
77	50			SP. SEMAMBANG - SP. 9 BANGUN JAYA (MUSIRAWAS)	2.111,75	0,15	0,15
78	51			BTS. KAB. MUARA ENIM - SP. AIR DINGIN	2.244,60	0,35	0,35
79	52			MUARA SIBAN - SP. EMBACANG	2.648,10	0,24	0,24
80	53			KEBAN AGUNG - SP. TJ. ARO (PAGARALAM)	2.427,00	0,24	0,24
81	54			TJ. CERMIN - PERANDONAN (PAGARALAM)	2.111,75	0,25	0,25
82	55			TEBING TINGGI - PENDOPO (EMPAT LAWANG)	2.261,75	0,22	0,22
83	56	K		JLN. HANDAYANI (KOTA LUBUK LINGGAU) - TUGUMULYO (KAB. MUSI RAWAS)	2.261,75	0,35	0,35
84	57			TEBING TINGGI - TANJUNG RAYA	2.462,73	0,34	0,34
85	58			SP. PERIUK - TUGU MULYO - TERAWAS	1.925,10	0,084	0,084
86	59			PAGARALAM - TANJUNG RAYA	1.925,10	0,49	0,49
87	60			TERAWAS - TABATINGGI - MAUR	2.513,50	0,48	0,48
88	61			TANJUNG RAYA - BTS. PROV BENGKULU	2.538,900	0,28	0,28
RATA - RATA						0,32	0,32

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2024

Tabel II.4
Tipe Terminal Berdasarkan Kewenangan
Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe Terminal		
1	Palembang	1. Karya Jaya	A		
		2. Alang-Alang Lebar	A		
		3. Plaju			C
		4. Jakabaring		B	
		5. Tangga Buntung			C
		6. Lemabang			C
		7. Sako			C
2	Prabumulih	1. Prabumulih			C
		2. Kota Prabumulih			C
3	Pagaralam	1. Nendagung			C
		2. Pagar Gading			C
4	Lubuk Linggau	1. Petanang		B	
		2. Muara			C
		3. Kalimantan			C
		4. Watas			C
		5. Satelit			C
5	Banyuasin	1. Betung	A		
6	Musi Banyuasin	1. Randik		B	
7	Ogan Ilir	1. Km 32 Indralaya		B	
8	Ogan Komering Ilir	1. Kayu Agung	A		
		2. Tanjung Raja			C
		3. Tulung Selapan			C
9	Ogan Komering Ulu	1. Baturaja	A		
10	OKU Timur	1. Kota Baru		B	
		2. Lubuk Harjo		B	
11	OKU Selatan	1. Muara Dua		B	
12	Muara Enim	1. Muara Enim	A		
		2. Simpang Kodim			C
		3. Bantingan			C
		4. Talang Ubi			C
13	Musi Rawas	1. Simpang Periuk	A		
		2. Lakitan			C
		3. Trawas			C
14	Lahat	1. Batay	A		
		2. Muara Siban			C
		3. Lembayung			C
15	Empat Lawang	-	-	-	-
16	PALI	-	-	-	-
17	Muratara	-	-	-	-
	Jumlah		8	7	21

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel Dalam Angka, 2024

- **Terminal Tipe B**

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non

pelayanan dasar bidang perhubungan sub urusan terminal, untuk terminal tipe A menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, tipe B kewenangan Pemerintah Provinsi serta terminal tipe C menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Sumatera Selatan ada 7 (tujuh) terminal tipe B baru diserahkan pada tahun 2018 yang menjadi penugasan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengelola terminal tersebut telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Terminal. Kinerja pengelolaan terminal tipe B disajikan pada tabel II.5 sebagai berikut :

Tabel II.5
Kinerja Pengelolaan Terminal Tipe B
Di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Terminal	Kinerja*)	Keterangan
1.	Terminal Jakabaring di Kota Palembang		
	a. Aset terdiri dari :		
	- Luas Tanah	8000.00 m^2	
	- Luas Bangunan	56 m^2	
	b. Jumlah penumpang		
	c. Jumlah personil	19 Orang	
2.	Terminal Petanang di Kota Lubuk Linggau		
	a. Aset terdiri dari :		
	- Luas Tanah	35.770 m^2	
	- Luas Bangunan	494 m^2	
	b. Jumlah penumpang		
	c. Jumlah personil	6 Orang	
3.	Terminal Randik di Kab. Musi Banyuasin		
	a. Aset terdiri dari :		
	- Luas Tanah	2.2 H	
	- Luas Bangunan	360 m^2	
	b. Jumlah penumpang		
	c. Jumlah personil	11 Orang	
4.	Terminal KM. 32 Indralaya		
	a. Aset terdiri dari :		
	- Luas Tanah	15.000 m^2	
	- Luas Bangunan	369 m^2	
	b. Jumlah penumpang		
	c. Jumlah personil	11 Orang	
5.	Terminal Kota Baru di Kab. OKU Timur		
	a. Aset terdiri dari :		
	- Luas Tanah	33.128 m^2	
	- Luas Bangunan	526	
	b. Jumlah penumpang		
	c. Jumlah personil	13 Orang	

No.	Nama Terminal			Kinerja*)	Keterangan
6.	Terminal Lubuk Harjo di Kab. OKU Timur				
	a.	Aset terdiri dari :			
		-	Luas Tanah	26.857 m^2	
		-	Luas Bangunan	535 m^2	
	b.	Jumlah penumpang			
	c.	Jumlah personil		16 Orang	
7.	Terminal Muara Dua di Kab. OKU Selatan				
	a.	Aset terdiri dari :			
		-	Luas Tanah	3.000 m^2	
		-	Luas Bangunan	48 m^2	
	b.	Jumlah penumpang			
	c.	Jumlah personil		9 Orang	

- **Terminal Jakabaring di Kota Palembang**

Terminal Jakabaring merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Madya yang terletak di dalam Kota Palembang pada Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dengan titik koordinat 104°46'29.75"BT dan 3°01'33.94"LS. Terletak pada ruas jalan Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.

Gambar II.2
Terminal Tipe B Jakabaring

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Jakabaring merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kota Palembang. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Jakabaring tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.6
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	17.518	17.518	188.747	125.832
2.	2021	18.359	18.356	102.364	84.968
3.	2022	17.591	17.541	98.258	98.551
4.	2023	13.330	13.330	102.897	82.816
5.	2024	21.748	13.540	104.051	107.464

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.6 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 24,45% sementara kinerja layanan penumpang juga mengalami kenaikan sebanyak 11,3%

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Jakabaring tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.7
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Palembang – Prabumulih	3
2.	Palembang – Muara Enim	1
3.	Palembang – Tanjung Enim	1
4.	Palembang – Tugu mulyo	1
5.	Palembang – pematang Panggang	1
6.	Jakabaring – Plaju	13
7.	Palembang – Sp padang	2
8.	Palembang – Selapan	4
9.	Palembang – Pampangan	1
10.	Palembang – Pangkalan Lampam	2
11.	Palembang – Sp. Padang	4
12.	Palembang – Selapan	2
13.	Palembang – Pampangan	3
14.	Palembang – Riding	3
15.	Palembang – Pangkalan Lampam	1
16.	Jakabaring – Ampera	30

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Jakabaring tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.8
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	300 m^2
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	300 m^2
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	
4.	Parkir Kendaraan	Ada	2753,34m^2
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	6,8 m^2
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	2
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Ada	1,50 m^2
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan *Customer Service*	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	503,3 m^2
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	
15.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
16.	Pusat Informasi	Ada	14,22 m^2
17.	Papan Perambuan	Ada	3 m^2
18.	Papan Pengumuman	Belum ada	
19.	Layanan Bagasi	Belum ada	
20.	Ruang Penitipan Barang	Belum ada	
21.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
22.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.9
Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Belum Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Belum Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal Petanang di Kota Lubuk Linggau**

Terminal Petanang merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kota Lubuk Linggau pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 dengan titik koordinat 102°50'28" BT dan 3°11'11" LS. Terletak pada ruas jalan Lintas Sumatera Petanang Ilir Kota Lubuk Linggau yang merupakan jalan penghubung arteri primer.

Gambar II.3
Terminal Tipe B Petanang

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Petanang merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kota Lubuk Linggau. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Petanang tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.10
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Petanang

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	2.185	2.185	33.510	22.340
2.	2021	1.512	1.490	31.209	31.657
3.	2022	1.489	1.479	30.102	31.057
4.	2023	1.692	1.597	38.720	35.697
5.	2024	660	712	14.468	17.280

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.10 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak

58,28% sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 57,33%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Petanang tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.11
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Petanang

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Jambi – Lubuk Linggau	2
2.	Pagaralam – Jambi	2
3.	Bengkulu - Jambi	1
4.	Palembang – Prabumulih – M. Enim – lahat – Pagaralam –Empat Lawang – Tebing Tinggi Lubuk Linggau	5

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Petanang tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.12
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Petanang

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	64 m^2
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	64 m^2
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	25 m^2
4.	Parkir Kendaraan	Ada	231 m^2
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Belum ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan *Customer Service*	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Belum ada	
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Belum ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Belum ada	
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Belum Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
16	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	
18.	Papan Perambuan	Belum ada	
19.	Papan Pengumuman	Belum ada	
20.	Layanan Bagasi	Belum ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Belum ada	
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.13
Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Petanang

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Belum Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Belum Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Belum Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal Randik di Kabupaten Musi Banyuasin**

Terminal Randik merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten Musi Banyuasin pada Kecamatan Sekayu dengan titik koordinat 103°51'18.46"BT dan 2°52'26.65"LS. Terletak pada ruas jalan Terminal Randik Desa Kelurahan Kayu Ara Kota Sekayu Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.

Gambar II.4
Terminal Tipe B Randik

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Randik merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten

Musi Banyuasin. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Randik tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.14
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Randik

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	1.251	1.251	16.535	11.024
2.	2021	1.194	1.181	14.491	13.300
3.	2022	1.158	1.160	13.548	13.256
4.	2023	1.236	1.240	15.914	14.575
5.	2024	858	876	9.520	9.781

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.14 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 42,79% sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 57,96%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Randik tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.15
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Randik

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Palembang - Sekayu	3

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Randik tergambar pada table berikut.

Tabel II.16
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Randik

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	1152 m^2
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	1152 m^2
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	96 m^2
4.	Parkir Kendaraan	Ada	950 m^2
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	1

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Ada	
10.	Pelayanan *Customer Service*	Ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	360 m^2
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	96 m^2
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	119 m^2
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Ada	
18.	Papan Perambuan	Ada	1
19.	Papan Pengumuman	Ada	
20.	Layanan Bagasi	Ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Ada	144 m^2
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.17
Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Randik

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Belum Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal KM. 32 Indralaya**

Terminal KM. 32 Indralaya merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Madya yang terletak di dalam Kabupaten Ogan Ilir pada Kecamatan Indralaya Utara dengan titik koordinat 104°39'13.68"BT dan 3°12'22.21" LS. Terletak pada ruas jalan Lintas Sumatera Timbangan Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan jalan penghubung arteri primer.

Gambar II.5
Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten Ogan Ilir. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya tergambar pada Table berikut.

Tabel II.18
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	993	993	22.644	15.096
2.	2021	15.238	15.237	20.316	14.558
3.	2022	14.581	14.561	19.845	19.851
4.	2023	20.154	20.167	18.541	18.454
5.	2024	20.166	20.174	19.451	19.632

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.18 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 1,04% sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 0,87%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.19
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Terminal jakabaring – Indralaya	27
2.	Terminal jakabaring - Prabumulih	5

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.20
Fasilitas Utama Terminal Tipe B KM. 32 Indralaya

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	240 m^2
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	3400 m^2
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	40 m^2
4.	Parkir Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	1 m^2
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan *Customer Service*	Ada	9 m^2
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	80 m^2
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	120 m^2
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	
15.	Ruang Pembelian Tiket Untuk Bersama	Belum Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	
18.	Papan Perambuan	Ada	2
19.	Papan Pengumuman	Ada	
20.	Layanan Bagasi	Belum ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Belum ada	
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.21
Fasilitas Penunjang Terminal dan Fasilitas Umum Tipe B KM. 32 Indralaya

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal Martapura di Kabupaten OKU Timur**

Terminal Martapura merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten OKU Timur pada Kecamatan Martapura dengan titik koordinat 104°39'13.68"BT dan 3°12'22.21"LS. Terletak pada ruas jalan Lintas Sumatera Sukomulyo Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan jalan penghubung arteri primer.

Gambar II.6
Terminal Tipe B Martapura

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Martapura merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten OKU Timur. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Martapura tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.22
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Martapura

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	8.257	8.257	92.255	61.503
2.	2021	14.829	13.840	90.635	82.155
3.	2022	14.528	14.458	91.525	78.524
4.	2023	16.661	16.661	118.865	119.593
5.	2024	9.812	9.812	79.394	83.400

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.22 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 41,10%, sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 68,26%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Martapura tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.23
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Martapura

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Palembang – Prabumulih - Muara Enim – Baturaja - Martapura	15
2.	Palembang – Prabumulih – Martapura – Muaradua	2
3.	Palembang – Prabumulih – Baturaja – Martapura	8
4.	Dst	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Kota Baru tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.24
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Martapura

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	65 m^2
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	65 m^2
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	20 m^2

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
4.	Parkir Kendaraan	Ada	100 m^2
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	1
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Ada	
10.	Pelayanan *Customer Service*	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	72 m^2
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	20 m^2
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	25 m^2
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	
18.	Papan Perambuan	Belum ada	
19.	Papan Pengumuman	Ada	1
20.	Layanan Bagasi	Belum ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Ada	9 m^2
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Ada	4 m^2
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.25
Fasilitas Penunjang Terminal dan Fasilitas Umum Tipe B Martapura

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Belum Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Belum Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Belum Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barang (Trolley) dan Tenaga Angkut	Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal Lubuk Harjo di Kabupaten OKU Timur**

Terminal Lubuk Harjo merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten OKU Timur pada Kecamatan Belitang Madang Raya dengan titik koordinat 104^{o}38’30.1”BT dan 4^{o}03’36.3”LS. Terletak pada

ruas jalan Lubuk Harjo Desa Jati Mulyo 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.

Gambar II.7
Terminal Tipe B Lubuk Harjo

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten OKU Timur. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Lubuk Harjo tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.26
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Lubuk Harjo

NO	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	422	422	5.846	4.667
2.	2021	3.097	3.096	5.631	4.445
3.	2022	2.951	2.965	5.534	4.358
4.	2023	1.692	1.597	38.720	35.697
5.	2024	1.016	1.033	5.685	5.056

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.26 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 37,70%, sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 85,56%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.27
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Angdes Gumawang – Jalur Komering	4

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.28
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Lubuk Harjo

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	40 m^2
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	135 m^2
4.	Parkir Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Belum ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Belum ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Ada	
10.	Pelayanan *Customer Service*	Ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Belum ada	
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Belum ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	48 m^2
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	
18.	Papan Perambuan	Belum ada	
19.	Papan Pengumuman	Ada	4 m^2
20.	Layanan Bagasi	Ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Ada	5 m^2
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Ada	80 m^2
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Ada	135 m^2

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.29
Fasilitas Penunjang Terminal dan Fasilitas Umum Tipe B Lubuk Harjo

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Belum Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barang (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Terminal Muara Dua di Kabupaten OKU Selatan**

Terminal Muara Dua merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten OKU Selatan pada Kecamatan Muara Dua dengan titik koordinat 104°04'14.19"BT dan 4°32'23.65"LS. Terletak pada ruas jalan Baturaja / Muara Dua, Bumi Agung Kabupaten Oku Selatan yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.

Gambar II.8
Terminal Tipe B Muara Dua

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Muara Dua merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten OKU Selatan. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Muara Dua tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.30
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2020	3.917	3.917	53.311	35.541
2.	2021	4.670	4.670	50.201	33.174
3.	2022	4.578	4.541	51.054	32.541
4.	2023	8.362	4.244	43.091	54.036
5.	2024	6.759	7.883	71.256	87.686

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Pada tabel II.30 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 13,90%, sementara kinerja layanan penumpang mengalami kenaikan sebanyak 38,89%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Muara Dua tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.31
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Palembang – Prabumulih – Martapura – Muaradua	2
2.	Palembang – Prabumulih – Baturaja – Muaradua – Danau Ranau	42

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Muara Dua tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.32
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	296 m^2
4.	Parkir Kendaraan	Ada	600 m^2

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Belum ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan *Customer Service*	Ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Belum ada	
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Belum ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	120 m^2
15.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
16.	Pusat Informasi	Ada	
17.	Papan Perambuan	Ada	
18.	Papan Pengumuman	Ada	
19.	Layanan Bagasi	Belum ada	
20.	Ruang Penitipan Barang	Ada	
21.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
22.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Tabel II.33
Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum da	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Belum Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
12.	Fasilitas Umum	Belum Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Belum Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barang (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Bus Pariwisata**

Jumlah angkutan bus pariwisata yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tidak mengalami kenaikan dari 49 unit pada tahun 2023 tetap 49 unit pada tahun 2024. Meskipun demikian, ketersediaannya masih terbatas karena dipengaruhi minimnya rute paket wisata dengan menggunakan bus dan minimnya kerjasama pemerintah dengan agen pariwisata untuk penawaran paket wisata menggunakan bus.

Tabel II.34
Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata
Di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan Bus Pariwisata	Jumlah Bus Pariwisata (Unit)
1	2020	5	49
2	2021	5	49
3	2022	3	49
4	2023	3	49
5	2024	3	49

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.1
Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata
Di Provinsi Sumatera Selatan

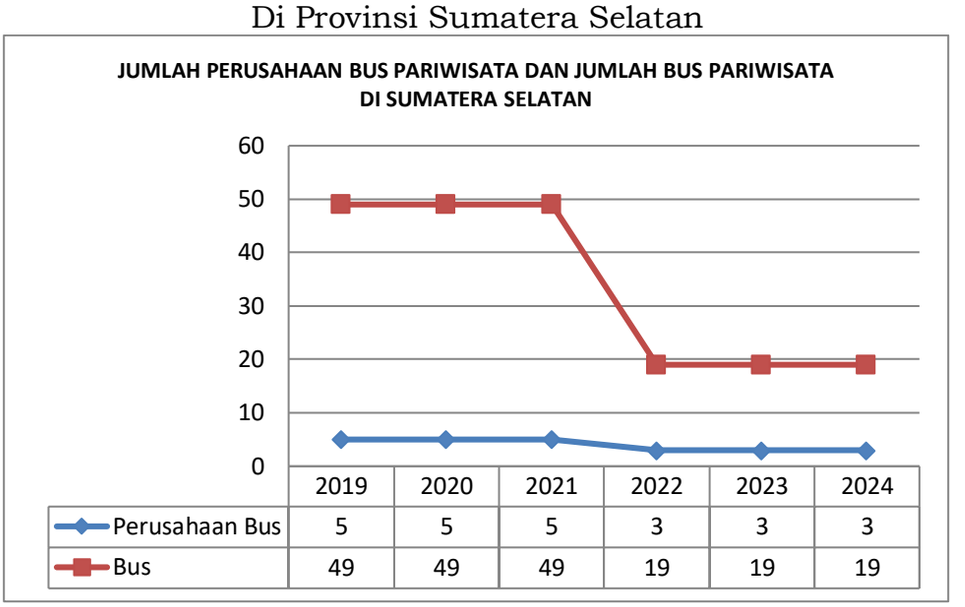

- **Bus Antar Provinsi**

Jumlah angkutan bus antar provinsi mengalami penurunan secara kuantitatif dari tahun 2021 sebanyak 241 unit bus antar provinsi dan turun menjadi 159 unit pada tahun 2024, hal ini disebabkan adanya pilihan moda transportasi udara yang masih terjangkau dengan daya beli masyarakat Sumatera Selatan sehingga load factor angkutan bus antar provinsi terus menurun dari 62% menjadi 58%. Selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sejak 2018 – 2024 harga tiket pesawat udara untuk low cost carrier menyentuh rupiah sebesar Rp. 480.000,00 dengan gap harga tiket angkutan bus antar provinsi sebesar Rp. 250.000,00 (untuk rute Palembang – Jakarta).

Tabel II.35
Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan Bus AKAP	Jumlah Bus AKAP (Unit)
1	2018	15	241
2	2019	15	241
3	2020	15	241
4	2021	15	241
5	2022	9	159
6	2023	9	159
7	2024	9	159

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.2
Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan

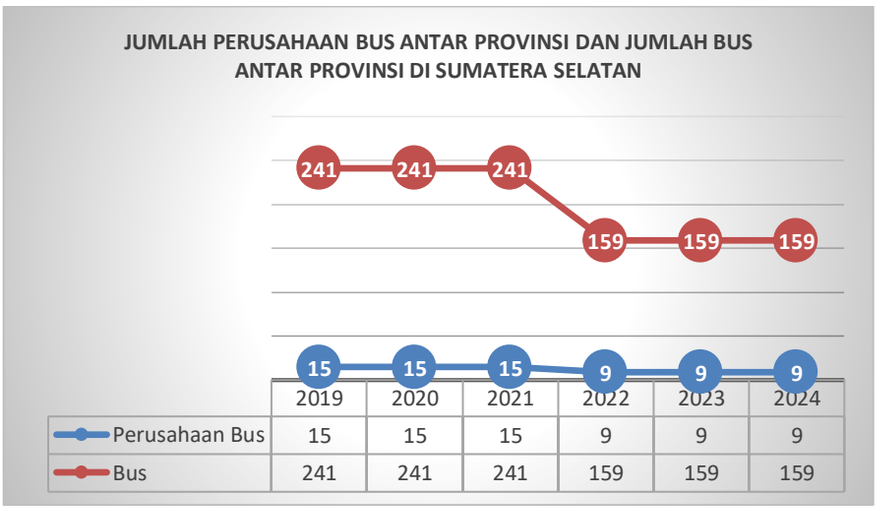

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Bus Antar Kota Dalam Provinsi**

Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota harus terkoneksi jaringan pelayanan bus antar kota dalam provinsi untuk memobilisasi angkutan orang. Saat ini trayek antar kota dalam provinsi berjumlah 25 trayek dengan total 159 unit kendaraan.

Tabel II.36
Jumlah Trayek dan Bus Antar Kota Dalam Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan	Jumlah Kendaraan
1	*2*	*3*	*4*
1	Baturaja - Palembang - Lubuk Linggau	CV. PO BHW	3
2	Muara Dua - Baturaja - Palembang - Lubuk Linggau (2)	CV. PO BHW	2

No	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan	Jumlah Kendaraan
3	Palembang - Baturaja	PT. BINTANG PAMUNGKAS SEJAHTERA	6
4	Palembang - Prabumulih - Baturaja	CV. DANILAH	2
5	Palembang - Kayu Agung - Tanjung Batu	CV. DANILAH	2
6	Palembang - Lintang PP	CV. PUTRA MARLIN	10
7	Palembang - Prabumulih	CV. DANILAH	1
		CV. PO BHW	7
8	Palembang - Prabumulih - Baturaja - Muara Dua - Ranau PP	PT. TITISAN SANG PANGERAN	14
9	Palembang - Prabumulih - Baturaja - Muara Dua	CV. PO BHW	6
10	Palembang - Prabumulih - Martapura - Muara Dua	CV. DANILAH	2
11	Palembang - Prabumulih - Muara Enim	CV. DANILAH	1
12	Palembang - Prabumulih - Pagar Alam	CV. DANILAH	2
13	Palembang-Prabumulih-Baturaja-Martapura-Belitang-Ranau PP	PO. TRAVEL 2002	21
14	Palembang-Prabumulih-Muara Enim-Baturaja-Muara Dua-Ranau PP	CV. SEJIWA JIWA BARU	5
15	Palembang-Prabumulih-Muara Enim-Lahat-Tebing Tinggi PP	CV. BAHTERA KARUNIA ILLAHI	6
16	Pematang Panggang - Kayu Agung - Palembang - Tanjung Api-Api	CV. PO BHW	3
17	Term. Alang-alang Lebar Palembang - Sekayu PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
18	Term. Jaka Baring Palembang - Indralaya PP	ORGANDA KOTA PALEMBANG	24
		PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
19	Term. Jaka Baring Palembang - Kayu Agung PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
20	Term. Jaka Baring Palembang - Prabumulih PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	5
21	Term. Jaka Baring Palembang - Tanjung Enim PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	6

No	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan	Jumlah Kendaraan
22	Term. Jaka Baring Palembang - Pematang Panggang PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
23	Term. Jaka Baring Palembang - Baturaja PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	2
24	Term. Alang-alang Lebar Palembang - Tangjung Api-Api PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	4
25	Palembang - Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Pagar Alam - Pendopo	PT. SRIWIJAYA PRATAMA EXPRESS	13
TOTAL			**159**

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

- **Kecelakaan Transportasi Darat**

Kinerja angka kecelakaan transportasi darat di Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukan kinerja dengan kecenderungan yang semakin tinggi dengan nilai angka kejadian kecelakaan semakin meningkat (trend meningkat 10,26%) dimana pada tahun 2019 sebanyak 1.648 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban 704 meninggal dunia, 545 mengalami luka berat serta 1.494 mengalami luka ringan dan total kerugian material akibat kecelakaan di perkirakan mencapai Rp. 72.424.140.000. Sementara pada tahun 2024 sebanyak 2.577 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban 770 meninggal dunia, 993 mengalami luka berat serta 2.802 mengalami luka ringan dan total kerugian material akibat kecelakaan di perkirakan mencapai Rp. 115.182.000.000.

Tabel II.37
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kecelakaan	1.158	1.540	1.943	2.337	2.577
Korban (Org) :	2.096	2.036	3.227	3.972	4.565
Meninggal Dunia	521	712	717	868	770
Luka Berat	330	362	641	753	993
Luka Ringan	1.245	1.417	1.869	2.351	2.802
Kerugian Materil (Rp. juta)	4.718	6.979	10.385	10.148	115.182

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.3
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024

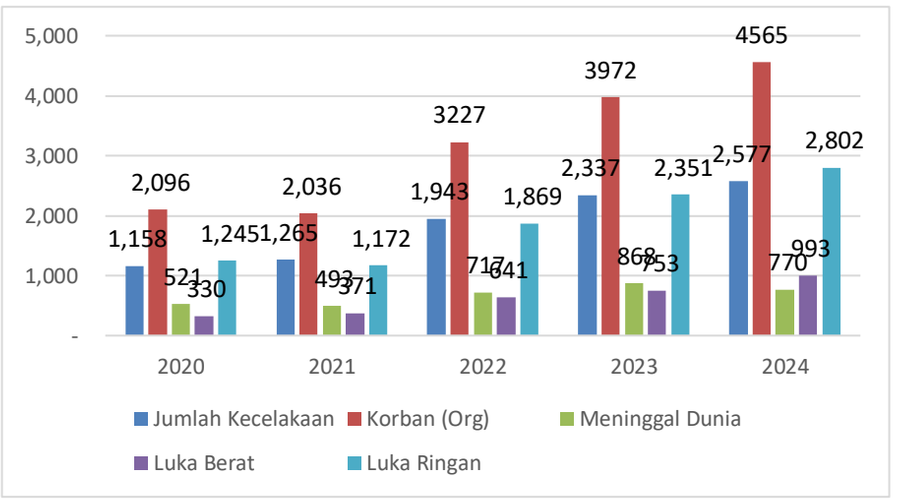

Tabel II.38
Data Kecelakaan Lalu Lintas Per Kabupaten / Kota
Tahun 2020 – 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	2020		2021		2022		2023		2024	
		Laka Lantas	MD	Laka Lantas	MD	Laka Lantas	MD	Laka Lantas	MD	Laka Lantas	MD
1.	Ogan Komering Ulu	45	33	42	31	47	31	56	35	89	30
2.	Ogan Komering Ilir	59	43	111	67	112	69	107	42	198	79
3.	Muara Enim	90	57	142	80	144	80	125	88	194	69
4.	Lahat	48	36	82	51	84	51	120	59	97	38
5.	Musi Rawas	48	32	64	38	65	38	79	35	96	43
6.	Musi Banyuasin	84	66	125	100	127	100	135	54	176	95
7.	Banyuasin	120	44	155	69	157	69	125	84	222	97
8.	OKU Selatan	18	14	21	17	25	17	65	35	33	18
9.	OKU Timur	35	17	49	37	50	37	55	40	154	57
10.	Ogan Ilir	68	35	133	54	233	54	268	125	176	70
11.	Empat Lawang	25	15	15	9	2	9	25	12	19	14
12.	PALI	19	11	14	11	14	11	25	4	31	8
13.	Musi Rawas Utara	25	19	23	14	68	14	48	24	58	28
14.	Palembang	478	47	443	89	645	94	821	147	846	84
15.	Prabumulih	18	14	21	15	46	15	70	15	56	9
16.	Pagar Alam	13	9	22	8	22	8	12	5	21	8
17.	Lubuk Linggau	52	29	78	22	102	22	201	65	111	23
	TOTAL	1.245	521	1.540	712	1.943	717	2.337	868	2.577	770

- **Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi**

Dengan kinerja angka kecelakaan transportasi darat yang semakin membaik (trend menurun sebesar 18,91%) tidak terlepas dari adanya pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan baik di Jalan Nasional oleh Kementerian Perhubungan, Jalan Provinsi oleh Dinas Perhubungan Provinsi serta Jalan Kabupaten/Kota oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Sepanjang 1.513,66 KM jalan provinsi, kinerja pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan disajikan oleh tabel berikut :

Tabel II.39
Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rambu-Rambu		848	1,168	69	0	0
	- APBD	Buah	649	0	27	0	0
	- APBN	Buah	199	1,168	42	0	0
2	RPPJ		0	0	23	25	12
	- APBD	Buah	0	0	23	25	12
	- APBN	Buah	0	0	0	0	0
3	Marka Jalan		107,038	178,451	130,253	14,107	0
	- APBD	M'	84,35	30,276	3,725	14,107	0
	- APBN	M'	22,688	148,175	126,528	0	0
4	Warning Light		26	38	6	0	0
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	26	38	6	0	0
5	Traffic Light		2	8	0	0	0
	- APBD	Buah	1	0	0	0	0
	- APBN	Buah	1	8	0	0	0
6	Pagar Pengaman		0	3,164	756	0	0
	- APBD	M'	0	0	0	0	0
	- APBN	M'	0	3,164	756	0	0
7	Cermin Tikungan		0	0	0	0	0
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	0	0	0	0	0
8	Deliniator		1566	4,792	372	0	0
	- APBD	Buah	811	0	72	0	0
	- APBN	Buah	755	4,792	300	0	0
9	Paku Jalan		0	9,297	1200	0	0
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	0	9,297	1,2	0	0
10	LPJU		31	91	60	0	22
	- APBD	Buah	26	0	0	0	22
	- APBN	Buah	5	91	60	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir jenis fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan telah terpasang sebanyak 2.085 unit rambu lalu lintas, 60 unit RPPJ, 429,85 m' marka jalan, 70 unit warning light, 10 unit traffic light, 759,16 m' pagar pengaman jalan, 1.942,79 unit delineator, 1.209,30 unit paku marka, 204 unit LPJU /PJUTS.

Grafik II.4
Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

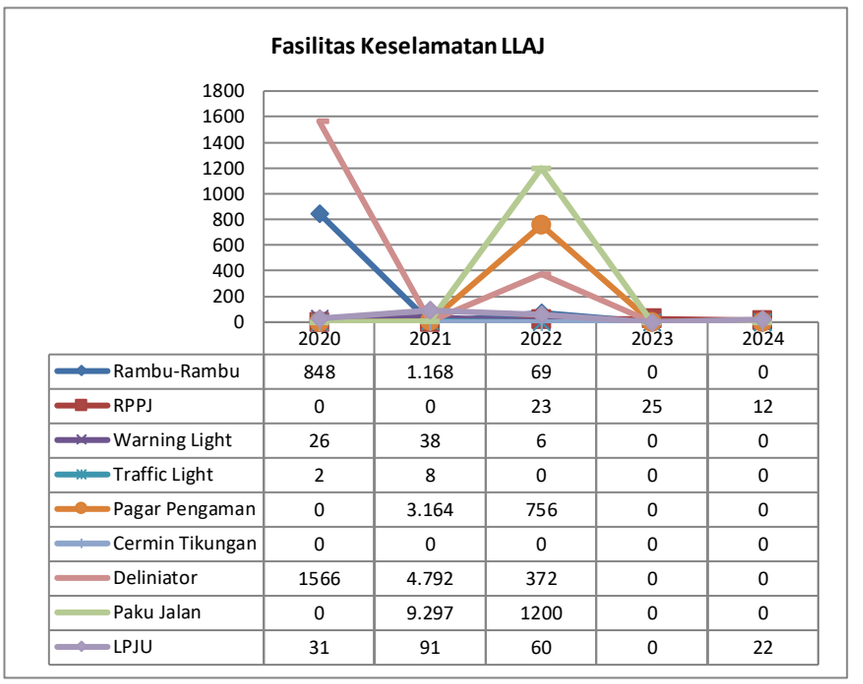

	2020	2021	2022	2023	2024
Rambu-Rambu	848	1.168	69	0	0
RPPJ	0	0	23	25	12
Warning Light	26	38	6	0	0
Traffic Light	2	8	0	0	0
Pagar Pengaman	0	3.164	756	0	0
Cermin Tikungan	0	0	0	0	0
Deliniator	1566	4.792	372	0	0
Paku Jalan	0	9.297	1200	0	0
LPJU	31	91	60	0	22

2.1.3.1.2 Transportasi Perkeretaapian

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.UKO.104/IV/4/KA-2016 tentang Penghapusan Struktur Organisasi Divisi Regional III Sumatera Selatan, SUB Divisi Regional III.1 Kertapati dan SUB Divisi III.2 Tanjung Karang, maka untuk optimalisasi operasional kereta api dan menjalankan proses bisnis PT. KAI (Persero) di wilayah Palembang, dibentuklah organisasi Divisi Regional III Palembang berdasarkan Peraturan Direksi PT. KAI (Persero) Nomor KEP.U/KO.104/IV/5/KA-2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Divisi Regional III Palembang.

Divisi Regional III Palembang adalah satuan organisasi yang berada di bawah Direktur Utama dan

berkedudukan di Palembang. Batas wilayah Divisi Regional Palembang dengan Divisi Regional IV Tanjung Karang terletak pada kilometer 318+200 petak jalan antara Stasiun Prabumulih X5 – Stasiun Tanjung Rambang, berada di Desa Tanjung Raman, Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Wilayah operasional Divisi Regional III Palembang meliputi Stasiun Kertapati sampai dengan Stasiun Lubuk Linggau yang berjarak 485,150 meter sepur dengan jumlah 34 stasiun dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Stasiun Besar A : 2 Stasiun
2. Stasiun Besar C : 6 Stasiun
3. Stasiun Kelas 1 : 1 Stasiun
4. Stasiun Kelas 2 : 20 Stasiun
5. Stasiun Kelas 3 : 5 Stasiun

Divisi Regional III Palembang dipimpin oleh Kepala Divisi Regional dan Deputi Kepala Divisi Regional yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kantor Pusat Bandung. Divisi Regional III Palembang memiliki bisnis utama sebagai penyedia jasa transportasi perkeretaapian (barang dan penumpang) dan pengelolaan asset, dengan produk sebagai berikut :

1. Kereta Api Penumpang yang terdiri dari beberapa Kereta Api, diantaranya Kereta Api *Publik Service Obligation* (PSO) Serelo (Kertapati – Lubuk Linggau), Kereta Api *Publik Service Obligation* (PSO) Raja Basa (Kertapati – Tanjungkarang), Kereta Api Komersil Sindang Marga (Kertapati – Lubuk Linggau);
2. Kereta Api Barang yang terdiri dari Kereta Api Barapati, Baracinta, Barasari, Baralawai, Baramerapi, Pulp, BBM;
3. Pengeloaan asset railways dan non railways

Kereta Api Penumpang tidak berhenti disetiap stasiun, hanya stasiun keberangkatan dan pemberhentian saja yaitu Stasiun Kertapati,

Payakabung, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi dan Lubuk Linggau. Saat ini Kereta Api yang beroperasi adalah Kereta Api Serelo dan Kereta Api Raja Basa sesuai dengan arahan dari kantor Pusat PT. KAI.

Angkutan penumpang khususnya di wilayah Divisi Regional III Palembang sempat mengalami peningkatan dari tahun 2016 – 2019, namun sejak adanya pandemi Covid – 19 tahun 2020 dan beberapa kereta api dibatalkan, jumlah penumpang mengalami penurunan drastis. Sementara untuk Kereta Api Barang di Divisi Regional III Palembang saat ini memiliki 15 mitra kerja yaitu :

1. PT. Bukit Asam (PT. BA)
2. PT. Bara Alam Utama (PT. BAU)
3. PT. Budi Gema Gempita (PT. BGG)
4. PT. Bara Manunggal Sakti (PT. BMS)
5. PT. Baramulti Sugih Sentosa (PT. BMSS)
6. PT. Dizamatra Powerindo (PT. DP)
7. PT. Golden Great Borneo (PT. GGB)
8. PT. Gumay Prima Energi (PT. GPE)
9. PT. Mustika Indah Permai (PT. MIP)
10. PT. Manambang Muara Enim (PT. MME)
11. PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (PT. SMS)
12. PT. Truba Bara Banyu Enim (PT. TBBE)
13. PT. Pertamina
14. PT. Semen Baturaja
15. PT. Tanjung Enim Lestari (PT. TEL)

Angkutan barang dengan kereta api di wilayah Divisi Regional III Palembang di dominasi oleh angkutan batubara (Babaranjang), trend volume angkutan kereta api barang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan saat ini, jalur ganda telah beroperasi di wilayah Divisi Regional III Palembang dari Kertapati – Prabumulih – Muara Enim – Tanjung Enim Baru, X6 – X5 – batas Divisi Regional III dan Divisi Regional IV sepanjang 329.350 meter sepur. Sedangkan untuk wilayah Prabumulih – X5, Muara Enim – Lubuk

Linggau masih jalur tunggal dengan panjang 155.800 meter sepur.

Jumlah penumpang kereta api di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 1.036.166 penumpang (103%), pada tahun 2023 jumlah penumpang sebesar 765.764 (76%), pada tahun 2022 jumlah penumpang sebesar 661.626 (66%) dan pada tahun 2021 jumlah penumpang sebesar 184.709 (18%). Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan jumlah penumpang karena adanya pandemic Covid-19 sedangkan pada tahun 2022 jumlah penumpang mengalami peningkatan kembali seiring dengan perubahan dari status *pandemic* Covid-19 menjadi *endemic*.

Jumlah angkutan barang Sumatera Selatan pada tahun 2020 jumlah barang sebesar 14.856.396 ton, pada tahun 2021 jumlah barang sebesar 18.678.576 ton, pada tahun 2022 jumlah barang sebesar 22.574.537 ton, pada tahun 2023 jumlah barang sebesar 26.029.055 ton dan tahun 2024 sebesar 29.218.814 ton. Untuk angkutan barang terjadi peningkatan jumlah barang setiap tahunnya.

Kereta Api dari Stasiun Kertapati ke Stasiun Lubuk Linggau tidak terisi penuh. Untuk Kereta Api Sindang Marga I (kelas eksekutif dan bisnis) hanya 65,7% saja yang terisi oleh penumpang, sebagiannya lagi tidak ada penumpang. Sedangkan untuk Kereta Api Serelo I (kelas ekonomi) hanya 81,56% yang terisi, begitu juga untuk Kereta Api dari Stasiun Lubuk Linggau ke Stasiun Kertapati. Kereta Api Sindang Marga II yang melayani kelas eksekutif dan bisnis terisi penumpang sebesar 75,4%. Kereta Api Serelo II yang melayani kelas ekonomi hanya terisi sebagiannya saja (48,76%). Ini mungkin disebabkan dengan waktu keberangkatan yang tidak sesuai dengan keinginan penumpang dan kebanyakan penumpang lebih memilih moda lain (travel) dibandingkan Kereta Api.

Kereta Api yang berasal dari Stasiun Kertapati dengan tujuan Stasiun Tanjung Karang juga tidak berbeda jauh dengan kereta yang lainnya. 73,2% Kereta Api Sriwijaya I (kelas eksekutif dan bisnis) yang terisi oleh penumpang. Sedangkan untuk kereta api kelas ekonomi yaitu Kereta Api Raja Basa I lebih penuh yaitu sebesar 92,1% yang terisi penumpang. Sebaliknya untuk Kereta Api yang berasal dari Stasiun Tanjung Karang tujuan Stasiun Kertapati hampir terisi penuh malah sampai melebihi kapasitas tempat duduk yang ada. Untuk Kereta Api Sriwijaya II (kelas eksekutif dan bisnis) 94,7% terisi penumpang. Sedangkan untuk Kereta Api Raja Basa II (kelas ekonomi) melebihi kapsitas yang ada yaitu sebesar 103,04%. Hal ini terlihat bahwa banyaknya aktivitas yang dilakukan di wilayah Palembang sehingga penumpang untuk tujuan ke Palembang lebih banyak dibandingkan tujuan ke Tanjung Karang.

Angkutan Kereta Api barang dari Lubuk Linggau sudah tutup, yang ada hanya kereta api angkutan BBM. Angkutan yang masih primadona kereta api masih batubara (kereta api babaranjang). Dalam satu hari terdapat 10 kereta api barang dengan berbagai jenis komoditi yang dibawanya beroperasi. Kereta Api barang yang berasal dari Tanjung Enim sebanyak 7 buah kereta, dengan jenis komoditi yang diangkut adalah batubara. Kereta Api yang mengangkut batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan (Lampung Selatan) adalah Kereta Api B.12, B.13, B.15, B.17, B.19 dan B.21. Sedangkan Kereta Api K.12 adalah kereta api barang batubara dengan tujuan ke Stasiun Kertapati Palembang.

Berat total batubara yang diangkut dari Tanjung Enim ke Tarahan (Lampung Selatan) per harinya adalah 12.700 ton dengan 6 buah kereta api barang. Sedangkan berat yang diangkut dari Tanjung Enim ke Stasiun Kertapati Palembang adalah 1050 ton. Selain

batubara, kereta api barang juga mengangkut jenis komoditi yang lain yaitu BBM dan Pulp. Kereta Api angkutan barang yang membawa jenis komoditi BBM yaitu Kereta Api 2725 dan Kereta Api 2723. Kereta Api 2725 membawa BBM dari Stasiun Kertapati Palembang menuju Stasiun Baturaja OKU dengan berat total 434,2 ton. Kereta Api 2723 membawa BBM dari Stasiun Kertapati Palembang menuju Stasiun Baturaja OKU dengan berat total 573,5 ton. Satu kereta api barang yaitu Kereta Api 2727 membawa jenis komoditi pulp dengan berat 700 ton yang berasal dari Stasiun Niruh Prabumulih menuju Stasiun Tarahan Lampung Selatan.

Untuk pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Di Sumatera Selatan jalur kereta pai yang dimiliki adalah untuk rute Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuk Linggau. Dari 675 km jalan kereta api yang ada di Sumatera Bagia Selatan sebagian besar (89%) merupakan single track dan sisanya sepanjang 75 km merupakan jalur double track. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

Tabel II.40
Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel

No	Lintasan	Panjang (Km)	Beban Gandar (Ton)
1	Kertapati-Prabumulih	77,8	13
2	Prabumulih-Baturaja	96	13
3	Baturaja-Martapura	32	18
4	Martapura-Kota Bumi	98	18
5	Kota Bumi-Tanjung Karang	86	18
6	Prabumulih-Tanjung Karang	74	13
7	Muara Enim-Lahat	38,3	13
8	Lahat-Tebing Tinggi	66	13
9	Tebing Tinggi-Lubuk Linggau	49	13
10	Lintasan Lainnya	58,85	13
	Total	**675,95**	

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Gambar II.9
Peta Jalur Kereta Api Sumatera Selatan

Kondisi perkeretaapian Sumatera Selatan, proyek partial double track KA Sumsel sampai akhir tahun 2014 telah berhasil dibangun 52,69 km. Selanjutnya untuk tahun 2015-2016 sedang dikerjakan penambahan partial double track 76,35 km, masing-masing untuk ruas Sta. Lebak Sta. Simpang 40 km dan Martapura-Baturaja 36,35 km. Diperkirakan awal 2018, Partial Double Track di wilayah Sumatera Selatan sudah mencapai 129 km lebih. Pembangunan jalan KA di Sumsel selain diprioritaskan untuk angkutan barang, khususnya Batubara, Klingkers, dan BBM juga mulai diprioritaskan.

Tabel II.41
Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	BARANG (TON)	14.934.008	18.678.576	22.574.537	26.029.055	29.218.814
2	PENUMPANG KERETA API (ORANG)	302.896	184.709	661.626	765.764	1.036.166
3	PENUMPANG LRT (ORANG)	1.053.637	1.599.133	3.156.280	4.082.719	4.130.911

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.5
Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024

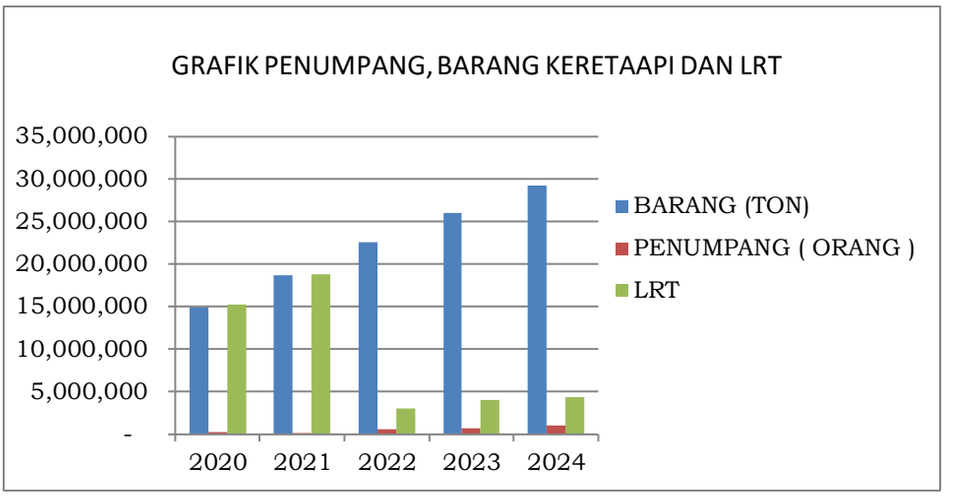

Perhitungan jarak rel kereta api dimulai dari stasiun Panjang, Lampung (KM 0) yang telah ditutup sejak beroperasinya Pelabuhan Bakauheni yang menghentikan hegemoni pelayanan kapal penumpang dari Pelabuhan Panjang yang terintegrasi dengan jalur kereta api melalui stasiun Panjang. Dari pelabuhan tersebut, ruas jalur kereta api berakhir di Stasiun Prabumulih (Sumatera Selatan) km 332 + 705. Setelah itu, jalur kereta api di Stasiun Prabumulih bercabang dua ke barat dan timur.

Ke arah barat, jalur kereta berakhir di Lubuklinggau (Sumatera Selatan) di Km 549 + 448, sedangkan ke arah timur kereta berakhir di Kertapati (Palembang, Sumatera Selatan) di Km 400 + 102. Karena wilayah Divre III ini cukup luas dibandingkan kedua divre lain di Sumatera Selatan dan meliputi dua provinsi (Sumatera Selatan dan Lampung), maka dibagilah dua wilayah (subdivre) dengan fungsi operasional yang serupa dengan Daop KAI di Pulau Jawa, namun dengan tingkatan administratif dalam lingkup KAI yang lebih rendah daripada Divre maupun Daop. Divre III memiliki dua subdivre yaitu Sub Divre III. 1 Kertapati (KPT) dan Sub Divre III. 2 Tanjungkarang (TNK).

- **Light Rail Transit (LRT)**

Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan merupakan salah satu angkutan massal yang ada di Kota Palembang dan menjadi LRT Pertama yang ada di Indonesia. Manfaat dari LRT bagi Kota Palembang adalah peningkatan mutu pelayanan trasnportasi perkotaan Palembang melalui percepatan waktu tempuh, mengurai kemacetan, serta peningkatan keselamatan transportasi; mensukseskan pergelaran ASIAN Games 2018; gambaran peningkatan kelas dan wajah Kota Palembang; moda transportasi ramah lingkungan; dan menjadi potensi ekonomi untuk menarik kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Dalam hal ketersediaan stasiun, LRT Kota Palembang dengan jalurnya sepanjang 23,4 km terdapat 13 stasiun, yakni stasiun Bandara SMB II, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang Lebar Daun, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan DJKA. Untuk Tarifnya, dapat dikatakan relatif murah dan cukup terjangkau, di mana untuk jarak jauh (dari Bandara SMB II ke Jakabaring) dikenakan sebesar Rp. 10.000,- , sedangkan untuk jarak dekat dikenakan sebesar Rp. 5.000,-. Sejak diremikan oleh Presiden RI pada tanggal 15 Juli 2018 dan mulai operasional pada tanggal 23 Juli 2018, di mana pengoperasional LRT dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia.

Tabel II.42
Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan

NO.	BULAN	PENUMPANG				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	313.502	102.919	193.990	316.521	323.935
2	Februari	243.181	91.648	146.524	261.581	295.087
3	Maret	160.475	117.297	195.847	279.622	289.600
4	April	14.759	112.398	166.525	361.765	423.579
5	Mei	12.586	147.850	352.840	336.260	353.112
6	Juni	21.924	159.542	260.725	355.364	337.977
7	Juli	31.470	102.550	286.984	370.468	376.200
8	Agustus	48.483	89.951	254.043	345.598	377.504
9	September	39.673	125.082	268.444	351.428	361.877

NO.	BULAN	PENUMPANG				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Oktober	46.806	178.417	310.179	344.388	388.746
11	November	52.462	173.679	310.179	342.228	384.692
12	Desember	68.171	197.598	410.000	417.496	218.602
	TOTAL	1.053.492	1.598.931	3.156.280	4.082.702	4.130.911

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Jumlah penumpang LRT Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 3.156.280 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 4.082.702 penumpang, pada tahun 2024 jumlah penumpang mengalami kenaikan sebesar 4.130.911 hal ini menunjukkan kenaikan setiap tahunnya.

Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam menjaga keberlangsungan Operasional LRT bagi peningkatan pelayanan angkutan umum berbasis massa ke masyarakat yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau dilakukan dengan strategi pengembangan LRT Sumatera Selatan dengan mengupayakan agar masyarakat kota Palembang mau beralih ke moda transportasi massal berbasis rel serta mengurangi beban subsidi APBN antara lain sebagai berikut :

1. Pengintegrasian layanan LRT dengan Damri dan *Bus Rapid Transit* (Trans Musi) dan angkutan Sungai (intermoda) menjadi satu jaringan layanan transportasi terpadu dimana LRT sebagai jaringan *backbone*nya yang akan di *supply* jaringan Transmusi dan Damri dari dan ke stasiun LRT melalui pengembangan integrasi moda *feeder* LRT.
2. Integrasi tiket LRT dengan Bus Damri dari Stasiun DJKA menuju Kampus UNSRI Indralaya dengan biaya Rp. 7.000,00
3. Mengembangkan *Transit Oriented Development* (TOD) di beberapa stasiun LRT untuk menaikan kinerja performance pendapatan operator dan meningkatkan *load factor* penumpang.
4. Pengembangan lokasi *park and ride* di beberapa stasiun LRT.

5. Menciptakan kebijakan agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum massal antara lain kebijakan pengaturan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.
6. Meningkatkan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat melalui media massa, penyebaran dan pecetakan spanduk, pamplet, leaflet untuk menggunakan fasilitas LRT dan angkutan umum.
7. Membuat Surat edaran atau peraturan gubenur untuk ASN satu hari dalam satu minggu untuk menggunakan angkutan umum.
8. Sejak tanggal 9 Januari 2019 telah terbentuk Balai Pengelola Kerata Api Ringan Sumatera Selatan. dibawah Kemenhub untuk pengelolaan sarana/aset LRT sehingga memberikan hasil seperti Advertising, Transit Joint Development dan rencana TOD untuk mengurangi subsidi operasional kedepan, di mana sata ini operasional dilakukan oleh PT. KAI.

Terkait dengan penganggaran, maka anggaran subsidi masih melalui APBN karena aset masih tercatat di Pemerintah Pusat, sehingga strategi penganggaran operasional LRT, yakni perlu adanya subsidi karena masih perintis (UU 23 tahun 2007) dan Hak pengusahaan prasarana LRT melalui pengembangan TOD sebagai pendapatan non fare box diluar tiket penumpang seperti pendapatan advertising.

2.1.3.1.3 Transportasi Sungai

Salah satu dari sembilan sungai terbesar yang ada di Sumatera Selatan adalah Sungai Musi. Sungai Musi berada di tengah-tengah Kota Palembang, sungai tersebut banyak dimanfaatkan untukm pengangkutan atau transportasi. Selain mengangkut orang, angkutan sungai digunakan untuk membawa hasil bumi, terutama kelapa sawit dan CPO yang banyak terdapat disekitar aliran sungai.

Angkutan sungai di dalam Kota Palembang diwarnai dengan keberadaan kapal-kapal barang dan penumpang yang melakukan aktivitas disepanjang Sungai Musi. Mobilitas tersebut dimungkinkan walaupun sudah ada Jembatan Ampera, Musi II, Musi IV dan Musi VI karena kebutuhan masyarakat yang berbeda – beda.

Tabel II.43
Trayek Angkutan Sungai dan Danau Antar Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	RUTE / LINTASAN
Zona A - Timur Laut			
1	TL-01	Palembang - Jalur 20 Muara Padang	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Desa Tanjung Baru Muara Padang - Margo Mulyo Desa Muara Padang - Jalur 20 Desa Purwodadi Kec. Muara Padang (Banyuasin)
2	TL-02	Palembang - Jalur 13 Muara Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Dermaga Cinta Salek Damarwulan, Karang Anyar - Pantai Gigi Macan Air Solok Batu - Desa Juru Taro Kec. Muara Sugihan - Jalur 13 Muara Sugihan - Jalur 13 Desa Gilirang Kec. Muara Sugihan (Banyuasin)
3	TL-03	Palembang -Jalur 23 Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Taman Nusa Indah Karang Anyar - Dermaga Cinta Salek Damarwulan, Karang Anyar - Tongkrongan Boyo Sugih Waras / Jalur 19 - Jembatan Muara Sugihan & Air Sugihan - Makam Sayid Syarif Sulaiman- Pos Lama Betet Mekar Jaya - Tirta Mulya/PT SAML Divisi 2 - Jalur 25 Tepung Sari - Jalur 25 Desa Suka Mulya Kec Air Sugihan (OKI)
4	TL-04	Palembang -Jalur 25 Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Taman Nusa Indah Karang Anyar - Dermaga Cinta Salek Damarwulan, Karang Anyar - Tongkrongan Boyo Sugih Waras / Jalur 19 - Jembatan Muara Sugihan & Air Sugihan - Makam Sayid Syarif Sulaiman - Pos Lama Betet Mekar Jaya - Jalur 25 Marga Tani - Jalur 25 Desa Bandar Jaya Kec. Air Sugihan (OKI)

5	TL-05	Palembang - Jalur 27 Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Taman Nusa Indah Karang Anyar - Dermaga Cinta Salek Damarwulan, Karang Anyar - Pantai Gigi Macan Air Solok Batu - Simpang Parit 4 Air Solok Batu - Jalur 16 Sugih Waras Muara Sugihan - Makam Sayid Syarif Sulaiman - Jalur 27 Nusantara - Jalur 27 Desa Kertamukti - Jalur 27 Desa Nusakarta Kec. Air Sugihan (OKI)
6	TL-06	Palembang - Jalur 29 Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Taman Nusa Indah Karang Anyar - Dermaga Cinta Salek Damarwulan, Karang Anyar - Tongkrongan Boyo Sugih Waras / Jalur 19 - Jembatan Muara Sugihan & Air Sugihan - Jalur 29 Desa Simpang Heran Kec. Air Sugihan (OKI)
7	TL-07	Palembang -Jalur 31 Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Jembatan Muara Padang & Muara Sugihan - Jalur 18 Suaka Margasatwa/Pusat Pelatihan Gajah Desa Sidomulyo Muara Padang - Pos Airud Sei Baung - Jalur 31 Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan (OKI)
8	TL-08	Palembang - Sungai Baung Air Sugihan	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Jembatan Muara Padang & Muara Sugihan - Jalur 18 Suaka Margasatwa/Pusat Pelatihan Gajah Desa Sidomulyo Muara Padang - Pos Airud Sei Baung - Sungai Baung Desa Sungai Batang Kec. Air Sugihan (OKI)
9	TL-09	Palembang -Jalur 6 Air Salek	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Saleh Makmur/Air Saleh - Jalur 6 Desa Saleh Jaya - Jalur 6 Desa Damar Wulan Kec. Air Salek (Banyuasin)
10	TL-10	Palembang - Jalur 8 Air Salek	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Jalur 10 Air Salek - Simpang Muara Padang - Taman Nusa Indah Karang Anyar - Jalur 8 Air Salek Desa Bintaran Kec. Muara Padang (Banyuasin)
11	TL-11	Palembang -Jalur 10 Air Salek	16 Ilir (Palembang) - Simpang Air Kumbang - Simpang Upang - Jalur 10 Air Salek (Banyuasin)
Zona B - Barat Laut			
12	BL-01	Palembang - Sumber Marga Telang	16 Ilir (Palembang) - Upang Marga / Dermaga Penyeberangan Muara Telang - Dermaga Penyeberangan Muara Telang - Pulau Gundul - TPU Tanjung - Muara Telang - Simpang Pulau Sudimara - Pos

			Garuda Jalur 5 - Desa Terusan Tengah - Muara Telang Marga Kec. Sumber Marga Telang (Banyuasin)
13	BL-02	Palembang Jalur 8 Telang	16 Ilir (Palembang) - Upang Marga / Dermaga Penyeberangan Muara Telang - Simpang Jalur 8 Telang - Jalur 8 Telang Jembatan 1 Upang Ceria Kec Makarti Jaya (Banyuasin)
14	BL-03	Palembang - Muara Telang	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Simpang Jalur 10 Muara Telang - Mukti Jaya Kec Muara Telang (Banyuasin)
15	BL-04	Palembang - Makarti Jaya	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Upang Makmur - Muara Makarti Jaya Timur - Makarti Jaya Kec Makarti Jaya (Banyuasin)
16	BL-05	Palembang - Sei Semut	16 Ilir (Palembang) - Simpang Upang Jaya/Upang Marga - Upang Makmur - Bagan Sedi/Pulau Anyar - Simpang Sei Semut - Sei Semut Kec. Simpang Hilir (Banyuasin)
Zona C - Upang (Banyuasin)			
16	UP-01	Palembang - Upang Marga	16 Ilir (Palembang) - Upang Marga (Banyuasin)
17	UP-02	Palembang - Upang Makmur	16 Ilir (Palembang) - Upang Makmur (Banyuasin)
18	UP-03	Palembang - Simpang 3 Air Kumbang	16 Ilir (Palembang) - Simpang 3 Air Kumbang (Banyuasin)
Zona D - Hulu (Muara Enim, Pali, Banyuasin)			
19	HU-01	Palembang - Tanjung Baru	16 Ilir (Palembang) - Tanjung Baru (Muara Enim)
20	HU-02	Palembang - Gedung Buruk (Patra Tani - Muara Belido)	16 Ilir (Palembang) - Gedung Buruk / Patra Tani dan Muara Belido (Muara Enim)
21	HU-03	Palembang - Harapan Mulia	16 Ilir (Palembang) - Harapan Mulia (Muara Enim)
22	HU-04	Palembang - Rantau Harapan	16 Ilir (Palembang) - Rantau Harapan (Banyuasin)

23	HU-05	Palembang - Sementul	16 Ilir (Palembang) - Sementul (Banyuasin)
Zona E - Cabang (Muba, Banyuasin, Muara Enim, PALI)			
24	CA-01	Simpang PU - Karang Agung P6	Simpang PU (Banyuasin) - Karang Agung P6 (Musi Banyuasin)
25	CA-02	Simpang PU - Lalan P13	Simpang PU (Banyuasin) - Lalan P13 (Musi Banyuasin)
26	CA-03	Simpang PU - Lalan P11	Simpang PU (Banyuasin) - Lalan P11 (Musi Banyuasin)
27	CA-04	Simpang PU - Muara Primer Lalan	Simpang PU (Banyuasin) - Muara Primer Lalan (Musi Banyuasin)
28	CA-05	Sungai Rotan Muara Lematang - Perambatan	Sungai Rotan Muara Lematang (Muara Enim) - Perambatan (PALI)
29	CA-06	Sungai Rotan Muara Lematang - Rantau Bayur	Sungai Rotan Muara Lematang (Muara Enim) - Rantau Bayur (Banyuasin)

Sumber : Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 157/KPTS/DISHUB/2025 tentang Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau antar kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang juga dapat dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke alur sungai terdapat 8 kabupaten, 62 ke camatan, dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 persen dari 3.079 desa di Sumatera Selatan.

Tabel II.44
Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Banyuasin	Banyuasin	Tanjung Lago	1	4
2	Batanghari	Musi Banyuasin	Batanghari Leko	1	10
3	Calik	Banyuasin	Pulau Rimau	1	10
4	Kelingi	Musi Rawas	Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi, Muara Lakitan	3	5
5	Komering	OKI	Kota Kayu Agung, Sirah Pulau Padang,	4	29

			Jejawi, Lempuing Jaya		
		OKU Timur	Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Cempaka, Madang, Suku II, Semendawai Barat	5	11
6	Lalan	Musi Banyuasin	Bayung Lencir, Lalan	2	16
7	Lematang	Muara Enim	Rambang Dangku, Sungai Rotan, Muara Belida	3	23
		PALI	Penukal, Penukal Utara	2	6
8	Dawas	Banyuasin	Tungkal Ilir	1	2
		Musi Banyuasin	Sungai Lilin, Sanga Desa	2	3
9	Lumpur	OKI	Cengal, Pampangan, Tulung Selapan	3	23
10	Pedada	OKI	Tulung Selapan	1	1
11	Jeruju	OKI	Cengal	1	1
12	Menang	OKI	Sungai Menang	1	4
13	Mesuji	OKI	Pedamaran Timur, Sungai Menang, Cengal	3	9
14	Musi	Banyuasin	Banyuasin I, Rantau Bayur	2	24
		PALI	Abab	1	1
		Musi Banyuasin	Sanga Desa	1	3
		Palembang	Gandus, Ilir Timur II, Kertapati, Seberang Ulu I	4	10
15	Ogan	Ogan Ilir	Lubuk keliat, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Tanjung Raja	12	65
16	Rawas	Musi Rawas	Karang Dapo, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, Ulu Rawas	5	34
17	Saleh	Banyuasin	Air Saleh, Rambutan, Muara Sugihan	3	30
18	Sugihan	Banyuasin	Muara Sugihan	1	18
19	Telang	Banyuasin	Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang	3	27
	Total			**62**	**355**

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2017 dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar yaitu 87 persen,dermaga-dermaga sungai tersebut dalam kondisi baik, 3 persen dalam kondisi rusak dan sisanya 10 persen tidak diketahui kondisinya.

Tabel II.45
Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan	Ket
1	Gandus	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006-2008	Pemprov	Proses serah terima
2	Tangga Buntung (35 Ilir)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1992/1993	Pemkot	
3	Sekanak	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006	Pemkot	
4	Benteng Kuto Besak (BKB)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1995	Pemkot	
5	Bawah Ampera (7 ulu)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2014	Pemkot	
6	16 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot	
7	16 Ilir (Bawah Ampera)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2004	Pemkot	
8	Kertapati	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot	
9	Kertapati (Samping Stasiun KA)	S. Ogan, Palembang	Beton	Baik	2011	Pemkot	
10	10 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1998	Pemkot	
11	Rumah Buruk	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot	
12	Pasar Kuto	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot	
13	1 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot	
14	Tangga Takat	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot	
15	13 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot	
16	Padatuan	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot	
17	Padatuan 7 Ulu (a)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2009	Pemkot	
18	Padatuan 7 Ulu (b)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2011	Pemkot	
19	5 Ulu	S. Musi, Palembang	Beton	Baik	2012	Pemkot	
20	4 Ulu	S. Musi,	Ponton	Baik	2010	Pemkot	

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan	Ket
		Palembang					
21	Sei Buaya	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot	
22	Pegayut	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot	
23	Ki Merogan	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot	
24	Tangga Batu	S. Musi, Palembang	Ponton	Rusak	2000	Pemkot	
25	Pasar Induk Jakabaring	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2003/2005	Pemkot	
26	Sei Lais	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot	
27	Bek Ang DAM (TNI)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot	
28	Kampung Kapiten	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot	
29	Lawang Kidul	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2008	Pemkot	
30	3/4 Ulu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot	
31	Masjid Jamik	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot	
32	Solok Betutu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2009	Pemkot	
33	Pemulutan (Pos Peng)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1990	Pemkot	
34	Tanjung Raja	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1994	Pemkab	
35	Muara Kuang	S. Ogan, Ogan Ilir	Kayu	Sedang	1990	Pemkab	
36	Kuala Sugihan	S. Sugihan, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab	
37	Lebong Hitam	S. Lebong Hitam, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab	
38	Pelabuhan Laut Sungai Lumpur	S. Lumpur, OKI	Kayu	Baik	1990	Pemkab	
39	Sungai Batang	S. Batang, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab	
40	Tulung Selapan	S. Tulung Selapan, OKI	Beton	Baik	2000	Pemkab	
41	Sugihan Kanan	Jalur 27, OKI	Kayu	Baik	2003	Pemkab	
42	Kuala XII	S. Kuala, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab	
43	Cengal	Cengal, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab	

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan	Ket
44	Pulau Padang	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab	
45	Pampangan	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab	
46	Sukodarmo (Jejawi)	S. Komering, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab	
47	Muara Kumbang	S. Musi, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab	
48	Upang	S. Sugihan, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab	
49	Sungsang	S. Lilin, Banyuasin	Ponton	Baik	2004/2006	Pemkab	
50	Makarti Jaya	S. Sebalik Jalur 9 (P9), Banyuasin	Ponton	Rusak	1983	Pemkab	
51	Sugihan (Ma. Padang)	Jalur 20, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab	
52	Sugihan Kiri (cendana)	Jalur 14, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab	
53	Sugihan Kiri (Timbul Jaya)	Jalur 13, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab	
54	Gasing	Gasing	Beton, Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab	
55	Muara Telang	Jalur 8, Banyuasin	Ponton	Baik	2003	Pemkab	
56	Telang Jaya	Jalur 8, Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	1992	Pemkab	
57	Simpang PU	S. Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	1997	Pemkab	
58	Muara Telang	Jalur 4, 5 Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	2005	Pemkab	
59	Sembilang	S. Sembilang, Banyuasin	Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab	
60	Pengumbuk	S. Musi Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	2001	Pemkab	
61	Teluk Betung	P. Rimau, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab	
62	Muara Padang	S. Sebalik, Banyuasin	Beton	Baik	1998	Pemkab	
63	Penuguan	S. Lilin, Banyuasin	Beton	Baik	1990	Pemkab	
64	Karang Agung	S. Lalan, Muba	Beton	Baik	1985	Pemkab	

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan	Ket
65	Sungai Lilin	S. Lilin, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemprov	Proses serah terima
66	Sekayu	S. Musi, Muba	Beton	Baik	1993	Pemkab	
67	Muara Lematang	S. Lematang, Muba	Ponton	Baik	1990	Pemkab	
68	Bayung Lincir	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2009	Pemkab	
69	Babat	S. Musi, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab	
70	Telang	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab	
71	Pangkalan Bulian	S. Batang Hari Leko, Muba	Ponton	Baik	2000	Pemkab	
72	Muara Rawas	S. Kelingi, Muba	Ponton	Baik	2001	Pemkab	
73	Teluk Kijing	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab	
74	Muara Teladan	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab	
75	Simpang	S. Komering, OKU	Ponton	Baik	2000	Pemkab	
76	Banding Agung	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja	Baik	1993	Pemkab	
77	Kota Batu	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja,Lantai Kayu	Rusak	1994	Pemkab	
78	Talang Pangeran (Pemulutan)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	2006	Pemkab	
79	Muara Rupit	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemprov	Proses serah terima
80	Muara Kelinci	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2008	Pemkab	
81	Muara Lakitan	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2011	Pemkab	
82	Beringin Teluk	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemkab	
83	Pauh	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2000	Pemkab	
84	Padang Tepung	S. Kelinci, Lahat	Beton	Baik	2000	Pemkab	
85	Kota Agung	S. Lematang, Lahat	Beton	Baik	1998	Pemkab	

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan	Ket
86	Muara Enim	S.Lematang , Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab	
87	Beringin	S. Ogan, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab	
88	Gunung Megang	S. Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2008	Pemkab	
89	Muara Lematang	S. Musi, Muara Enim	Beton	Baik	2011	Pemkab	

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Selain Dermaga Sungai, terdapat juga tambatan perahu sebanyak 77 Unit yang dibangun melalui alokasi belanja bantuan Keuangan bersifat khusus untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2020 jumlah tambatan perahu yang dibangun sebanyak 22 unit, Tahun 2021 sebanyak 25 Unit dan Tahun 2022 sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.46
Daftar Tambatan Perahu Bantuan Bersifat Khusus Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Kontruksi
I	**2020**			
1	2020	Air Salek	Saleh Mukti	Beton
2	2020	Air Salek	Saleh Mulya	Beton
3	2020	Air Salek	Bintaran	Beton
4	2020	Air Salek	Air Solok Batu	Beton
5	2020	Muara Sugihan	Kuala Sugihan	Beton
6	2020	Muara Sugihan	Gilirang	Beton
7	2020	Muara Sugihan	Rejosari	Beton
8	2020	Muara Padang	Air Gading	Beton
9	2020	Muara Padang	Purwodadi	Beton
10	2020	Muara Padang	Karang Anyar	Beton
11	2020	Muara Telang	Telang Jaya	Beton
12	2020	Banyuasin II	Sungsang III	Beton
13	2020	Banyuasin II	Sungsang IV	Beton
14	2020	Selat Penuguan	Mekarsari	Beton
15	2020	Karang Agung Ilir	Tabala Jaya	Beton
16	2020	Karang Agung Ilir	Sumber Rejeki	Beton
17	2020	Sumber Muara Telang	Muara Telang	Beton
18	2020	Air Kumbang	Teluk Tenggirik	Beton
19	2020	Makarti Jaya	Makarti Jaya	Beton
20	2020	Makarti Jaya	Muara Baru	Beton
21	2020	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	Beton
22	2020	Pulau Rimau	Dana Mulya	Beton
II	**2021**			
1	2021	Air Salek	Enggal Rejo	Beton
2	2021	Air Salek	Upang	Beton
3	2021	Air Salek	Salek Agung	Beton
4	2021	Banyuasin I	Pulau Borang	Beton
5	2021	Muara Padang	Tirta Jaya	Beton

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Kontruksi
6	2021	Muara Padang	Tirto Raharjo	Beton
7	2021	Muara Padang	Air Gading	Beton
8	2021	Muara Padang	Sumber Makmur	Beton
9	2021	Muara Padang	Daya Utama	Beton
10	2021	Muara Padang	Daya Makmur	Beton
11	2021	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	Beton
12	2021	Muara Sugihan	Mekar Jaya	Beton
13	2021	Muara Sugihan	Cendana	Beton
14	2021	Muara Sugihan	Daya Murni	Beton
15	2021	Tanjung Lago	Bangun Sari	Beton
16	2021	Selat Penuguan	Karang Manunggal	Beton
17	2021	Selat Penuguan	Purwodadi	Beton
18	2021	Selat Penuguan	Ringin Harjo	Beton
19	2021	Muara Telang	Sumber Mulya	Beton
20	2021	Muara Telang	Upang Cemara	Beton
21	2021	Makarti Jaya	Upang Mulya	Beton
22	2021	Pulau Rimau	Rukun Makmur	Beton
23	2021	Banyuasin II	Sungsang	Beton
24	2021	Tanjung Lago	Gasing	Beton
25	2021	Sumber Marga Telang	Karang Baru	Beton
III	**2022**			
1	2022	Makarti Jaya	Tanjung Mas	Beton
2	2022	Makarti Jaya	Tirta Kencana	Beton
3	2022	Air Saleh	Saleh Agung	Beton
4	2022	Air Saleh	Srikaton	Beton
5	2022	Air Saleh	Air Solok Batu	Beton
6	2022	Air Saleh	Enggal Rejo	Beton
7	2022	Muara Padang	Tanjung Baru	Beton
8	2022	Karang Agung Ilir	Karang Sari Primer 10	Beton
9	2022	Karang Agung Ilir	Mekar Sari	Beton
10	2022	Muara Telang	Telaga Makmur	Beton
11	2022	Muara Telang	Upang Karya	Beton
12	2022	Sumber Marga Telang	Talang Lubuk	Beton
13	2022	Sumber Marga Telang	Terusan Dalam	Beton
14	2022	Sumber Marga Telang	Muara Telang Marga	Beton
15	2022	Sumber Marga Telang	Karang Anyar	Beton
16	2022	Rantau Bayur	Rantau Harapan	Beton
17	2022	Banyuasin III	Ujung Tanjung	Beton
18	2022	Muara Sugihan	Margo Mulyo 16	Beton
19	2022	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	Beton
20	2022	Banyuasin II	Teluk Payo	Beton
21	2022	Banyuasin II	Rimau Sungsang	Beton
22	2022	Selat Penuguan	Mekar Sari	Beton
23	2022	Tanjung Lago	Manggar Raya	Beton
24	2022	Talang Kelapa	Kenten Laut	Beton
25	2022	Air Kumbang	Sebubus	Beton

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Angkutan Sungai (Kapal) mengalami penurunan jumlah yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh pembukaan jalan baru dan pendangkalan pada alur pelayaran sungai sebagai dampak dari sedimentasi.

Selain itu Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini sebagai outlet utama untuk pengangkutan barang melaui kapal juga memiliki beberapa kendala antara lain : sulit untuk dikembangkan karena berada ditengah pemukiman, kedalaman alur pelayaran relatif dangkal, sehingga pelayaran sangat tergantung dengan pasang surut sekitar 6 jam/hari dan panjang alur pelayaran sungai Musi (Kelas II dan Kelas III) sepanjang 221 Nautical Mile, Alur Sungai Banyuasin (Kelas I) sepanjang 11 Nautical Mile dan Alur Sungai Lematang 115 Nautical Mile.

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke Alur Sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 % dari 3.079 desa di Sumatera Selatan. Angkutan sungai yang beroperasi di Perairan Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 17% dengan jenis kapal antara lain : speedboat, tugboat, kapal gandeng/ tunda, tongkang, jukung dan ponton. Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar (87%) dermaga-dermaga Sungai tersebut dalam kondisi baik.

Tabel II.47
Data Kapal Sungai yang Beroperasi pada Perairan Sumatera Selatan

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH
1	TONGKANG	75
2	TUG BOAT	358
3	JUKUNG	548
4	SPEEDBOAT	114
	TOTAL	1095

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2024

Tabel II.48
Luas dan Panjang Sungai Wilayah Sungai Musi
Provinsi Sumatera Selatan

No	Sub WS	Luas (Km^2)	Sungai Utama	Panjang (Km)	Beberapa Nama Anak Sungai
1	Harileko	4.013	Batangharileko	1.250	Kapas, Menanti, Lain
2	Rawas	5.841	Rawas	2.485	Rupit, Liam, Lumpang, Kemang, Kulus, Kutu, Mengkulam
3	Lakitan	2.563	Lakitan	1.113	Hitam, Megang, Malus, Pelikai, Sumuk, Makai
4	Kelingi	1.898	Kelingi	1.100	Belumat, Ketuha, Naman, Meles, Alang, Saling
5	Musi	15.226	Musi	8.887	Keruh, Lintang, Kungkupring, Beliti, Noman, Kati, Lingsing, Pengi, Cawang, Gasing, Telang, Bulan,Padi, Saleh Upang, Padang, Lematang, Keramasan, Ogan
6	Semangus	1.972	Semangus	865	Keruh, Keras, Sialang, Temuan, Sembuta
7	Lematang	7.168	Lematang	4.412	Enim, Selangis, Endikat, Lengi
8	Ogan	8.358	Ogan	5.445	Kelekar, Rambang, Lubai, Kuang, Laye
9	Komering	10.275	Komering	6.260	Saka, Penaku, Gilas, Lempuing
10	Padang	2.040	Padang	1.200	Ro, Saleh, Muara Pulo, Sugihan, Padang, Kumbang, Rambai, Sebubus
Total		59.354		33.017	

Sumber: Studi Sinkronisasi Sungai Musi-Bengkulu, Dept. PU.

Tabel II.49
Klasifikasi Alur Pelayaran Sungai

Klasifikasi	Kedalaman (meter)	Lebar (meter)	Ruang Bebas Ketinggian (meter)	Sudah Ditetapkan Menteri
Kelas I	> 10	> 250	Lebih dari 15	Sungai Musi Hilir, Banyuasin Hilir
Kelas II	5 s/d 10	100 s/d 250	10 s/d 15	Sungai Musi Hulu, Sungai Lematang
Kelas III	< 5	< 100	Kurang dari 10	-

Sumber : PP 5/2010, PM. Menteri Perhubungan 52/2012

Rute angkutan sungai dari kota Palembang ke arah hilir Sungai Musi adalah menuju Sungai Lalan dan sekitarnya, Sungai Sungsang dan sekitarnya, Muara Sugihan dan sekitarnya, serta Sungai Lumpur dan sekitarnya. Trayek angkutan sungai di luar Kota Palembang cenderung untuk kepentingan transportasi

lokal. Kegiatan utama adalah sebagai penghubung "captive" antara satu desa dengan desa lain yang berseberangan (berada di seberang sungai), atau antar desa-desa di daerah yang terpencil dengan kota kecamatan atau ibu kota kabupaten terdekat. Jaringan layanan angkutan sungai di hilir Sungai Musi secara keseluruhan sudah terlayani angkutan sungai umum kapal motor.

Tabel II.50
Tarif Angkutan Sungai

NO.	LINTASAN TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF BATAS BAWAH (Rp.) – 20%		TARIF DASAR		TARIF BATAS ATAS (Rp.) + 20%	
			SOLAR	BENSIN	SOLAR	BENSIN	SOLAR	BENSIN
1	Palembang (Ampera) – Sungai Pinang	23	8.191	13.368	10.239	16.710	12.286	20.051
2	Palembang (Ampera) – Muara Lematang	85	30.271	49.402	37.839	61.753	45.407	74.103
3	Palembang (Ampera) – Teluk Kijing	134	47.721	77.881	59.652	97.351	71.582	116.822
4	Palembang (Ampera) – Muara Teladan	168	59.830	97.642	74.787	122.052	89.745	146.463
5	Palembang (Ampera) – Pangakalan Bulian	267	95.087	155.181	118.858	193.976	142.630	232.771
6	Palembang (Ampera) – Pemulutan	15	5.342	8.718	6.677	10.898	8.013	13.077
7	Palembang (Ampera) – Tanjung Raja	41	14.601	23.829	18.252	29.787	21.902	35.744
8	Palembang (Ampera) – Muara Kuang	102	36.325	59.283	45.407	74.103	54.488	88.924
9	Palembang (Ampera) – Sekayu	178	63.391	103.454	79.239	129.317	95.087	155.181
10	Palembang (Ampera) – Babat	224	79.773	130.189	99.716	162.737	119.660	195.284
11	Palembang (Ampera) – Musi Rawas	260	92.594	151.113	115.742	188.891	138.891	226.669
12	Palembang (Ampera) – Pauh	293	104.346	170.292	130.433	212.865	156.519	255.438
13	Palembang (Ampera) – Bingin Teluk	359	127.851	208.652	159.813	260.814	191.776	312.977
14	Palembang (Ampera) – Muara Rupit	388	138.178	225.506	172.723	281.883	207.268	338.260
15	Palembang (Ampera) – Tulung Selapan	105	37.394	61.026	46.742	76.283	56.090	91.539
16	Palembang (Ampera) – Sungai Lumpur	173	61.610	100.548	77.013	125.685	92.416	150.822
17	Palembang (Ampera) – Muara Batun	25	8.903	14.530	11.129	18.163	13.355	21.795
18	Palembang (Ampera) – Sp. Padang	50	17.806	29.060	22.258	36.325	26.710	43.590
19	Palembang (Ampera) – Pampangan	70	24.929	40.684	31.161	50.855	37.394	61.026
20	Palembang	292	103.990	169.711	129.987	212.139	155.985	254.566

	(Ampera) – Muara Lakitan							
21	Palembang (Ampera) – Muara Kelingi	342	121.796	198.771	152.245	248.464	182.695	298.157
22	Palembang (Ampera) – Gunung Megang	85	30.271	49.402	37.839	61.753	45.407	74.103
23	Palembang (Ampera) – Muara Enim	272	96.867	158.087	121.084	197.609	145.301	237.130
24	Palembang (Ampera) – Muara Padang	75	26.710	43.590	33.387	54.488	40.065	65.385
25	Palembang (Ampera) – Air Sugihan	80	28.490	46.496	35.613	58.120	42.736	69.744
26	Palembang (Ampera) – Muara Sugihan	208	74.075	120.890	92.594	151.113	111.112	181.335
27	Palembang (Ampera) – Upang	44	15.670	25.573	19.587	31.966	23.505	38.359
28	Palembang (Ampera) – Makarti Jaya	71	25.285	41.265	31.607	51.582	37.928	61.898
29	Palembang (Ampera) – Sungsang	85	30.271	49.402	37.839	61.753	45.407	74.103
30	Palembang (Ampera) – Simpang PU	75	26.710	43.590	33.387	54.488	40.065	65.385
31	Palembang (Ampera) – Telang	80	28.490	46.496	35.613	58.120	42.736	69.744
32	Palembang (Ampera) – Bayung Lencir	200	71.226	116.240	89.032	145.300	106.839	174.361
33	Palembang (Ampera) – Penuguan	115	40.955	66.838	51.194	83.548	61.432	100.257
34	Palembang (Ampera) – Pulau Rimau	130	46.297	75.556	57.871	94.445	69.445	113.334
35	Palembang (Ampera) – Sungai Lilin	180	64.103	104.616	80.129	130.770	96.155	156.925
36	Palembang (Ampera) – Karang Agung	160	56.981	92.992	71.226	116.240	85.471	139.488

Sumber: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 738/KPTS/DISHUB KOMINFO/2014

Jenis kapal yang melayani jaringan angkutan sungai dan penyeberangan di Kota Palembang secara jenis ada 3 yaitu Speed Boat (besar, kecil), Ketek dan Jukung (besar,kecil).

Perahu Motor Ketek adalah salah satu kapal yang beroperasi di sungai Musi, sering disebut “KETEK”. Kapal ini merupakan moda transportasi sungai untuk penumpang dan barang dalam jumlah kecil dan dioperasikan hanya untuk melayani penyeberangan dalam Kota Palembang, yaitu umumnya antar wilayah seberang ulu dan seberang ilir yang saling berhadapan dan jaraknya relatif dekat. Untuk menggerakkan kapal ini digunakan mesin klotok dengan kekuatan 24 PK atau dibawahnya, dan berbahan bakar solar. Daya

angkut maksimal 8-10 orang dalam posisi duduk pada ruang muat sepanjang 4 sampai 9 m dan selebar 1 hingga 1,5 m dan kapal ini pada umumnya tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan dan peralatan navigasi yang memadai, seperti pelampung, lampu, bendera dan lain sebagainya. Keberadaan kapal ketek ini dapat ditemui hampir di semua dermaga, baik yang berada sepanjang Sungai Musi. Dan meskipun sulit untuk menghitung secara keseluruhan jumlah ketek yang beroperasi di sungai Musi dan anak sungainya karena tidak semuanya terdaftar di Dinas Perhubungan Kota/Kab se Sumatera Selatan.

Gambar II.10
Kapal Motor Ketek

Sementara dari data lapangan dapat dicatat bahwa rata-rata kapal ketek yang beroperasi disungai Musi, masih berusia kurang dari 8 tahun atau paling tidak merupakan kapal buatan tahun 2005. Sistem operasi kapal ketek dilakukan dengan cara mangkal di dermaga tertentu untuk meunggu penumpang, dan hanya dapat menggambil penumpang di tempat kapal tersebut bersandar, jadi setelah mengantar penumpang ke tempat tujuan maka ketek tersebut kembali kepangkalannya dalam kondisi kosong. Dan menggingat cukup banyaknya kapal ketek yang bersandar maka kapal akan segera berangkat begitu ada penumpangnya, namun disatu dua tempat sudah lebih tertata dengan

sistim antri yaitu kapal datang lebih dulu akan mendapat prioritas pengisian penumpang dengan batas tertentu misal lima atau enam penumpang, dan setelah berangkat tempatnya diisi oleh kapal dibelakangnya, lalu saat kembali lagi dalam kondisi kosong kapal tersebut mengisi antrian yang paling belakang, demikian seterusnya saling susul.

Pada umumnya kapal kapal ketek tersebut dibuat di beberapa galangan kapal yang terdapat di sepanjang sungai Musi. Dengan usaha galangan kapal yang dijalankan dengan cara tradisional dan sangat sederhana serta dikelola oleh satu keluarga secara turun menurun, satu kapal ketek berbahan sekitar 2 meterkubik kayu meranti dapat diselesaikan selama 15 hari oleh satu orang tukang dibantu satu orang tenaga kasar.

Speed Boat yang beroperasi di Kota Palembang digunakan khusus untuk angkutan penumpang dengan trayek antar kota/kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Speed Boat yang beroperasi ada speed boat kecil dengan satu mesin dan speed boat besat dengan 2 mesin. Kapal jenis ini mempunyai kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kapal yang lain dengan mesin berkekuatan 40 PK berbahan bakar bensin mampu melaju dengan kecepatan maksimum 40 km / jam sehingga untuk trayektrayek tertentu kapal yang mempunyai ukuran lambung lebar 1,5 – 2,5 m, panjang 5,5 – 12 m dan mampu mengangkut penumpang sampai 8 – 22 orang ini sangat diperlukan keberadannya.

Gambar II.11
Kapal Long Boat dan Speed Boat

Operasional speed boat mengingat jumlah serta jarak tempuhnya yang memakan waktu cukup panjang, sebagian besar hanya satu kali mangkal tiap harinya dengan mengambil dan membawa penumpang yang diambil dan diangkut dari pinggir sungai yang dilaluinya sepanjang alur pelayaran menuju tempat tujuan, dan hal yang sama berlangsung saat dalam perjalanan kembali ke tempat mangkal semula atau dermaga awal. Kondisi ini juga disebabkan maskin banyaknya jumlah armada speed boat sehingga diatur dan pemerataan.

Kondisi yang sangat kontras dapat ditemui pada pangkalan yang memiliki mobilitas penduduk sangat rendah, seperti tampak pada daerah daerah pedalaman, dengan jarak tempuh yang cukup jauh serta waktu tempuh cukup panjang membuat satu speed boat hanya akan berlayar dua sampai tiga kali pulang pergi dalam satu minggunya. Sebagian besar speed boat yang ditemui sudah memiliki kelengkapan administrasi namun sebagian besar diantaranya pula tidak dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan perlengkapan navigasi yang memadai.

Kapal Jukung adalah kapal sungai di Sungai Musi dengan konstruksi dari kayu yang melayani angkutan barang dan penumpang, prioritas adalah untuk angkutan barang. Jenis barang yang diangkut utamanya adalah hasil – hasil pertanian dan perkebunan serta sembilan bahan pokok seperti beras, kelapa, kopra, pisang, gula, minyak sayur, tepung dan lain lain.

Kapal Jukung berukuran sangat variasi diantaranya berukuran panjang 15 sampai 20 meter dengan lebar 4 sampai 6 meter ini dapat menampung barang 30 sampai 60 ton, dan dengan kekuatan mesin mobil dan berbahan bakar solar. Kapal Jukung akan melayari trayek antar kota/kabupaten terutama ke

daerah hilir yang belum terjangkau oleh jaringan jalan dan angkutan umum.

Keberadaan jenis kapal jukung lebih dikarenakan untuk memaksimalkan kapasitas angkut, meskipun sesungguhnya membawa juga resiko yang tidak sedikit terutama dalam keseimbangan kapal. Sesuai dengan fungsi dan kapasitas barang yang di bawa, keberadaan kapal – kapal jukung ini lebih banyak ditemui pada dermaga atau pangkalan pasar dimana frekuensi mobilitas barang cukup tinggi. Berdasarkan survei lapangan diperoleh data bahwa dari waktu datang kemudian bongkar lalu menunggu muatan serta waktu pergi, lama berlabuh/mangkal pada setiap dermaga rata - rata berkisar antara 1 hingga 3 hari, dan selama itu pula awak kapal yang biasanya berjumlah 3 atau 4 orang menginap di dalam kapal. Sehingga rata – rata kapal jukung ini beroperasi satu minggu satu rit atau satu kali melayani trayek pergi pulang (PP).

Angkutan sungai sebagai jaringan layanan tersendiri di hampir seluruh Sumatera Selatan berpusat di Dermaga Pasar 16 Ilir dan Dermaga Bawah Jembatan Ampera melayani rute-rute ke seluruh Sumatera Selatan serta rute lokal kota Palembang dan sekitarnya. Untuk jaringan layanan angkutan sungai musi bagain hilir dapat di kelompokan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: angkutan sungai dari dan ke kota Palembang, dan angkutan sungai antar Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, untuk trayek angkutan sungai antar Kecamatan tidak ada trayek resmi, kebanyakan dari masyarakat di sekitar sungai musi hilir, menggunakan kapalnya sendiri untuk menuju kecamatan yang dituju. Hal ini sangat sulit untuk diidentifikasi kepastian trayek tetap untuk pergerakan antar Kecamatan, namun pergerakan menggunakan angkutan sungai antar kecamatan masih digunakan penduduk sekitar.

Adapun jumlah kunjungan penumpang angkutan sungai di Kota Palembang menunjukkan tren menurun

tajam selama lima tahun, seperti unjuk kerja pada tabel berikut ini :

Tabel II.51
Jumlah Kunjungan Penumpang Lima Tahun Terakhir (2020 - 2024)

NO	DERMAGA	JENIS KAPAL	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasar 16 Ilir	Speed Boat	39.463	37.588	29.111	12.866	13.277
		Ketek	14.550	16.207	13.736	7.759	10.221
		TOTAL	54.013	53.795	42.847	20.625	35.263
2	Bawah Jembatan Ampera	Speed Boat	76.983	99.821	109.915	47.982	48.882
		Long Boat	142.921	282.396	282.396	97.206	83.943
		Ketek	22.259	26.093	26.736	9.728	12.115
		TOTAL	249.163	408.310	421.064	154.916	144.940
3	7 ULU	Jukung	8.145	8.473	7.127	4.634	3.539
		Speed Boat	-	-	-	-	-
		Ketek	17.906	18.167	21.179	9.254	9.361
		TOTAL	26.051	26.640	28.306	13.888	12.900

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2022

Berdasarkan data jumlah kunjungan penumpang pada beberapa dermaga utama di Kota Palembang selama periode 2020–2024, terlihat tren penurunan yang cukup signifikan pada hampir semua jenis angkutan sungai.

1. Dermaga Pasar 16 Ilir
   - Penumpang speed boat mengalami penurunan dari 39.463 orang (2020) menjadi hanya 13.277 orang (2024).
   - Penumpang ketek juga menurun dari 14.550 orang (2020) menjadi 10.221 orang (2024).
   - Total penumpang berkurang dari 54.013 orang (2020) menjadi 23.498 orang (2024).
2. Dermaga Bawah Jembatan Ampera
   - Penumpang speed boat menurun dari 76.983 orang (2020) menjadi 48.882 orang (2024).
   - Long boat sempat mencapai puncak 282.396 orang (2021–2022), namun turun drastis menjadi hanya 83.943 orang (2024).
   - Penumpang ketek relatif kecil, hanya sekitar 22.259 orang (2020) dan menurun menjadi 12.115 orang (2024).

- Total penumpang turun dari 249.163 orang (2020) menjadi 144.940 orang (2024).

3. Dermaga 7 Ulu
   - Jukung menurun dari 8.145 orang (2020) menjadi 3.539 orang (2024).
   - Penumpang ketek juga turun dari 17.906 orang (2020) menjadi 9.361 orang (2024).
   - Total penumpang berkurang dari 26.051 orang (2020) menjadi hanya 12.900 orang (2024).

Dapat disimpulkan bahwa:

- Masyarakat lebih banyak beralih ke transportasi darat yang dianggap lebih cepat dan nyaman.
- Peran angkutan sungai semakin terbatas pada fungsi transportasi lokal dan penghubung antarwilayah di sekitar sungai.
- Diperlukan kebijakan strategis untuk mempertahankan trayek yang bersifat captive (desa-desa seberang sungai) sekaligus mendorong integrasi moda darat–sungai agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.3.1.4 Transportasi Danau

Satu-satunya angkutan danau di Provinsi Sumatera Selatan yang masih eksis adalah angkutan Danau Ranau, di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan, yang melayani trayek Ranau (Sumatera Selatan) ke Kota Batu (Lampung Selatan). Angkutan danau di Danau Ranau mendukung kegiatan kepariwisataan di Kabupaten OKU Selatan, dan masuk dalam kajian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai kawasan strategis terpadu pariwisata Danau Ranau.

2.1.3.1.5 Transportasi Penyeberangan

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api menjadi satu-satunya Pelabuhan Penyeberangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang menghubungkan ke Provinsi Bangka Belitung. Waktu tempuh dari

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api lebih singkat sekitar 2,5 – 3 jam menuju Pelabuhan Tanjung Kalian di Provinsi Bangka Belitung.

Melihat peran strategis tersebut, maka direncanakan pemindahan dermaga kapal cepat dari kawasan Boombaru Palembang ke Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagai simpul integrasi antarmoda di Provinsi Sumatera Selatan.

Pemindahan ini juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan ruang pengembangan dan tingginya kepadatan aktivitas transportasi di kawasan Boombaru, potensi gangguan terhadap kelancaran lalu lintas kota, serta kurang memadainya fasilitas keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang di dermaga lama. Sementara itu, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api memiliki fasilitas yang lebih representatif, lahan yang luas, serta aksesibilitas yang lebih baik sehingga mampu menampung pengembangan layanan kapal cepat di masa mendatang.

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api memiliki 2 (Dua) unit dermaga Movable Bridge Hydrolic.

Tabel II.52
Jumlah Kapal Yang Beroperasi

NO.	NAMA KAPAL	NAMA PERUSAHAAN PEMILIK KAPAL	GROSS TONAGE (GT)	KAPASITAS PENUMPANG (seat)	KAPASITAS KENDARAAN
1.	KMP. Dharma Kartika VII	PT. Dharma Lautan Utama	1547	362	30TS
2.	KMP. Dharma Sentosa	PT. Dharma Lautan Utama	536	200	10TS – 5KK
3.	KMP. Dharma Kartika I	PT. Dharma Lautan Utama	1305	400	50TS-50R2
4.	KMP. Dharma Kosala	PT. Dharma Lautan Utama	625	200	25TS-5KK
5.	KMP. Adhi Swadarma III	PT. Jembatan Nusantara	511	200	30R4-32R2
6.	KMP. Jembatan Musi I	PT. Jembatan Nusantara	406	250	22R4- 32R2

7.	KMP. Adhika Nusantara	PT. Jembatan Nusantara	1229	250	27Mix (TS dan KK)
8.	KMP. Belanak	PT. ASDP (PERSERO)	1163	204	4 TB – 10 TS – 8 KK
9.	KMP. Garda Maritim V	PT. Multi Guna Maritim	821	243	22 Mix (TS dan KK)
10.	KMP. Mutis	PT. ASDP (PERSERO)	621	250	78 KK – 4 TS
11.	KMP. Gunsa VIII	PT MUNIC LINE	1276	350	36 Mix (TS dan KK)
12.	KMP. Munic VII	PT MUNIC LINE	1279	250	24 TB – 6 TS
13.	KMP. Munic XI	PT MUNIC LINE	1681	300	75 Mix (TS dan KK)
14.	KMP. Mutiara Pertiwi III	PT. ATOSIM LAMPUNG PELAYARAN	303	250	21 Mix (TS dan KK)
15	KMP Dharma Kartika VII	PT. Dharma Lautan Utama	1547	362	50TS-50R2
16	KMP. MADANI	PT. ASDP (PERSERO)	1106	242	4 TB – 10 TS – 8 KK

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel 2024

Dalam penyelenggaraan pelabuhan laut untuk angkutan penyeberangan, saat ini Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api telah memiliki beberapa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan. Kondisi fasilitas pelabuhan eksisting masih terus dilakukan pembenahan dari pelayanan minimal operasi menuju pelayanan prima. Berikut tabulasi fasilitas pelabuhan yang ada sebagai berikut.

Tabel II.53
Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api

NO.	FASILITAS PELABUHAN		UKURAN
A.	Fasilitas Perairan		
	1.	Movable Bridge	P = 26 m, L = 7,4 m, kapasitas beban maksimum 50 Ton
	2.	Trestle	Panjang = 204,78 m, Lebar = 10 m
	3.	Causeway	Panjang = 133 m, Lebar = 12 m
	4.	SBNP	3 (tiga) unit Rambu Suar
	5.	Rumah Genset MB	Luasan = 13,69 M^2
B.	Fasilitas Daratan		
	6.	Gedung Terminal	2 (dua) lantai dengan luas 2.376 M^2
	7.	Gangway	Panjang 700 meter
	8.	Pelataran Jalan Keluar Masuk	Luasan 2.893,37 M^2
	9.	Pelataran Parkir	Luasan 2.688,22 M^2
	10.	Gapura Pintu Masuk	1 unit

	11.	Pagar Keliling	Panjang 200 meter
	12.	Toll Gate	Tinggi = 6 m, Lebar = 16,4 m
	13.	Loket Kendaraan	Luasan = 8 M^2
	14.	Timbangan Kendaraan	Luasan = 18,75 M^2 beban maks 40 ton
	15.	Rumah Genset	Luasan = 22,5 M^2
	16.	WTP	Kapasitas 100 M^3
	17.	Tanki BMM	Kapasitas 10.000 Liter
C.	Fasilitas Angkutan Lanjutan		
	18.	Bus Damri	10 unit kapasitas seat 28
	19.	Kendaraan Penumpang Travel	Tentatif

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel 2024

Dengan adanya Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api akan membuka kawasan Tanjung Api-api sebagai Penunjang Kawasan *Deep Sea Port* Tanjung Carat.

Tabel II.54
Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan

No.	**Uraian**	**Tahun**				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gol II (Sepeda Motor)	17,881	14,849	17,934	19,705	20.322
	- Keberangkatan	7,389	7,905	8,754	10,403	11,202
	- Kedatangan	10,492	6,944	9,180	9,302	9,120
2	Gol IV (M.bus, Jeep dan sejenisnya)	36,605	45,781	43,181	37,857	35,819
	- Keberangkatan	18,139	24,965	23,541	20,852	21,504
	- Kedatangan	18,466	20,816	19,640	17,005	14,315
No.	**Uraian**	**Tahun**				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Gol V (truck, bus dan sejenisnya)	53,311	64,060	36,788	34,573	31,470
	- Keberangkatan	26,340	34,081	25,756	22,343	21,140
	- Kedatangan	26,971	29,979	11,032	12,230	10,330
4	Gol VI (truck Fuso)	5,725	9,401	6,557	6,536	5,901
	- Keberangkatan	2,999	5,209	3,542	4,112	3,501
	- Kedatangan	2,726	4,192	3,015	2,424	2,400
5	Gol VII (truck tronton)	706	1,437	876	777	593
	- Keberangkatan	403	700	452	453	421
	- Kedatangan	303	737	424	324	172

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.6
Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan

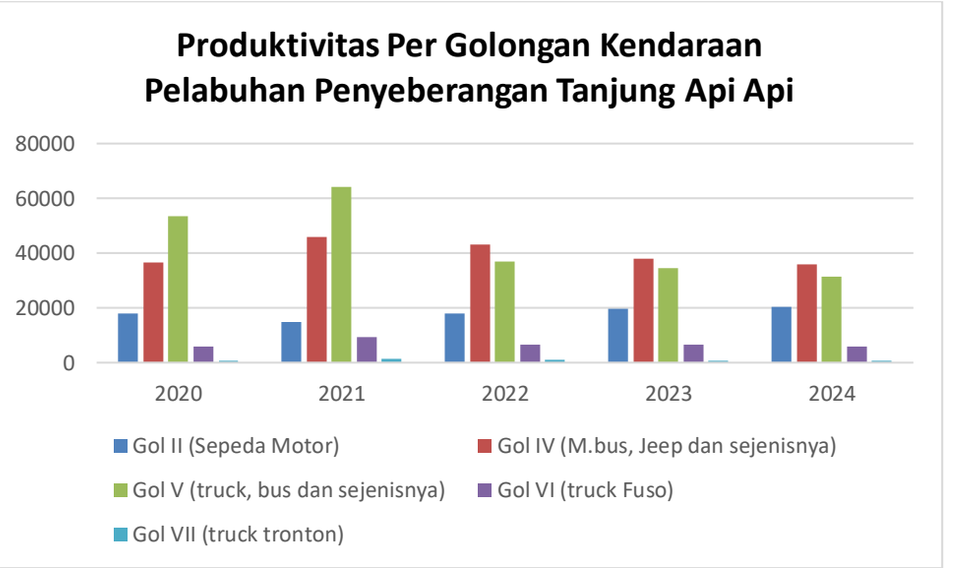

Tabel II.55
Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api - api

NO	URAIAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	JUMLAH TRIP	4,543	5,171	3,074	3,164	3,039
	BERANGKAT	2,269	2,615	1,474	1,782	1,622
	TIBA	2,274	2,556	1,600	1,382	1,382
2	JUMLAH PENUMPANG	287,969	67,525	65,096	66,263	54,156
	BERANGKAT	135,279	34,465	33,204	34,130	28,034
	TIBA	152,690	33,060	31,892	32,133	26,122
3	JUMLAH KENDARAAN	108,006	136,071	105,503	99,549	92,243
	BERANGKAT	55,364	70,465	58,048	50,240	51,346
	TIBA	52,642	65,606	47,455	49,309	42,897

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Grafik II.7
Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api – api

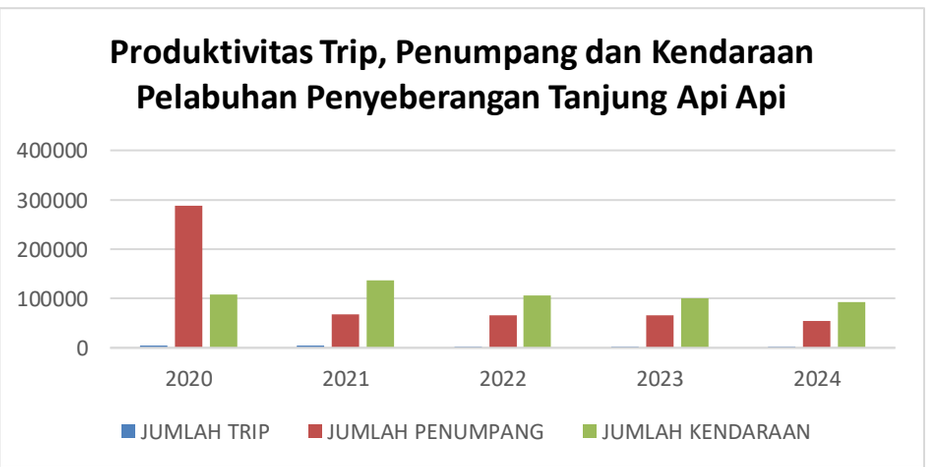

2.1.3.1.6 Transportasi Laut

New Palembang Port atau Pelabuhan Baru Palembang yang direncanakan terletak di Desa Marga Sungsang, Sungsang I dan Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu program pembangunan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Sektor Perhubungan. Pelabuhan ini termasuk dalam kategori pelabuhan laut dalam atau pelabuhan samudera, dan direncanakan akan menggantikan peran Pelabuhan Boom Baru terletak di Kota Palembang yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mempersiapkan infrastruktur unggulan dan salah satu prioritas utama adalah pembangunan New Palembang Port di Tanjung Carat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pembangunan pelabuhan tersebut sebagai bagian untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

New Palembang Port diproyeksikan menjadi pelabuhan utama di Provinsi Sumatera Selatan yang akan mengintegrasikan aktivitas perdagangan internasional dan mendukung sektor perekonomian lainnya. Keberadaan pelabuhan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Provinsi Sumatera Selatan pada pelabuhan lain di luar Provinsi Sumatera Selatan serta menekan tingginya biaya logistik. New Palembang Port akan menjadi hub strategis untuk mempercepat distribusi barang dan memperkuat daya saing ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

Pembangunan New Palembang Port tentu harus didukung adanya infrastruktur lainnya, seperti akses jalan dan konektivitas kawasan industry. Hal ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan agar pelabuhan dapat beroperasi dengan optimal setelah selesai dibangun.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk percepatan pembangunan New Palembang Port, antara lain pemenuhan dokumen teknis maupun dokumen administrasi. Pemenuhan dokumen teknis dan dokumen administrasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan regulasi serta melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pelaku usaha.

Rencana pembangunan New Palembang Port merupakan proyek strategis, untuk itu dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 menyusun tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyiapan Proyek (2026-2027)

   Fokus utama adalah pada pemenuhan dokumen administrasi dokumen teknis, sertifikasi lahan dan penentuan model pembangunan serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan konektivitas kawasan industri.
2. Transaksi Proyek (2027-2028)

   Pada tahap transaksi proyek ini berupa penyiapan berbagai dokumen dan fasilitasi, baik pembangunan fisik pelabuhan maupun operasional. Pada tahap ini dapat berupa penentuan skema pembangunan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau investasi langsung, dengan mempedomani ketentuan regulasi.
3. Konstruksi Proyek (2028-2029)

   Periode ini adalah tahap rencana pembangunan fisik yang merupakan konstruksi pelabuhan dan tahap penting sebagai tonggak sejarah salah satu penggerak daya saing perekonomian Provinsi Sumatera Selatan untuk upaya menyejahterahkan Masyarakat.

2.1.3.1.7 Transportasi Udara (Non Kewenangan)

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II telah dikenal sebagai bandara internasional sejak 1 Januari 1970 dan telah 54 tahun operasional melayani rute luar negeri. Namun pada 2 April 2024 status downgrade Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang berubah dari internasional ke domestic setelah Keputusan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2024 yang menyatakan Bandara SMB II Palembang tidak bisa lagi melayani penerbangan internasional namun penerbangan luar negeri tujuan Arab Saudi untuk keberangkatan umroh dan haji masih operasional.

Perubahan Status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II disebabkan pemerintah ingin meningkatkan kunjungan wisata domestic melalui program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Namun Bandara Sulatan Mahmud Badaruddin II Palembang di tetapkan Kembali menjadi Bandara Internasional yang tertuang dakam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 26 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025.

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan bandara standard Internasional yang terletak 12 km arah barat laut dari pusat kota Palembang. Bandara ini mempunyai luas 234.197 Ha dengan luas terminal penumpang 10.155 m^2 dan luas terminal kargo 2.020 m^2.

Fasilitas peralatan mekanikal bandara meliputi timbangan, conveyor belt, trolley, garbarata, escalator, dan AC sedangkan untuk keamanan meliputi X-ray, Walk Through Metal Detector, Hand Held Metal Detector, dan security CCTV.

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan bandar udara internasional yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk moda yang digunakan dari tempat asal ke bandara bervariasi.

33,33% orang menuju bandara menggunakan mobil pribadi, disusul dengan kendaraan kantor dan sewa mobil sebesar 26,67%. Sedangkan orang yang menggunakan sepeda motor sebesar 23,33% yang menggunakan bus sebesar 10% dan taksi sebesar 6,67%.

Angkutan udara di Sumatera Selatan terus dikembangkan dan terevitalisasi. Total 8 bandar udara yang ada hanya 3 yang beroperasi yaitu SMB II Palembang, Silampari Lubuk Linggau dan Atung Bungsu Pagaralam, sedangkan 5 bandara lainnya (bandara perintis) saat ini belum beroperasional.

Tabel II.56
Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Nama Bandara	Run Way	Jenis Pesawat	Keterangan
1	Palembang	SMB II	3000 x 45 m	Boeing 737/ Air Bus 330	Operasional Bandara Internasional
2	Muara Enim	Pendopo	1300 x 20 m	-	*Vacuum*
3	Muara Enim	Tanjung Enim	900 x 23 m	Cassa 212	*Vacuum*
4	Muara Enim	Serdang Gelumbang	1000 x 18 m	DHC-6	*Vacuum*
5	Lubuk Linggau	Silampari	2250 x 45 m	Boeing 737-500 / Airbus A320	Operasional dengan rute Lubuk Linggau-Palembang dan Lubuk Linggau Jakarta (PP)
6	Oku Selatan	Banding Agung	900 x 23 m	Cassa 212	Vacuum
7	Pagaralam	Atung Bungsu	1560 x 30 m	Fokker 50	Mulai Operasional Tahun 2014
8	Muba	Sekayu	900 x 23 m	Cassa 212	Vacuum

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2024

Dari gambaran kondisi infarstruktur tersebut ada beberapa fokus yang harus dihadapi kedepannya, antara lain Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor unggulan masih perlu

ditingkatkan terutama untuk mengangkut barang (produk dalam skala besar yaitu Batubara, CPO, Karet, Kayu, Pulp, Semen, dll), pembangunan infrastruktur juga harus mampu menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dan pembangunan infrastruktur kedepannya juga harus mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam konteks tersebut, peran sektor transportasi menjadi sangat penting sebagai tulang punggung mobilitas dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Transportasi yang andal, aman, dan terintegrasi akan memperkuat konektivitas antara pusat produksi, pusat distribusi, dan pasar, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Oleh karena itu, strategi pembangunan infrastruktur transportasi di Sumatera Selatan diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas fisik, tetapi juga pada modernisasi layanan, peningkatan aspek keselamatan, serta pemindahan dan penataan fasilitas transportasi agar lebih efektif dan efisien.

Tabel II.57
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara SMB II Palembang

DATANG/ BERANGKAT	TRAYEK ANGKUTAN	KONDISI YANG ADA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	6	7	8	9	
BERANGKAT	Domestik	Pesawat	8.895	6.664	8607	9345	9395
		Penumpang	697.787	530.551	977.362	1.332.376	1.378.293
	Internasional	Pesawat				73	125
		Penumpang				11.304	34.577
DATANG	Domestik	Pesawat	8.775	6.634	8.540	9.349	9.400
		Penumpang	735.522	521.074	965.579	1.313.771	1.370.741
	Internasional	Pesawat				92	129
		Penumpang				15.169	34.665
TOTAL		Pesawat	17.670	13.298	17.147	18.694	19.049
		Penumpang	1.433.309	1.051.625	1.942.941	2.636.087	2.749.034

Sumber: PT. Angkasa Pura II Palembang, 2024

Tabel II.58
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara Silampari Lubuk Linggau

TAHUN	JENIS PESAWAT	PESAWAT		PENUMPANG (Org)		BAGASI (Kg)		CARGO (Kg)	
		DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT
2019	ATR72	337	337	14,755	17,140	15,602	23,649	6,781	998
	B737-500	355	355	33,465	29,756	251,284	211,368	38,527	39,166
	A320	365	365	40,152	40,601	288,066	266,246	23,074	17,340
2020	ATR72	129	129	5,067	6,240	7,638	9,953	4,561	2,459
	B737-500	69	69	4,896	3,972	37,435	28,505	14,094	5,505
	A320	124	124	14,372	133,349	108,490	116,898	14,794	11,296
2021	ATR72	24	24	724	792	2,568	2,289	53	5
	B737-500	1	1	64	147	481	1,378	13	29
	A320	79	78	7,606	8,571	58,869	72,593	2,984	4,860
2022	A320	168	168	21,058	21,388	178,351	178,259	1,021	-
2023	A320	317	317	42,673	41,847	347,433	346,401	5,891	26
2024	A320	376	376	51.489	49.723	410.888	372.947	8.239	0

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Silampari, 2024

Tabel II.59
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara Atung Bungsu Pagar Alam

TAHUN	JENIS PESAWAT	PESAWAT		PENUMPANG (Org)		BAGASI (Kg)		CARGO (Kg)	
		DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT
2020	CESSNA C208B	47	47	40	36				
2021	CESSNA C208B	206	206	192	200				
2022	CESSNA C208B	203	206	469	615	2763			
2023	CESSNA C208B	105	105	349	437	2092			
2024	CESSNA C208B	215	215	987	1203	2826	1071		

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Atung Bungsu, 2024

Tabel II.60

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
	SPM Bidang Perhubungan																		
A.	Angkutan Jalan																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan																		
	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81%	82%	83%	84%	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84
2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan																		
	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe B pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81%	82%	83%	84%	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84
3	Fasilitas Perlengkapan Jalan																		
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	40%	41%	42%	43%	44%	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
4	Keselamatan																		
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81%	82%	83%	84%	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84
5	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
B.	Angkutan Sungai dan Danau																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau																		
	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81%	82%	83%	84%	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
2.	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau																		
	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau	100%	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	80%	81%	82%	83%	84%
	SPM Bidang Perhubungan																		
3.	Keselamatan																		
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	72%	75%	78%	80%	82%	0.72	0.75	0.78	0.80	0.82
	SPM Bidang Perhubungan																		
4.	Sumber Daya Manusia																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penye-berangan dalam Kabupaten/Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
C.	Angkutan Penyeberangan																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan																		
	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan																		
	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	75%	80%	85%	90%	95%	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
3.	Keselamatan																		
	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	82%	85%	88%	90%	0.80	0.82	0.85	0.88	0.90
4.	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penye-berangan dalam Kabupaten/Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
D.	Angkutan Laut																		
1.	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut																		
	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	0%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
2.	Jaringan Prasarana Angkutan Laut																		
	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	0%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
3.	Keselamatan																		

	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	72%	75%	78%	80%	85%	0.72	0.75	0.78	0.80	0.85
4.	Sumber Daya Manusia (SDM)																		
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	96.6%	97%	98%	99%	100%	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00

Pada Tabel II.60 dapat terlihat Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) Tahun terakhir yaitu Tahun 2020 – 2024, dimana tiap tahunnya realisasi capaian meningkat 1 – 2%, hal itu bisa terlihat dari Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Danau, Angkutan Penyeberangan yang tiap tahunnya mengalami peningkatan capaian namun untuk Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi masih dibawah 80% hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran yang menyebabkan kegiatan pengadaan Rambu tidak optimal.

Sedangkan dari Pelayanan Angkutan Laut, Indikator Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan dan Indikator Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan masih 0% dikarena kan Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Jaringan Pelayanan Angkutan Laut dan Jaringan Prasarana Angkutan Laut namun untuk Indikator Keselamatan dan Sumber Daya Manusia realisasi capaian mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selama 4 (Empat) tahun terakhir 2021 – 2024 dapat tergambar pada tabel dibawah ini, dimana pada Tahun 2023 anggaran telah menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Kepmendagri ini terkait dengan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Tabel II.61

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	2.846.200.000	3.618.000.000	4.313.500.000	6.128.500.000	3.452.000.000	4.315.108.393	5.555.963.446	7.062.297.313	7.424.453.082	4.717.215.824	1,52	1,54	1,64	1,21	1,37	4,94%	2,25%
Belanja Operasi	30.632.122.400	32.152.613.827	35.884.933.683	67.446.994.617	47.055.379.878	26.912.021.279	28.921.265.405	32.179.538.776	63.652.807.852	44.463.064.069	0,88	0,92	0,90	0,94	,094	11,33%	13,37%
-Belanja Pegawai	14.526.823.000	14.079.398.000	19.335.397.000	18.765.247.800	20.074.768.080	12.918.353.564	12.335.060.433	16.428.956.156	17.657.084.869	18.959.614.531	0,89	0,88	0,85	0,94	0,94	8,42%	10,07%
-Belanja Barang dan Jasa	16.056.349.400	18.073.215.827	16.549.536.683	48.681.746.817	26.980.611.798	13.946.816.515	16.586.204.972	15.750.582.620	45.995.722.983	25.503.449.538	1,06	0,92	0,95	0,94	0,95	13,85%	10,76%
-Belanja Hibah	48.950.000	-		-	-	46.851.200	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	1.715.890.450	3.542.431.523	9.148.023.220	5.213.493.000	2.471.908.690	1.360.487.100	3.257.367.125	8.506.262.775	4.437.651.560	2.422.178.150	0,79	0,92	0,93	0,85	0,98	9,43%	14,81%
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.248.390.450	3.479.931.523	7.318.023.220	2.447.013.000	2.191.967.190	1.194.652.100	3.257.367.125	6.763.565.325	1.802.238.060	2.155.764.750	0,96	0,94	0,92	0,74	0,98	15,13%	15,66%
-Belanja Modal Gedung dan Bangunan	467.500.000	62.500.000	1.830.000.000	2.766.480.000	128.941.500	165.835.000	62.084.000	1.742.697.450	2.635.413.500	128.941.500	0,35	1,00	0,95	0,95	1,00	-27,7%	-6,3%
-Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					51.000.000					50.314.700	0	0	0	0	0,99	0	0
-Belanja Modal Aset Lainnya					100.000.000					87.157.200	0	0	0	0	0,87	0	0

Pada Tabel II.61 Selama periode 2020–2024, pendapatan menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kenaikan rata-rata anggaran sebesar +4,94% per tahun. Realisasi pendapatan juga tumbuh, meski lebih rendah (+2,25% per tahun), namun selalu melampaui target. Hal ini terlihat dari rasio realisasi terhadap anggaran yang konsisten di atas 100%.

Pada sisi belanja operasi, baik anggaran maupun realisasi sama-sama mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing +11,33% dan +13,37%. Komponen terbesar adalah belanja pegawai yang tumbuh moderat (+8,42% anggaran; +10,07% realisasi), serta belanja barang dan jasa yang mengalami peningkatan lebih tinggi (+13,85% anggaran; +10,76% realisasi). Sementara itu, belanja hibah tidak lagi dianggarkan maupun direalisasikan sejak 2021.

Untuk belanja modal, terlihat dinamika yang cukup menarik. Secara total, anggaran tumbuh +9,43%, sedangkan realisasi meningkat lebih pesat yaitu +14,81%. Namun jika dirinci, terjadi variasi antar komponen:

- Belanja modal peralatan dan mesin meningkat tajam baik pada anggaran (+15,13%) maupun realisasi (+15,66%).
- Sebaliknya, belanja modal gedung dan bangunan justru mengalami penurunan signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran –27,7% per tahun dan realisasi –6,3% per tahun.
- Jenis belanja modal lain seperti jalan/jaringan/irigasi serta aset lainnya baru muncul pada tahun 2024, sehingga pertumbuhan rata-ratanya belum dapat dihitung.

Secara keseluruhan, kinerja pendapatan dapat dikatakan sangat baik karena selalu melebihi target, sementara belanja menunjukkan adanya pergeseran prioritas. Belanja rutin (operasi) terus meningkat mengikuti kebutuhan pegawai dan layanan, sedangkan pada belanja modal terlihat adanya pengurangan untuk gedung/bangunan namun peningkatan pada peralatan/mesin dan mulai muncul belanja infrastruktur jalan/jaringan di tahun terakhir.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat yaitu:

1. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang lambat, sehingga pekerjaan yang rutin setiap bulannya menjadi terhambat dalam pelaksanaannya dan pekerjaan kegiatan dapat ikut terhambat.

2. Efisiensi anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mengakibatkan ada sebagian kegiatan yang tertunda untuk dilaksanakan dan ada beberapa kegiatan yang dihilangkan.
3. Efisiensi yang dilakukan agar kiranya tidak berulang yang dapat menyebabkan beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaanya bahkan dapat dihilangkan untuk menutup efisiensi anggaran.

2.1.4 Kelompok Sasaran dan Layanan

Secara umum pengertian kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan termasuk dinas pelayanan, sehingga tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari

1. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

   Jaringan pelayanan angkutan jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan terus dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di seluruh wilayah provinsi. Dari total 88 trayek angkutan umum yang telah ditetapkan, saat ini 25 trayek telah beroperasi secara aktif. Pemerintah daerah berkomitmen memperluas layanan ini secara bertahap agar dapat menjangkau kawasan permukiman baru, mendukung mobilitas masyarakat, serta mendorong penggunaan angkutan umum yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
2. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

   Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan diarahkan untuk menyediakan terminal dan halte dengan fasilitas yang layak, aman, dan inklusif. Peningkatan kualitas fasilitas dilakukan agar seluruh pengguna jasa, termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, merasa nyaman dan terlindungi. Dengan prasarana yang memadai, diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien, aman, dan berkeadilan gender.

3. Fasilitas Perlengkapan Jalan

   Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan terus ditingkatkan untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Fasilitas tersebut meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, guardrail, zebra cross, traffic light, warning light, jembatan penyeberangan orang (JPO), lampu penerangan jalan umum (LPJU), serta peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Seluruh fasilitas dirancang dengan memperhatikan aspek keselamatan bagi semua pengguna jalan tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun kondisi fisik.

4. Fasilitas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

   Pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pengguna. Fasilitas di pelabuhan atau dermaga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, toilet bersih, ruang laktasi, serta area parkir yang tertata. Sementara fasilitas di kapal atau perahu dilengkapi dengan alat keselamatan seperti *life jacket*, *life buoy*, dan APAR. Seluruh fasilitas ini dirancang dengan memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pengguna, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, guna mewujudkan layanan transportasi air yang aman dan inklusif.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dituntut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pengguna transportasi.

Beberapa tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi.

Adapun tantangan dan peluang pelayanan penyelenggaraan urusan perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun tiga tahun mendatang secara umum tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.62
Analisis Isu Tantangan dan Peluang Sesuai Kewenangan

NO	KEWENANGAN	TANTANGAN	PELUANG
A	Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
1.	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap jaringan angkutan barang, jaringan jalan bebas hambatan dan jaringan terpadu dengan moda transportasi lainnya	Sumatera Selatan memiliki luas wilayah lebih kurang **91.592,43 km²** dengan tingkat akesibilitas yang masih sangat rendah dan harus terkonekvitas dengan baik melalui jaringan LLAJ
2.	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Kondisi geografis Sumatera Selatan memiliki sebagian kondisi topografi perbukitan dan lembah menjadikan tantangan tersendiri dalam penyediaan fasilitas keselamatan	Ruas jalan kewenangan provinsi sepanjang 1.779.27 KM baru terpasang fasilitas keselamatan sekitar 42%
3.	Pengelolaan terminal penumpang tipe B	Bangkitan dan tarikan perjalanan dengan occupancy ratio yang masih sangat rendah	Sebanyak 17 Kabupaten/Kota baru tersedia terminal tipe B pada 6 Kabupaten/Kota saja
4.	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Lalu lintas harian rata – rata dengan V/C ratio yang masih rendah, ruas jalan belum bisa dilaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas	Ruas jalan kewenangan provinsi sepanjang 1.779.27 KM baru 34% yang bisa dilakukan manejemen rekayasa lalu lintas
5.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi	Standart ukuran perkotaan masih belum banyak investasi pembangunan pusat bangkitan dan tarikan perjalanan baru	Ruas jalan kewenangan provinsi sepanjang 1.779.27 KM hanya 20% jalan provinsi berada di perkotaan
6.	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi	Kelembagaan Tim Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ belum berjalan optimal	Kinerja jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas belum mencapai *zero accident*
7.	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Penyelenggaraan perintis angkutan jalan serta load faktor kinerja AKDP masih belum optimal	Sejumlah 28 trayek AKDP dengan jumlah armada sebanyak 189 unit belum menjangkau pelayanan 17 Kabupaten/Kota
8.	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumatera Selatan belum menetapkan wilayah aglomerasi angkutan umum antar Kabupaten/Kota	Satu peluang kawasan aglomerasi angkutan umum namun belum ditetapkan sebagai kawasan yaitu Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung
9.	Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1	Sumatera Selatan belum menetapkan wilayah aglomerasi angkutan umum antar Kabupaten/Kota	Satu peluang kawasan aglomerasi angkutan umum namun belum ditetapkan sebagai kawasan yaitu

	(satu) Daerah Kabupaten / kota		Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung
10.	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumatera Selatan belum menetapkan wilayah aglomerasi angkutan umum antar Kabupaten/Kota	Satu peluang kawasan aglomerasi angkutan umum namun belum ditetapkan sebagai kawasan yaitu Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung
11.	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota / kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumatera Selatan belum menetapkan wilayah aglomerasi angkutan umum antar Kabupaten/Kota	Satu peluang kawasan aglomerasi angkutan umum namun belum ditetapkan sebagai kawasan yaitu Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung
12.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Upaya meningkatkan kinerja load faktor AKDP masih belum optimal	Sumatera Selatan dengan 17 Kabupaten/Kota dan memiliki luas wilayah lebih kurang **91.592,43 km²** dengan tingkat akesibilitas yang masih sangat rendah dan harus terkonekvitas dengan baik melalui jaringan LLAJ
13.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Upaya meningkatkan kinerja load faktor AKDP masih belum optimal	Sumatera Selatan dengan 17 Kabupaten/Kota dan memiliki luas wilayah lebih kurang **91.592,43 km²** dengan tingkat akesibilitas yang masih sangat rendah dan harus terkonekvitas dengan baik melalui jaringan LLAJ
14	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan tariff kelas ekonomi masih belum memperhitungankan investasi sarana angkutan umum pengadaan baru	Pelayanan AKDP masih belum optimal dari sisi jaringan pelayanan antar Kabupaten/Kota
B.	Sub Urusan Pelayaran		
1.	Penerbitan Perizinan Berusaha usaha jasa terkait bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan Pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut,	Upaya meningkatkan kinerja load faktor kegiatan usaha jasa terkait dengan abfkutan diperairan masih belum optimal	Ada 17 titik lokasi potensial dalam wilayah lintasan antar kabupaten/kota dalam provinsi

	tally mandiri dan depo peti kemas bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi		
2.	Penertiban Perizinan Berusaha Angkutan laut dalam negeri dan angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat bagi badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten / kota dalam Daerah Provinsi.	Upaya meningkatkan kinerja load faktor angkutan laut dalam negeri dan angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat masih belum optimal	Ada 17 titik lokasi potensial dalam wilayah lintasan antar kabupaten/kota dalam provinsi
3.	Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan	Moda share antara angkutan jalan dengan angkutan sungai kondisi eksisting saat ini mempunyai rasio 1:4	Hanya 5 wilayah Kabupaten/Kota angkutan perairan yang masih potensial yaitu Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Komering Ilir
4.	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan / atau jaringan jalur kereta api provinsi.	Sumatera Selatan belum memiliki lintasan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi	Moda share antara angkutan jalan dengan angkutan penyeberangan sangat rendah
5.	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Sumatera Selatan belum memiliki lintasan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi	Moda share antara angkutan jalan dengan angkutan penyeberangan sangat rendah
6.	Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas	Sumatera Selatan belum memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai implementasi amanat kewenangan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	Ada 17 titik lokasi potensial penetapan Pelabuhan Pengumpan Regional
7.	Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten	Sumatera Selatan belum memiliki lintasan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi	Moda share antara angkutan jalan dengan angkutan penyeberangan sangat rendah

	/ kota dalam Daerah Provinsi		
8.	Penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan regional	Sumatera Selatan belum memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai implementasi amanat kewenangan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	Ada 17 titik lokasi potensial penetapan Pelabuhan Pengumpan Regional
9.	Pembangunan, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Sumatera Selatan belum memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai implementasi amanat kewenangan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	Ada 17 titik lokasi potensial penetapan Pelabuhan Pengumpan Regional
10.	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Moda share antara angkutan jalan dengan angkutan sungai kondisi eksisting saat ini mempunyai rasio 1:4	Hanya 5 wilayah Kabupaten/Kota angkutan perairan yang masih potensial yaitu Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Komering Ilir
11.	Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional	Sumatera Selatan belum memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai implementasi amanat kewenangan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	Ada 17 titik lokasi potensial penetapan Pelabuhan Pengumpan Regional
12.	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional	Sumatera Selatan belum memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai implementasi amanat kewenangan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	Ada 17 titik lokasi potensial penetapan Pelabuhan Pengumpan Regional
13.	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional	Sumatera Selatan belum memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai implementasi amanat kewenangan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	Ada 17 titik lokasi potensial penetapan Pelabuhan Pengumpan Regional
14.	Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Sumatera Selatan belum memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai implementasi amanat kewenangan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	Ada 17 titik lokasi potensial penetapan Pelabuhan Pengumpan Regional
15.	Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Sumatera Selatan belum memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai implementasi amanat kewenangan UU 23/2014	Ada 17 titik lokasi potensial penetapan Pelabuhan Pengumpan Regional

		tentang Pemerintah Daerah	
16.	Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan regional	Sumatera Selatan belum memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai implementasi amanat kewenangan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah	Ada 17 titik lokasi potensial penetapan Pelabuhan Pengumpan Regional
C.	Sub Urusan Perkeretaapian		
1.	Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi	Moda share antara angkutan jalan dengan moda transportasi kereta api masih sangat rendah	Satu peluang trase perkeretaapian provinsi yaitu jalur kereta api Tanjung enim – Tanjung Api api
2.	Penerbitan izin usaha, isin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten / kota	Moda share antara angkutan jalan dengan moda transportasi kereta api masih sangat rendah	Pengembangan Light Rail Transit Sumatera Selatan mempunyai peluang dikembangkan pada kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung
3.	Penetapan jaringan jalur kereta api uang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Moda share antara angkutan jalan dengan moda transportasi kereta api masih sangat rendah	Satu peluang trase perkeretaapian provinsi yaitu jalur kereta api Tanjung enim – Tanjung Api api
4.	Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi	Moda share antara angkutan jalan dengan moda transportasi kereta api masih sangat rendah	Satu peluang trase perkeretaapian provinsi yaitu jalur kereta api Tanjung enim – Tanjung Api api
5.	Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian unum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Moda share antara angkutan jalan dengan moda transportasi kereta api masih sangat rendah	Satu peluang trase perkeretaapian provinsi yaitu jalur kereta api Tanjung enim – Tanjung Api api
6.	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi	Moda share antara angkutan jalan dengan moda transportasi kereta api masih sangat rendah	Satu peluang trase perkeretaapian provinsi yaitu jalur kereta api Tanjung enim – Tanjung Api api
7.	Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Moda share antara angkutan jalan dengan moda transportasi kereta api masih sangat rendah	Satu peluang trase perkeretaapian provinsi yaitu jalur kereta api Tanjung enim – Tanjung Api api

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Perhubungan
   a. Isu Permasalahan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

      Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tidak terlepas dengan jaringan prasarana jalan, jaringan pelayanan serta simpul transportasi darat yang ada. Dimana rata-rata kualitas jalan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kapasitas MST 8 – 10 Ton, sementara angkutan barang yang melintas di jalan umum masih ada yang melebihi kapasitas yang ada. Beberapa identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya :

      1) Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan jalan khusus untuk angkutan batubara, sehingga masih ada dispensasi penggunaan jalan umum menuju terminal khusus dan stockpile angkutan kereta api;
      2) Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
      3) Masih belum optimalnya kinerja pelayanan terminal tipe B Sumatera Selatan;
      4) Belum adanya terminal khusus angkutan barang;
      5) Pelanggaran terhadap kelebihan muatan masih terjadi;
      6) Belum optimalnya kinerja angkutan umum AKDP dengan tantangan angkutan berbasis online;
      7) Beberapa daerah terpencil belum tersentuh angkutan umum sehingga memerlukan subsidi angkutan jalan (keperintisan);
      8) Beberapa trayek angkutan umum masih perlu subsidi pemerintah;

9) Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dalam skema Kerjasama Pemerintah denga Badan Usaha (KPBU), dilatari dengan rendahnya komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan risiko serta penyelesaian pembebasan lahan;
10) Belum optimalnya kinerja penurunan emisi gas buang kendaraan tidak diiringi dengan upaya untuk mereduksi pengaruh emisi gas buang kendaraan;

b. Isu Permasalahan Pengelolaan Pelayaran;

Untuk pengelolaan pelayaran yang dalam penyelenggaraannya menyangkut masalah angkutan sungai, danau dan penyeberangan atau disingkat SDP serta pengelolaan wilayah perairan dalam batas 12 mile laut untuk kepentingan pelayaran, terdapat beberapa isu permasalahan dalam penyelenggaraannya diantaranya :

1. Minimnya jumlah pegawai yang berkompetensi dalam bidang penyelenggaraan sungai, danau dan penyeberangan;
2. Beberapa wilayah di Sumatera Selatan adalah perairan, sehingga perlu adanya angkutan sungai yang memadai untuk memfasilitasinya;
3. Belum optimalnya angkutan danau hal ini terkait dengan pengembangan danau sebagai objek pariwisata;
4. Fasilitas pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api masih minim perlu pengembangan;
5. Belum optimalnya pemenuhan Standart Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pelabuhan laut untuk angkutan penyeberangan;
6. Belum tersedianya dermaga untuk fasilitas kapal cepat serta dermaga sungai di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
7. Belum tersedianya kolam pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api sebagai antisipasi mempertahankan kedalaman alur pelayaran;

8. Rendahnya pemahamanan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan sungai;
9. Kinerja pelayanan Pelabuhan Utama (Boom Baru) saat ini terkendala dengan terbatasnya alur pelayaran serta hinterland pelabuhan yang stagnan untuk pengembangan sehingga perlu pemindahan lokasi ke Tanjung Carat;
10. Terdapat 17 (tujuh belas) titik lokasi potensial pembangunan Pelabuhan dengan status hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional belum dilakukan kajian Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
11. Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat.

c. Isu Permasalahan Pengelolaan Pekeretaapian;
   1. Tingginya biaya investasi untuk pembangunan jalan baru kereta api;
   2. Belum adanya kerjasama pembangunan pintu perlintasan sebidang kereta api antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota;
   3. Belum sinkronisasi peraturan pusat dan kebijakan daerah;
   4. Belum terlaksananya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyelenggaraan perkeretaapian provinsi, salah satu jalur potensial yaitu Tanjung Enim – Tanjung Api api;
   5. Pembangunan jalur kereta api baru belum diarahkan ke keterpaduan konektivitas dengan rencana Pelabuhan di Tanjung Carat;
   6. Tidak adanya pelayanan kereta api mahasiswa (Railbus) karena membutuhkan perpanjangan jalur sampai ke Kampus UNSRI Indralaya.

d. Isu Permasalahan Transportasi Perkotaan;
   1. Kebijakan penataan transportasi perkotaan masih dibatasi dengan pengembangan transportasi masing-

masing wilayah perkotaan di Kabupaten/Kota (belum terintegrasi);

2. Belum ditetapkannya Kawasan Aglomerasi Perkotaan, salah satu potensial yaitu Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung;

e. Permasalahan Transportasi Multimoda.

1. Belum terlaksananya Pembangunan Terminal Terpadu Multimoda di Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan sebagai simpul multimoda untuk memecah permasalahan angkutan barang dan kemacetan dalam Kota Palembang;
2. Belum adanya Badan Layanan berbadan hukum yang mengurusi multimoda;
3. Belum optimalnya integrasi layanan multimoda, baik integrasi fisik, integrasi tiket dan integrasi waktu.

2.2.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan bahwa OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dalam bidang Perhubungan. Adapun urusan wajib non pelayanan dasar OPD yaitu urusan Perhubungan.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur maka kebijakan Pemerintah Provinsi mengarah kepada adanya keterpaduan sistem transportasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mengurangi gap transportasi sampai ke seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Adapun hasil penelahaa terhadap visi dan misi Gubernur yang dikaitkan dengan tusi OPD adalah sebagai berikut :

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2018-2023; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2025-2030; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045; memperhatikan

prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 adalah :

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Sumsel maju terus untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju terus untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju terus untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju terus untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargaai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Misi 1:

Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan

berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.

Misi 2:

Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Misi 3:

Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4:

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5:

Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6:

Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 7:

Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan local.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030, dan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : “Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan,

dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing".

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM

Sasaran :

1. Maju Pemerataan Pendidikan Kewenangan (Optimalnya Upaya Peningkatan Partisipasi Peserta Didik dan Optimalnya Upaya Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal)
2. Maju Kualitas Pendidikan Kewenangan Provinsi (Optimalnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, Optimalnya Penyediaan Perangkat Pendukung Pembelajaran sesuai standard dan Optimalnya Pengendalian Pendidikan)
3. Maju Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia (Optimalnya Peningkatan kualitas pendidikan vokasi berbasis kompetensi, Optimalnya Pelatihan berbasis kompetensi (competency-based training) sesuai kebutuhan pasar kerja)
4. Maju Peningkatan Budaya Literasi di Sumatera Selatan (Optimalnya Upaya Peningkatan Akses terhadap Fasilitas Literasi, Optimalnya Upaya Peningkatan Budaya Literasi, Optimalnya Upaya Peningkatan SDM Literasi)
5. Maju Peningkatan Derajat Kesehatan (Optimalnya Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Optimalnya Peningkatan Akses Layanan Kesehatan, Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan di Masyarakat)
6. Maju Pembangunan Sektor Kepemudaan (Optimalnya Peningkatan Kompetensi Pemuda, Optimalnya Pemberdayaan Ekonomi Pemuda, Optimalnya upaya Penyehatan Pemuda)
7. Maju Peningkatan Kesetaraan Gender (Optimalnya Upaya Pengarus Utamaan Gender, Optimalnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Optimalnya Perlindungan Terhadap Perempuan)
8. Maju Upaya Perlindungan Anak (Optimalnya Sinergi Pemenuhan Hak Anak, Optimalnya Upaya Perlindungan Khusus Anak)

Misi 2 : "Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat".

Tujuan 2 : Meningkatkan ketahanan ekonomi

Sasaran :

1. Maju daya saing dan ketahanan ekonomi (Optimalnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan, kontribusi investasi, pengembangan perdagangan, stabilitas ekonomi makro daerah)

Misi 3 : "Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim".

Tujuan 3 : Meningkatnya Ketahanan pangan, energi, air serta perubahan iklim

Sasaran :

1. Maju keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air (Optimalnya ketahanan pangan, ketahanan energi daerah, pengelolaan sumber daya air)
2. Maju pengembangan hilirisasi berbasis Sektor Unggulan (Optimalnya Peningkatan Kemitraan dalam Hilirisasi, Optimalnya Peningkatan Fasilitas Pendukung Industri Hilir, Peningkatan Daya Saing Produk Hilir, Peningkatan Akses Pasar Produk Hilir)
3. Maju Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut, Peningkatan Kualitas Udara, Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Air, Air Laut dan Pesisir)

Misi 4 : "Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan".

Tujuan 4 : Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan

Sasaran :

1. Maju kualitas konektivitas daerah (Optimalnya kualitas infrastruktur Angkutan Jalan, Pelayanan Transportasi Umum, dan Pelayanan Akses Internet)
2. Maju Optimalnya akses infrastruktur dasar masyarakat (Optimalnya Pelayanan Air Minum, Pelayanan Sanitasi, dan Peningkatan Kondisi Bangunan Rumah)
3. Optimalnya Pengelolaan Bencana (Optimalnya Upaya Penurunan tingkat kerentanan Bencana dan meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana)

Misi 5 : "Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan".

Tujuan 5 : Mewujudkan kesempatan lapangan kerja dan perlindungan sosial

Sasaran :

1. Maju Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat (Mewujudkan Penyediaan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, Kesempatan Berusaha, serta Perlindungan Sosial Masyarakat)

Misi 6 : "Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas".

Tujuan 6 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

1. Maju Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan aset Pemerintah Daerah (Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan aset Pemerintah Daerah)
2. Maju Kualitas Pelayanan Publik (Meningkatnya Kualitas Layanan Publik)
3. Maju Kapabilitas Birokrasi (Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi)
4. Maju Peningkatan Pembangunan Hukum Daerah (Meningkatnya Pembangunan Hukum Daerah)

Misi 7 : "Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan local".

Tujuan 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan local

Sasaran :

1. Mempertahankan stabilitas sosial (Optimalnya Penguatan Ketentraman di Masyarakat dan Pembangunan Kebudayaan)

Tabel II.63
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : *"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua"*				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing	1. Kawasan strategis Tanjung Api-api masih perlu dukungan untuk pengembangan; 2. Masih banyak daerah masih minim pelayanan informasi	Alokasi anggaran APBD masih minim	Perlu dukungan APBN atau peran BUMN atau swasta murni dalam bentuk KPBU
2	Misi 2 : Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat	Beberapa daerah Kabupaten/Kota masih minim pelayanan transportasi.	Jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh	Perlu kerjasama antar Kabupaten/Kota mengenai satu kesisteman transportasi, komunikasi dan informatika
3	Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	Beberapa wilayah Kabupaten/Kota masih kurang sarana dan prasarana transportasi	Alokasi anggaran APBD masih minim	Perlu kerjasama antar Kabupaten/Kota mengenai satu kesisteman transportasi, komunikasi dan informatika
4	Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Kerjasama antar OPD dalam forum OPD perlu ditingkatkan lagi (penyelenggaraan transportasi bersinergi dengan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana)	Alokasi anggaran APBD masih minim	Perlu dukungan APBN atau peran BUMN atau swasta murni dalam bentuk KPBU
5	Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan			
6	Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju			

	pelayanan publik yang berkualitas			
7	Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan local			

2.2.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD

Penyusunan Rencana Strategis PD diharapkan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sebagai bahan komparasi capaian sasaran dalam Renstra PD. Sehingga dengan adanya keselarasan akan tercapai sinergi dan satu kesatuan kesisteman transportasi dari mulai Sislognas, Sistranas, Tatranas, Tatrawil dan Tatralok.

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025 – 2030

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025 – 2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden yakni "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi yang kuat, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara Negara maju tahun 2045 dan mencapai cita – cita Indonesia Emas 2045. Maka untuk mendukung Visi Presiden 2025 - 2029 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan 2025 – 2029 sebagai berikut: "Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ".

Adapun Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 yaitu Sebagai Berikut :

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industry transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman

4. Memperkuat kualitas SDM Transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi dan sector ekonomi utama
6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tabel II.64
Telaah Sinkronisasi Visi dan Misi RPJMD Dengan
Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

NO.	ITEM TELAAH	RPJMD	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SINKRONISASI
1.	VISI	Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua	Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada "Maju Infrastruktur Transportasi Sumatera Selatan" dengan indikator Maju layanan transportasi, peningkatan persentase keselamatan transportasi, serta peningkatan kinerja pelayanan publik
2.	MISI	Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada meningkatnya persentase pengguna moda transportasi umum yang berkeselamatan merata ke daerah pelosok
			2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada kualitas layanan transportasi

			kemandirian nasional melalui penguatan industry transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Sumatera Selatan guna kelancaran arus barang dan mobilitas penduduk
			3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada Integrasi Moda angkutan umum perkotaan serta revitalisasi trayek angkutan umum
			4. Memperkuat kualitas SDM Transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Perhubungan
			5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi dan sector ekonomi utama	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada konektivitas transportasi provinsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengurangan angka kemiskinan
			6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada Kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi wilayah pedalaman dan perbatasan Sumatera Selatan
			7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada kualitas layanan simpul transportasi
			8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.	Akhir periode RPJMD 2029 diarahkan pada peningkatan persentase pengguna angkutan umum

TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025 – 2029

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Presiden yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 - 2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional pada RPJMN 2025 - 2045;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025 – 2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045, sasaran pembangunan tahunan tahap ke-1 (RPJMN 2025 - 2029) diarahkan pada “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2025 - 2029 juga mencantumkan target Indonesia. Sasaran Kementerian

Perhubungan Tahun 2025 – 2029 memiliki 3 Sasaran Nasional dan 6 Sasaran Strategis.

Sasaran Nasional dalam RPJMN yaitu :

1. Penurunan Biaya Logistic (PN5)
2. Penurunan Emisi GRK (PN2)
3. Peningkatan Stok Infrastruktur (PN3)

Sasaran Strategis yaitu :

4. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional
5. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional
6. Meningkatnya keselamatan transportasi nasional
7. Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional
8. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten
9. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pembangunan sektor transportasi ada 3 (tiga) fokus menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1) Pengembangan Konektivitas dan layanan transportasi;
2) Pengembangan Aglomerasi Industri di KI / KEK Prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru
3) Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2020 - 2024 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2099 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional

Untuk mewujudkan tujuan : untuk menghubungkan berbagai wilayah dan moda transportasi agar mobilitas orang dan barang lebih efesien, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah

Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional**

Untuk mewujudkan tujuan : untuk meningkatkan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan dan pengembangan SDM Transportasi

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi nasional

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya Kualitas Kebijakan transportasi nasional

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatkan SDM transportasi yang kompeten melibatkan peningkatan keterampilan teknis, kepemimpinan, dan manajerial, serta pengembangan soft skills seperti berpikir kritis, kreatif, dan inovatif

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Untuk mewujudkan tujuan : mewujudkan pemerintahan yang efesien, transparan, akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) sasaran strategis penunjang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama :
    - IKSS 1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Nasional.

- IKSS 1.2 Rasio Integrasi Transportasi Nasional

2. Mencakup SS-2 dengan Inikator Kinerja Utama
   - IKSS 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public sector transportasi
3. Mencakup SS-3 dengan Inikator Kinerja Utama
   - IKSS 3 Tingkat Keselamatan transportasi nasional
4. Mencakup SSp-4 dengan Inikator Kinerja Utama
   - IKSSp 4 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan
5. Mencakup SSp-5 dengan Inikator Kinerja Utama
   - IKSSp 5 Meningkatnya SDM Transportasi yang kompeten
6. Mencakup SS-6 dengan Inikator Kinerja Utama
   - IKSSp 6 Indkes RB Kementerian Perhubungan

Dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kementerian Perhubungan, hal ini diselaraskan dan disinkronkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Renstra OPD dan digambarkan pada ilustrasi pada tabel berikut.

Tabel II.65
Telaah Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan
Dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

NO.	ITEM TELAAH	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		RENSTRA OPD	
1.	TUJUAN	1.	Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional pada RPJMN 2025 - 2029	1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
		2.	Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif dan berdaya saing		
		3.	Terwujudnya kebijakan dan SDM Transportasi yang berkualitas		
		4.	Terwujudnya tata kelola Pemerintah yang berintegras dan adaptif		
2.	SASARAN	1.	Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi transportasi nasional	1.	Meningkatnya keselamatan Transportasi Provinsi
		2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional	2.	Meningkatnya Layanan Transportasi
		3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional	3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
		4.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi Nasional		
		5.	Meningkatnya SDM		

			Transportasi yang Kompoten		
		6.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		

Dari tabel II.65 diatas, telaahan sinkronisasi dianalisis sebagai berikut:

1. bahwa tujuan Rencana Strategis (Renstra OPD) guna Terwujudnya meningkatnya kualitas infrastruktur angkutan jalan & meningkatnya pelayanan transportasi umum di Sumatera Selatan *telah* sejalan dengan *tujuan* Kedua Kementerian Perhubungan yaitu Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif dan berdaya saing;
2. bahwa *sasaran strategis* (SS) Renstra OPD dalam upaya mewujudkan *tujuan* yaitu meningkatnya keselamatan Transportasi Provinsi Baik di Darat Sungai dan Penyeberangan *telah* sejalan dengan *sasaran strategis ketiga* (SS.3) Kementerian Perhubungan yaitu Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional, meningkatnya Layanan Transportasi telah sejalan dengan *sasaran strategis kedua* (SS.2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional dan Meningkatnya Tata Kelola Organiasi Perangkat Daerah telah Selaras dengan *sasaran strategis keenam* (SS.6) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

HIGHLIGHT 1 : Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan

Indikasi Kegiatan Prioritas Konektivitas Jalan adalah

1. Highlight Kegiatan Prioritas:
   a. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Jambi – Rengat)
   b. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Probolinggo – Banyuwangi)
   c. Pembangunan Jalan Tol Akses Simpul Transportasi (Akses Pelabuhan Patimban)
   d. Pembangunan Jalan Pansela Jawa Timur (Jember – Banyuwangi)
   e. Pembangunan Jalan Trans Papua (Mamberamo – Elelim)
   f. Pembangunan Jalan Trans 3T (Pulau Enggano, Mentawai)

g. Pembangunan Jalan Akses PLBN Perbatasan Kalimantan dan Papua (Akses PLBN Long Nawang; Ubrub – Oksibil)
h. Pembangunan Fly Over/Underpass Simpang KA Perkotaaan (FO Buah Batu dan Sudirman)

2. Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Jalan melalui layanan penyiapan RC termasuk lahan
3. Highlight Arah Pengembangan Wilayah :
   - KI: Kuala Tanjung, Tenayan, Kemingking
   - KEK: Sei Mangkei
   - KSPN: Danau Toba
4. Highlight Arah Pengembangan Infrastruktur Konektivtas :
   - Jalan Tol Trans Sumatera
   - Exit Tol (Jalan Daerah) terhubung ke Lokasi Kawasan – Kawasan Industri sepanjang Koridor Jalan Tol
   - Pelabuhan: Kuala Tanjung, Belawan
   - Bandara: Kualanamu
   - Aerocity dan hub Kargo
   - KA Akses: KA Sei Mangke-Kuala Tanjung, KA Lahat-Tarahan

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan adalah :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan delivery capacity system dan pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pengembangan Jaringan Jalan Tol

   Diarahkan penilaian proyek prioritas yang mengintegrasikan Analisis Multi-Kriteria (MCA), Outline Business Cases (OBC), dan Full Business Cases (FBC), kelembagaan dan Skema pembiayaan alternative
2. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan mendukung sistem logistik Nasional dan akses daerah 3TP

   Diarahkan pada koridor dengan trafik tinggi dan terpadu dengan pengembangan kawasan ekonomi;
3. Pembinaan Tata Kelola Jalan Daerah melalui Skema Hibah berbasis Kinerja
4. Pokja lintas sektor untuk penanganan ODOL

   Pilot KPBU-AP Jalan Lintas Timur Sumsel dan Riau yang terintegrasi dengan Jewmbatan Timbang (UPPKB)

HIGHLIGHT 2 : Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang

Indikasi Kegiatan Prioritas

- Sumatera: koridor trans sumatera serta kereta akses menuju simpul transportasi dan kawasan prioritas
- Jawa: penyiapan/pembangunan kereta cepat Jawa, jalur ganda dan simpul transportasi, reaktivasi, dan peningkatan jalur dan persinyalan jalur KA
- Sulawesi: koridor trans Sulawesi untuk akses pelabuhan & kawasan prioritas
- Kalimantan: penyiapan KA Perkotaan IKN dan akses ke bandara Balikpapan

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang adalah :

1. Penyiapan/Pembangunan KA cepat untuk meningkatkan efisiensi koridor antar kota kota besar konurbasi di Jawa
2. Pembangunan KA antar kota, akses simpul transportasi dan kawasan prioritas di Jawa dan Sumatera
3. Jaringan KA logistik dan penumpang di luar Jawa/Sumatera
4. Pemenuhan dukungan angkutan khususnya sarana KA untuk layanan non komersial dan pemenuhan IMO Perkeretaapian

HIGHLIGHT 3 : Pengembangan Jaringan Pelabuhan Terpadu

Indikasi Kegiatan Prioritas

- Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan
  - Pelabuhan simpul utama
  - Pelabuhan mendukung kawasan prioritas
  - Kawasan mendukung kawasan tertinggal dan perbatasan
- Penyediaan Layanan Angkutan Laut Penumpang dan BArang Nonkomersil
  - Pelayaran perintis
  - Pelayaran tol laut
  - Pelayaran kapal ternak
  - Pelayaran kapal rede
- Peningkatan Keselamtan dan Keamanan Pelayaran Laut
  - Pelayaran perintis

- Pelayaran tol laut
- Pelayaran kapal ternak
- Pelayaran kapal rede

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Pengembangan Jaringan Pelabuhan Terpadu yaitu :

1. Pembangunan hub di Timur dan integrasi dengan kawasan.
   - Integrasi pelayaran komersil dan pelayaran non komersil dengan titik hub ada di wilayah timur Indonesia.
   - Aktivasi jaringan *freight RoRo* yang memiliki efisiensi pada rute jarak menengah 500 km – 1.000 km dan volume dibawah 500 TEUs sebagai feeder di wilayah timur.
2. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) yang lebih kompetitif melalui penyedia jasa yang lebih lebih beragam
   - Tinjauan dan revisi SKB tentang TKBM
   - Reformasi tariff kepelabuhan yang menerapkan prinsip cost recovery pada semua terminal
3. Restrukturisasi pengelolaan pelabuhan dengan pembentukan *Master Developer* dalam pengelolaan pelabuhan komersial.
4. Opsi kebijakan untuk pengerukan:
   1) Mengalokasikan PNBP Jasa Labuh suatu Pelabuhan untuk pengerukan di Pelabuhan tersebut
   2) Menyerahkan pengelolaan pemasukan Jasa Labuh kepada operator pelabuhan
5. Peremajaan Kapal melalui pembentukan Badan Layanan Umum investasi kapal

HIGHLIGHT 4 : Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu

Indikasi Kegiatan Prioritas

- Sumatera: pengembangan Bandara Kualanamu, Hang Nadim; dan Bandara Perairan (*seaplane*), serta peningkatan bandara *feeder* di pulau terluar
- Jawa: pengembangan Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda, pengembangan fasilitas hub kargo udara, dan pengembangan *Aerocity* Kertajati
- Bali-Nusra: pengembangan Bandara Ngurah Rai dan Labuan Bajo, peningkatan fasilitas kargo udara dan bandara *feeder* pendukung pariwisata

- Kalimantan: pengembangan Multi-Airport System (IKN, Balikpapan, Samarinda) serta peningkatan bandara *feeder* di daerah perbatasan
- Sulawesi: pengembangan Bandara Sam Ratulangi, Sultan Hasanudin, Kendari, Morowali, Bau-Bau, serta peningkatan bandara *feeder* pendukung kawasan
- Maluku-Papua: pengembangan Bandara Sentani, Wamena dan DEO Sorong, dan Bandara Perairan (*seaplane*), peningkatan fasilitas kargo udara di Timur, peningkatan bandara hub dan *feeder* untuk perintis termasuk *Airstrip* di Papua

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu yaitu :

- Pengembangan infrastruktur dan layanan pada bandara utama dan *feeder* termasuk *airstrip* untuk keperintisan
- Optimalisasi layanan perintis udara dengan menerapkan skema MYC atau KPBU-AP
- Pengembangan bandara mendukung kawasan pariwisata dan daerah 3TP termasuk bandara perairan (*seaplane*)
- Modernisasi layanan navigasi serta keselamatan & keamanan penerbangan
- Mendorong pengembangan industri penerbangan (*aerocity*, MRO, teknologi drone/UAV) dan implementasi penerbangan rendah karbon melalui penggunaan bioavtur secara bertahap
- Keterpaduan Bandara Utama dengan Kawasan Pariwisata Prioritas dengan strategi :
  1) Penguatan Hub Bandara, Penetapan hub dan penngkatan kapasitas dan layanan
  2) Aktivasi jaringan hub and spoke, penetapan dan utilisasi loop service
  3) Integrasi dengan pariswisata, pembangunan konektivitas dengan kawasan pariwisata

HIGHLIGHT 5 : Penguatan Konektivitas Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- Penanganan dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan pada setiap Lokasi Rawan Kecelakaan dan Perlintasan Sebidang.
- Penyelenggaraan, pengendalian dan pemenuhan persyaratan kendaraan laik jalan dan kendaraan yang Over Load dan Over Dimensi
- Penguatan koordinasi 5 (lima) pilar keselamatan LLAJ
- Penguatan integrasi data keselamatan dan perencanaan Keselamatan LLAJ
- Pengembangan kelembagaan dan skema pendanaan Keselamatan dalam mendukung program Keselamatan LLAJ.

Indikasi Lokasi Prioritas

- Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Super Prioritas dan Prioritas (tersebar)
- 2.721 lokasi (2025-2029, kumulaitf) dan penyiapan (KPBU-AP) : Pembangunan Fly Over Panorama I (Sitinjau Lauik I).
- Jumlah perlintasan tidak dijaga mencapai 2.420 (resmi tidak dijaga dan liar).
- Pemenuhan jumlah alat uji kendaraan bermotor yang belum memiliki UPUBKB
- Jumlah Kabupaten/Kota yang belum memiliki alat uji sebanyak 41 Kab/Kota.
- Pendampingan penyusunan RAK Daerah : 20 daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
- Pengembangan Proving Ground BPLJSKB : Bekasi (KPBU)
- Pembangunan/Pengembangan UPPKB: antara lain UPPKB Marisa (Gorontalo), UPPKB Pasar Panas, (Kalteng) UPPKB Datae (Sulsel), dan UPPKB Walenrang (Sulsel)
- Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PKNJ) (34 Provinsi) dan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (29 Provinsi)

Arah Kebijakan dan strategi dalam rangka Konektivitas Darat yaitu :

- Pengembangan/pembangunan pelabuhan dan peremajaan kapal serta peningkatan kinerja lintas penyeberangan pada lintas utama komersial
- Integrasi layanan transportasi SDP dengan layanan transportasi lainnya secara efektif
- Penguatan layanan keperintisan penyeberangan

- Penyediaan skema pengadaan dan peremajaan kapal SDP melalui skema pendanaan yang berkelanjutan
- Penyediaan skema pembiayaan TKD ke Pemda untuk mendukung transportasi SDP
- Pemenuhan, pengendalian, dan pengawasan fasilitas keselamatan dan keamanan SDP
- Pemantapan model bisnis terpisah antara operator sarana dan prasarana penyeberangan

Indikasi Kegiatan Prioritas

1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
   - *Highlight* Pengembangan pelabuhan pada lintas penyeberangan utama: Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Tj. Api-Api-Tj. Kelian, Bajoe-Kolaka, Kayangan-Pototano, Kariangau-Penajam
   - Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru: *carry-over* sasaran pokok RPJMN 2020-2024 (berdasarkan kesiapan) di Sumatera, Nusra, Maluku, Sulawesi, Papua
   - Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau: Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Papua
2. Pembangunan Sarana Penyeberangan
   - Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua
3. Layanan Angkutan Penyeberangan Nonkomersial pada Wilayah Lambat Tumbuh

HIGHLIGHT 6 : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mengembangkan sistem angkutan umum massal

Percepatan pembangunan sistem angkutan massal di wilayah Metropolitan Prioritas, melalui :

- Melanjutkan Sustainable Urban Mobility Plan berbasis wilayah fungsional (*metropolitan statistical area*) *contoh: IKN- Balikpapan-Samarinda, Manado, Banjarmasin, Palembang*
- Pengembangan kelembagaan pengelola transportasi metropolitan, *contoh: Jabodetabek (MRT E-W), BRT Metropolitan Bandung, Medan*

- Pengembangan skema integrasi pendanaan (co financing: tanggung jawab Pemda, optimalisasi swasta, dan dukungan pusat sejauh diperlukan), contoh MRT Jakarta
- Integrasi pengembangan angkutan umum dengan pengembangan perumahan, termasuk untuk MBR
- Implementasi Smart Mobility contoh: pemanfaatan ART di IKN
- Kegiatan Prioritas Mendukung Pembangunan Transportasi Hijau
  1. E-Bus untuk Angkutan Perkotaan
  2. Pengmbangan Transportasi Rel Berbasis Bisnis

HIGHLIGHT 7 : Pengembangan SDM untuk Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka Pengembangan SDM untuk Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi

- Peningkatan jumlah lulusan pengembangan SDM vokasi maupun teknis bidang transportasi.
- Pengembangan infrastruktur penunjang pengembangan SDM transportasi.
- Penguatan skema *link and match* dalam pengembangan dan pemanfaatan SDM transportasi.
- Pengembangan pemberdayaan SDM untuk bidang *safety, security,* logistik, digitalisasi, IT, dan elektrifikasi sarana transportasi.

Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perhubungan

Untuk mencapai prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi;
5. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten
6. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik

Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain :

1. Peningkatan konektivitas internasional didukung industry transportasi berdaya saing dan berorientasi global;
2. Peningkatan efektivitas konektivitas backbone antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan efesiensi sistem distribusi hinterland dalam pulau untuk mengurangi biaya logistic;
4. Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi;
5. Pemerataan jaringan transportasi ke kawasan perdesaan dan DTPK;
6. Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi;
7. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan public sebagai bagian dari pelayanan dasar sesuai SPM;
8. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan pada melalui digitalisasi
9. Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan secara berkelanjutan;
10. Percepatan transisi energy serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim
11. Pemenuhan (compliancy) standar teknis sarana dan prasarana serta standar kompetensi SDM transportasi
12. Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan
13. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi
14. Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan)
15. Peningkatan Kualitas Perumusan Kebijakan Transportasi
16. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Transportasi
17. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industry, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi
18. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan
19. Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan

20. Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelengaraan transportasi
21. Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tabel II.66
Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD Provinsi terhadap Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

Urusan Perhubungan :				
No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Rasio Konektivitas Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	meningkatnya rasio konektivitas provinsi menjadi 0,681	rata – rata meningkatnya rasio konektivitas Kab/Kota menjadi 0,526	meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763
2	V/C ratio jalan	terjaganya V/C ratio jalan provinsi pada kisaran ≤0,390	terjaganya V/C ratio jalan Kab/Kota ≤0,390	terjaganya V/C ratio ruas jalan nasional ≤0,750
2	Tingkat Keselamatan transportasi	meningkatnya tingkat keselamatan transportasi provinsi menjadi 100%	meningkatnya tingkat keselamatan transportasi Kabupaten / Kota menjadi ≥98%	meningkatnya tingkat keselamatan transportasi nasional menjadi 100%
3	Rata –rata Load Factor Angkutan Umum	meningkatnya rata – rata load factor angkutan umum provinsi menjadi ≥ 60%	meningkatnya rata – rata load factor angkutan umum Kabupaten / Kota menjadi ≥ 50%	meningkatnya rata – rata load factor angkutan umum nasional menjadi ≥ 70%
5	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja	Meningkatnya persentase pemenuhan standar layanan kinerja transportasi provinsi menjadi ≥ 90%	Meningkatnya persentase pemenuhan standar layanan kinerja transportasi Kabupaten / Kota menjadi ≥ 85%	Meningkatnya persentase pemenuhan standar layanan kinerja transportasi nasional menjadi ≥ 95%

2.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel II.67
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Urusan Perhubungan :				
No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Rencana Sistem Perkotaan	Penataan kawasan transportasi perkotaan menjadi kewenangan	-	Kerjasama dan koordinasi

		kabupaten/kota		dengan kabupaten / kota
2	Rencana Sistem Jaringan Transportasi	Cakupan jaringan pelayanan transportasi belum terintegrasi	Wilayah yang cukup luas dan tersebar	Kerjasama dan koordinasi dengan kabupaten / kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 terdiri dari :

Tabel II.68
Hasil Telaah Struktur Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
I.	**Rencana pusat permukiman / Struktur Perkotaan**			
I.1	Pemantapan Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Palembang mencakup Kawasan Perkotaan Patungraya Agung (Palembang-Betung-Indralaya-Kayu Agung)	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi	Tahun 2017 – 2018
I.2	Pengembangan dan Pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Kayuagung 2. Prabumulih 3. Baturaja 4. Muara Enim 5. Lahat 6. Lubuk Linggau 7. Sekayu	Pemerintah, SKPD Provinsi	Tahun 2017 – 2018
I.3	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Peninjauan 2. Pengandonan 3. Sungai Lumpur 4. Air Sugihan 5. Tugumulyo 6. Muara Beliti 7. Muara Lakitan 8. Sungai Lilin 9. Bayung Lencir 10. Babat Toman 11. Sungsang 12. Pangkalan Balai 13. Gumawang 14. Martapura 15. Muaradua 16. Indralaya 17. Tebing Tinggi 18. Ulu Musi 19. Talang Ubi 20. Muara Rupit 21. Pagar Alam 22. Mariana 23. Betung	SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/ Kota	Tahun 2017 – 2020
II.	**Rencana jaringan transportasi**			

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
II.1	**Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Darat**			
II.1.1	Peningkatan fungsi jaringan jalan Arteri Primer	1. BTS. Prov. Jambi – Peninggalan 2. Peninggalan – Sei Lilin 3. Sei Lilin – Betung 4. Betung – Bts. Kota Palembang 5. Jln. Kolonel H. Burlian (Palembang) 6. Jln Sultan Mahmud Bdaruddin (Palembang) 7. Jln. Jenderal Sudirman (Palembang) 8. Jln. Veteran (Palembang) 9. Jln. Perintis Kemerdekaan (Palembang) 10. Jln. Kolonel Nur Amin (Palembang) 11. Jln. Laksamana Yos Sudarso (Palembang) 12. Jln. R.E. Martadinata (Palembang) 13. Jln. H. Abdul Rozak / Patal Pusri / Monginsidi (Palembang) 14. Jln. R Sukamto (Palembang) 15. Jln. Basuki Rahmat (Palembang) 16. Jln. Demang Lebar Daun (Palembang) 17. Jln. Parameswara (Palembang) 18. Jln. Slamet Riyadi (Palembang) (Akses Pelabuhan Laut Boom Baru) 19. Bts. Kota Palembang-Simpang Indralaya 20. Jln. Riacudu (Palembang) 21. Jln. Rasid Sidik	BBPJN V, Dishub, PU Bina Marga	Tahun 2016-2036

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
		(Palembang) 22. Jln. Wahid Hasyim (Palembang) 23. Jln. Ki Merogan (Palembang) 24. Jln. Sri Jaya Raya (Palembang) 25. Jln. H. A Bastari (Palembang) 26. Jln. Akses Bandara (Palembang) 27. Jln. Lethen Harun Sohar (Palembang) 28. Jln. Soekarno Hatta (Palembang) 29. Jln Letjen H. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Palembang) 30. Jln. Mayejen Yusuf Singadekane (Palembang) 31. Jln. Lingkar Selatan (Palembang) 32. Simpang Indralaya – Meranjat 33. Meranjat – Bts. Kota Kayu Agung 34. Bts. Kota Kayu Agung – Sp. Penyandingan 35. Sp. Penyandingan – Bts Prov. Lampung 36. Bts Prov. Jambi – Maur 37. Maur – Terawas 38. Terawas – Bts Kota Lubuk Linggau 39. Jln. Jend A. Yani / Jln. Lintas Sumatera (Lubuk Linggau) 40. Jln. Yos Sudarso / Jln. Ke Muara Beliti (Lubuk Linggau) 41. Simpang Periuk – Muara Beliti 42. Jln. Yos Sudarso/ Jln ke Muara Beliti (Lubuk Linggau) 43. Muara Beliti – Bts. Kab Musi		

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
		Rawas 44. Bts Kab Musi Rawas – Tebing Tinggi 45. Tebing Tinggi – Jembatan Kikim Besar / Km.256 46. Jembatan Kikim Besar / Km.256 – Kota Lahat 47. Jln Jend. Ahmad Yani (Lahat) 48. Jln. Letnan Marzuki (Lahat) 49. Bts. Kota Lahat – Muara Enim 50. Jln. Kol Barlian (Lahat) 51. Jln. Muhammad Nuh (Lahat) 52. Jln. Prof Emil Salim (Lahat) 53. Jln. Harun Sohar (Lahat) 54. Bts. Kota Muara Enim – Simpang Sugih Waras 55. Jln Ahmad Yani (Muara Enim) 56. Simpang Sugih Waras – Bts Kota Baturaja 57. By Pass II / JL Garuda (Baturaja) 58. By Pass I / Jln Garuda (Baturaja) 59. Bts Kota Baturaja – Sungai Tuha 60. Sungai Tuha – Tanjung Kemala (Martapura) 61. Tanjung Kemala (Martapura) – Batas Prov Lampung 62. Simpang Indralaya – Bts Kab Ogan Ilir / Bts Kab Muara Enim 63. Bts Kab Ogan Ilir – Bts Kab Muara Enim- Bts Kota Prabumulih 64. Jln Sudirman 1 (Prabumulih) 65. Bts. Kota Prabumulih – Sp. Belimbing 66. Jln. Sudirman 2 (Prabumulih) 67. Sp. Belimbing –		

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
		Bts. Kota Muara Enim 68. Jln Sudirman (Muara Enim) 69. Jln. Sultan Mahmud Badaruddin II (Muara Enim) 70. Jln Garuda (Lubuk Linggau) (Lubuk Linggau – Bts. Prov. Bengkulu) 71. Betung – Bts Kota Sekayu 72. Jln. Arah ke Betung (Sekayu) 73. Jln. Lingkar Sekayu (Sekayu) 74. Bts. Kota Palembang / Bts Kab. Banyuasin – Tj Api – api 75. Sp. Bandara SMB II – Bts Kota Palembang / Bts. Kab Banyuasin 76. Aksis Terminal Alang – alang Lebar 77. Jln Lingkar Kemelak (Baturaja) 78. Celikah – Kayu Agung 79. Jln. A. Yani (Palembang) 80. Jln Lingkar Timur Kota Prabumulih		
II.1.2	Peningkatan fungsi jaringan jalan Kolektor Primer	1. Jln Akses Pesisir Timur Kabuapen OKI (Lempuing Jaya – Cengal – Tulung Selapan – Sungsang) 2. Nibung – Bts. Muba 3. Rupit – Lakitan – Karang Dapo	BBPJN V, Dishub, PU Bina Marga	Tahun 2016-2036
II.1.3	Pengembangan Terminal Terpadu Multi Moda Palembang (Tipe A)	Karya Jaya (Palembang)	Kementerian Perhubungan Dishub, PU Bina Marga	Tahun 2017-2021
II.1.4	Pengembangan Terminal Tipe A	1. Terminal Batu Kuning (OKU) 2. Terminal Kayu Agung (OKI) 3. Terminal Regional Lahat (Lahat) 4. Terminal Betung (Banyuasin) 5. Terminal Alang –	Kementerian Perhubungan	Tahun 2019-2020

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
		alang Lebar (Palembang) 6. Terminal Karya Jaya (Palembang) 7. Terminal Simpang Periuk (Kota Lubuk Linggau) 8. Rencana Terminal di Kab Banyuasin 9. Rencana Terminal Kota Pagar Alam		
II.1.5	Pengembangan Terminal Tipe B	1. Terminal Randik (Muba) 2. Terminal Kota Baru (OKU Timur) 3. Terminal Lubuk Harjo (OKU Timur) 4. Terminal Muaradua (OKU Selatan) 5. Terminal KM 32 Indralaya (Ogan Ilir) 6. Terminal Jakabaring (Kota Palembang) 7. Terminal Petanang (Lubuk Linggau) 8. Rencana Terminal Peninjauan (OKU) 9. Terminal Tulung Selapan (OKI) 10. Terminal Simpang Kodim (Muara Enim) 11. Terminal Muara Siban (Lahat) 12. Terminal Muara Lakitan (Musi Rawas) 13. Terminal Megang Sakti (Musi Rawas) 14. Terminal Tuah Negeri di Kabupaten Musi Rawas 15. Rencana Terminal Pangkalan Balai di Kabupaten Banyuasin 16. Terminal Talang Ubi di Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir 17. Terminal Muara	Dishub Provinsi	Tahun 2017-2021

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
		Rupit di Kabupaten Musi Rawas Utara 18. Terminal Plaju di Kota Palembang 19. Terminal Nendagung di Kota Pagar Alam 20. Terminal Lempuing di Kabupaten Ogan Komering Ilir 21. Terminal Prabumulih di Kota Prabumulih		
II.1.6	Pengembangan Terminal Tipe C	Berada sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub Kab/Kota	Tahun 2017-2026
II.1.7	Studi Kelayakan pengembangan jalur kereta api untuk melayani Sumatera Selatan bagian barat dan timur	Sumatera Selatan bagian barat dan timur	Dishub, BAPPEDA	Tahun 2022
II.1.8	Pengembangan jalur kereta api lintas antar PKN (Lampung-Palembang-Jambi	Lampung-Palembang-Jambi		Tahun 2022-2036
II.1.9	Pengembangan lintas jalur lintas kereta api baru dan stasiun	1. Tanjung Enim-Tanjung Api-api. 2. Lubuk linggau-Simpang Tanjung Api-api 3. Muare Enim-Prabumulih. 4. Tanjung Enim-Pelabuhan Linau. 5. Lubuk Linggau-Kota Padang-Pelabuhan Pulau Balai. 6. Palembang-Betung-Batas Jambi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi	2020-2030
II.2	**Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Laut**			
II.2.1	Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Api-Api	Banyuasin	Dishub	Tahun 2017-2036
II.2.2	Pembangunan infrtastruktur pendukung Pelabuhan Tanjung Api-Api	Banyuasin	APBN Dishub, PU Bina Marga, PU Cipta Karya	Tahun 2022-2036
II.2.3	Optimalisasi dan peningkatan Fungsi dan pelayanan Pelabuhan Nasional	Palembang	Kementerian Perhubungan, PT.Pellindo, Dishub	Tahun 2017-2026
II.2.4	Peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan dan	Banyuasi)	Dishub	Tahun 2017-2026

No	Rencana Struktur Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
	pelayaran			
II.3	**Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi dan Perhubungan Udara**			
II.3.1	Peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung tatanan kebandarudaraan Bandara Internasional SMB II	Palembang	Kementerian Perhubungan,PT .Angkasa Pura, Dishub	Tahun 2017-2021
II.3.2	Perluasan runway dan fasilitas bandara SMB II	Palembang	Kementerian Perhubungan, PT.Angkasa Pura, Dishub	Tahun 2022-2026
II.3.3	Peningakatan fasilitas kebandarudaraan bandara pendukung	1. Silampari 2. Atung Bungsu	Dishub, Kementerian Perhubungan	Tahun 2022-2036
III.	**Rencana jaringan energi**			
III.1	**Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik**			
III.1.1	Peningkatan pelayanan listrik masuk desa se Provinsi	Sumatera Selatan	PLN	Tahun 2017-2036
III.1.2	Idetifikasi potensi dan eksplorasi sumber listrik baru	1. PLTA, PLTU, Geothermal 2. Mikro Hidro 3. Lainnya	PLN	Tahun 2017-2036
IV.	**Rencana jaringan telekomunikasi**			
IV.1	**Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi**			
IV.1.1	Peningkatan pelayanan jaringan komunikasi :1. Kabel2. Nirkabel (wireless)	Sumatera Selatan	Telkom, Investor	Tahun 2017-2036
IV.1.2	Peningakatan pelayanan jaringan Internet/Data : 1. Broadband/ 3,5G-4G 2. WiFi 2,4 dan 5,8 Ghz 3. Wimax 4. Leased Line/Kabel	Perangkat Daerah Pemprov Sumatera Selatan	Badan Komunikasi dan Informatika, Telkom, Investor	Tahun 2017-2036
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air	Sumatera Selatan		Tahun 2017-2036

Tabel II.69
Hasil Telaah Pola Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No	Rencana Pola Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
I.	**Rencana kawasan lindung**			
I.1	Inventarisasi kawasan lindung	Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2021
I.2	Penetapan tata batas kawasan Hutan Lindung	Banyuasin,Musi Banyuasin, Musi Rawas,Empat Lawang,Lahat,Pagar Alam,OKU,OKUS	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2019-2021
I.3	Penghutanan kembali (reforesty) dan reboisasi kawasan hutan lindung	Seluruh Hutan Lindung yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2036
I.4	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional	Wilayah TNKS di Sumatera Selatan, Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa	BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2021-2036
	Pemantauan dan pengawasan di kawasan lindung	Seluruh wilayah	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai TamanNasional, BP DAS	Tahun 2017-2036
	Pembangunan jalan inspeksi untuk pengendalian kawasan TNKS, hutan lindung, konservasi dan suaka margasatwa	Seluruh wilayah	PU Bina Marga, Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2021
	Pengelolaan hutan bersama masyarakat	Seluruh wilayah	Dinas Kehutanan,BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2036
	Evaluasi terhadap hak penguasaan lahan yang telah dikeluarkan/ direkomendasikan oleh pemerintah pusat dan daerah.	Seluruh Kawasan lindung	Dinas Kehutanan, Bappeda	Tahun 2017-2026
II.	**Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis**			
II.1	Pengembangan infrastruktur dan sarana sosial ekonomi	1. Metropolitan Palembang 2. Perkotaan Lubuk Linggau. 3. Muara Enim dan sekitarnya 4. Pelabuhan Tanjung Api-Api 5. Kawasan Koridor Palembang-Prabumulih 6. Kawasan Koridor Lahat – Muara Enim 7. Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk Sekayu dan	Seluruh Stakeholder	Tahun 2017-2036

No	Rencana Pola Ruang	Lokasi	Instansi	Tahun
		Kayuagung). 8. Kawasan Tulung Salapan- Cengal Kabupaten OKI. 9. Kawasan Koridor Baturaja-Martapura. 10. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau.		
II.2	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung nasional	Kawasan Pesisir OKI	BAPEDALDA, Bappeda, BPKH Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2026
II.3	Pemantauan dan pengawasan di kawasan Untuk menjaga fungsi dan kelestarian kawasan	Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Dinas Kehutanan, BPKH, Balai Taman Nasional	Tahun 2017-2036
II.4	Pemantauan dan pengawasan untuk menjaga kelestarian kawasan	Kawasan Perkotaan Pagar Alam.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda	Tahun 2017-2036
II.5	Pengembangan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi Tinggi	Kawasan Panas Bumi (Geotermal) Lumut Balai Rantau Dedap (Semendo Darat Laut, Darat Tengah, Darat Ulu Kabupaten Muara Enim).	Bappeda, Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi	Tahun 2017-2036
II.6	Pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian dan perikanan	Kawasan Agropolitan Musi Rawas. Kawasan Agropolitan OKI. Kawasan Agropolitan OKU Timur.	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahun 2017-2026
II.7	Kawasan yang memiliki nilai strategis dalam bidang Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pusat Latihan Tempur Baturaja (dahulu OMIBA).	KODAM, KODIM	Tahun 2022-2031
II.8	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	Kawasan-kawasan strategis di seluruh kawasan	Bappeda PU Cipta Karya APBD Provinsi APBD Kabupaten	Tahun 2017-2022

Tabel II.70
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pencemaran Air dan Udara (emisi GRK)	Belum terbangunnya sistem control emisi udara akibat penyelenggaraan transportasi	Alokasi anggaran terbatas	Kerjasama dan koordinasi dengan BLH
2	Erosi, sedimentasi dan lahan kritis	Pembangunan prasarana transportasi harus menjaga keberlangsungan lingkungan	Alokasi anggaran terbatas	Pengawasan aparat

Tabel II.71
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Provinsi Sumatera Selatan
OPD Dinas Perhubungan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Pembukaan jaringan transportasi mengurangi ruang terbuka hijau	Pembangunan simpul transportasi terminal, dermaga dan bandara	Program kegiatan pembangunan prasarana transportasi memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pencemaran Air dan Kualitas Udara	Pengawasan terhadap CO2 emisi gas buang kendaraan	Program kegiatan pembangunan transportasi harus memperhatikan dampak terhadap kualitas air dan udara
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengurangan emisi GRK	Mengoptimalkan fungsi balai uji kelayakan kendaraan	Program kegiatan diarahkan mendukung pengurangan emisi kendaraan
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Alih fungsi lahan untuk pembangunan yang berkelanjutan	Land use transport mengarah kepada kinerja jaringan transportasi	Program kegiatan pembangunan diarahkan menjaga keberlangsungan lingkungan
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pencemaran Air dan Kualitas Udara	Pengawasan terhadap CO2 emisi gas buang kendaraan	Program kegiatan pembangunan transportasi harus memperhatikan dampak terhadap kualitas air dan udara
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Erosi, sedimentasi dan lahan kritis	Pembangunan prasarana di daerah perairan daratan	Program kegiatan diarahkan ke lokasi yang aman dari bahaya erosi, sedimentasi dan lahan kritis

2.2.5 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)

Analisa permasalahan dan Isu Strategis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Sumatera Selatan dilakukan dengan melihat gambaran layanan SKPD (pada Bab II) yang telah di*tagging* dengan beberapa indikator utama yang belum tercapai dan melakukan analisa permasalahan dengan melakukan *cascading* per pilar untuk mengetahui akar permasalahan dan mendapatkan isu strategis tujuan Pembangunan Berkelanjutan sektor transportasi yang akan menjadi acuan pada Renstra OPD.

Goal 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Goal ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi dalam rangka pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan pemerintah terkait dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan target TPB/SDGs Tujuan 9 melingkupi :

1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahtaeraan manusia, dengan focus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua;
2. Mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan pada 2030 meningkatkan secara signifikan pangsa industry dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan keadaan nasional, dan menggandakan pangsanya di Negara – Negara yang paling kurang berkembang;
3. Meningkatkan akses usaha industry skala kecil dan usaha

lainnya, khususnya di Negara berkembang, terhadap layanan keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan integrasinya ke dalam rantai nilai dan pasar;

4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industry manufaktur agar berkelanjutan, dengan peningkatan efesiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industry yang bersih dan ramah lingkungan, secara lebih besar, dengan semua Negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing - masing;
5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sector industri di semua Negara, terutama negara – negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan public dan swasta untuk penelitian dan pengembangan;
6. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di Negara – Negara berkembang melalui peningkatan dukungan keuangan, teknologi, dan teknis kepada Negara – Negara Afrika, Negara – negra berkembang terkurung daratan, dan Negara – Negara kepulauan kecil yang sedang berkembang;
7. Mendukung pengembangan teknologi domestic, riset dan inovasi di Negara – Negara berkembang, temasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industry dan peningkatan nilai tambah komoditas;
8. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di local Negara kurang berkembang pada tahun 2020.

Berdasarkan hal di atas dan hasil cascading goal 9, maka isu strategis yang akan dikembangkan adalah,

1. Peningkatan infrastruktur berkualitas
2. Peningkatan promosi industrialisasi berkelanjutan
3. Peningkatan akses terhadap Teknologi Informasi dan telekomunikasi yang berkualitas

Tabel II.72
Capaian SDG's Goal 9 Sektor Transportasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2023	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs tahun 2024	Status Capaian
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Dinas Perhubungan	km	80	58,2	58,2	100
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	unit	4 (PGA, LLG, PLG, MUBA)	6 (PGA, LLG, MUBA, PLG, Lahat, PALI)	4 (PGA, LLG, MUBA, PLG)	66.67
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga Penyeberangan	Dinas Perhubungan	unit	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	3 (Pelabuhan Boom Baru, Penyeberangan TAA dan Laut Regional TAA)	100
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	lokasi	3 (Pelabuhan Laut Regional TAA dan Pelabuhan Boom Baru, Pelabuhan Tanjung Carat)	3 (Pelabuhan Laut Regional TAA, Pelabuhan Boom Baru, Pelabuhan Tanjung Carat)	2 (Pelabuhan Laut Regional TAA, Pelabuhan Boom Baru)	66.67

Goal 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan tingginya urbanisasi di perkotaan di Provinsi Sumatera Selatan terutama di Kota Palembang dan Ibu Kota Kabupaten/Kota merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Kepadatan penduduk Sumatera selatan mencapai 93,35 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 17 Kabupaten/kota beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kota Palembang sebesar 4.405,17 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Musi rawas Utara sebesar 31,75 jiwa/km2.

Pesatnya pertumbuhan perkotaan, pembangunan fasilitas perkotaan dan kebutuhan pemukiman yang menuntut ketersediaan lahan di perkotaan, penataaan kawasan kumuh dan penyediaaan akses infrastruktur dasar merupakan salah satu agenda prioritas yang harus tercapai hingga tahun 2030 melalui Tujuan 11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Ketersediaan hunian layak yang didukung infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan memiliki fungsi vital dalam menjamin kehidupan penduduk yang sejahtera di perkotaan. Di Provinsi Sumatera Selatan, belum semua penduduk dapat menghuni hunian layak yang didukung oleh infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai. Sesuai dengan Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, selain menyediakan hunian layak dan terjangkau, infrastruktur perkotaan yang menjadi perhatian antara akses terhadap perumahan yang layak, aman dan terjangkau, penataan kawasan kumuh dan terhadap pelayanan dasar perkotaan (Target 11.1), akses terhadap transportasi (Target 11.2), memperkuat urbanisasi yang inklusif (Target 11.3), warisan budaya (Target 11.4),pengurangan resiko bencana (Target 11.5), dan Jumlah kota hijau (Target 11.6.1). Di bidang transportasi, proporsi pengguna angkutan pribadi masih tinggi dibanding pengguna angkutan umum. Kualitas dan kuantitas angkutan umum yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau masih perlu ditingkatkat melalui Bus Way (Trans Musi) dan Kereta Api Perkotaan (Kertalaya dan LRT) dan revitalisasi moda angkutan pinggiran

(angkot) dengan pengembangan trayek-trayek baru, perparkiran dan terminal di kota termasuk angkutan sungai karena beberapa kota di Provinsi Sumsel dilintasi sungai.

Untuk mempercepat pembangunan perkotaan terutama Palembang Metropolitan dalam konsep Metropolitan Patung Raya Agung (Palembang-Betung-Indralaya-Kayu Agung) dan terintegrasi dengan rencana Wilayah Pengembangan Strategis Pemerintah Pusat melalui BPIW Kementerian PUPR yaitu (WPS 5 meliputi Merak Bakahueni Bandar Lampung Tanjung Api-api dan WPS 6 Jambi-Betung-Palembang-TAA-Bangka Belitung) diharapkan akan mendorong percepatan berkembangnya kota-kota sekitar dalam rangka pengembangan wilayah dan keseimbangan pembangunan yang membuat berkurangnya urbanisasi dari Daerah.

Beradasarkan uraian di atas serta hasil *cascading* yang telah dilakukan, maka isu strategis goal 11 ini adalah,

1. Peningkatan Akses Perumahan yang berkelanjutan
2. Peningkatan aksessibilitas sistem, transportasi
3. Urbanisasi inklusif berkelanjutan
4. Perkuatan warisan budaya dan warisan alam dunia
5. Penurunan jumlah kematian terdampak bencana
6. Penurunan dampak merugikan lingkungan perkotaan per kapita
7. Kota dan pemukiman yang menerapkan Rhe Sendal Framework for disaster reduction 2015-2030

Tabel II.73
Capaian SDG's Goal 11 Sektor Transportasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2023	Target SDGs Tahun 2024	Capaian SDGs Tahun 2024	Status Capaian
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, peningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							
11.2.1 .(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DINAS PERHUBUNGAN	%	34	35	54,5	154
11.2.1 .(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	DINAS PERHUBUNGAN	Kota Besar	2	2	2	100

2.2.6 Telaah Pembangunan Perspektif Gender

Strategi pembangunan sektor transportasi harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Dengan indikator perspektif gender sebagai berikut :

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG);
2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Mobilitas penduduk dengan menggunakan transportasi umum tidak hanya dibatasi oleh kaum laki – laki saja, sudah banyak kaum perempuan yang melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum, baik tujuan untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Prinsip – prinsip pembangunan sektor transportasi mengadopsi pengarusutamaan gender, seperti adanya fasilitas umum khusus kaum perempuan antara lainnya ruang khusus ibu dan anak, jumlah toilet perempuan sama dengan toilet laki – laki, adanya cars di dalam kereta khusus untuk perempuan atau pun di dalam bus angkutan umum dan sebagainya. Berikut tabel analisis gender terhadap Renstra OPD.

Tabel II.74
Analisa Gender Terhadap Renstra

NO	STRUKTUR RENSTRA	PERSPEKTIF GENDER	REKOMENDASI/RTL
1	Landasan/Acuan/Dasar Hukum	- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengharustamaan Gender dalam Pembanguna Nasional - Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri no. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah	- Pergub No.47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan - Pergub No.32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023
2	Data Terpilah	- Jumlah penumpang angkutan penyeberangan tanjung api api berdasarkan jenis kelamin - Jumlah penumpang angkutan Light Rail Transit berdasarkan jenis kelamin - Jumlah penumpang AKDP Terminal Tipe B berdasarkan jenis kelamin - Jumlah pegawai ASN Dishub berdasarkan jenis kelamin	- Penyediaan Fasilitas Umum di Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal seperti *public toilet* telah dibedakan dalam jumlah unit yang sama - Penyediaan Fasilitas Umum Ruang Laktasi (Ibu Hamil dan Menyusui); - Penyediaan Fasilitas Umum Bangunan Bidang Miring untuk perempuan yang menggunakan pakaian wanita - Penyediaan Ruangan (Space) dalam sarana angkutan umum khusus perempuan
3	Gambaran Umum/Isu Strategis	- Belum optimlanya jumlah pegawai ASN Perempuan yang menduduki jabatan - Belum optimalnya sarana dan prasarana pembangunan karena rasio pelaku perjalanan lebih banyak laki – laki - Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	- Peningkatan peran pegawai ASN perempuan dalam karier menduduki jabatan - Pembangunan sarana dan prasarana transportasi mengadopsi kesetaraan gender
4	Visi dan Misi	- **Visi** : Sumsel maju terus untuk semua - **Misi** : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan,	- Tujuan Dinas : Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas - Sasaran Dinas : 1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Sungai dan

		keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing	Penyeberangan 2. Meningkatnya Layanan Transportasi 3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
5	Program dan Kegiatan	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** 1. Pembangunan Gedung Terminal 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal 4. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 5. Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 6. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 7. Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 8. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Program Pengelolaan Pelayaran** 1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** 1. Pembangunan Gedung Terminal 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal 4. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 5. Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 6. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 7. Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 8. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi **Program Pengelolaan Pelayaran** 1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 3. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 4. Pengoperasian dan

		Regional 3. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 4. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **Program Pengelolaan Perkeretaapian** 1. Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi 2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi 3. Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi 4. Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi 5. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **Program Pengelolaan Perkeretaapian** 1. Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi 2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi 3. Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi 4. Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi 5. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi (sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)
6	Indikator Kinerja (Indikator Gender)	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) : - Jumlah penumpang laki – laki dan perempuan dengan menggunakan sarana angkutan umum - Jumlah sarana dan prasarana transportasi persepktif gender - Jumlah pegawai ASN Dishub Perempuan yang menduduki jabatan	- Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD

2.2.7 Telaah Terhadap Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi

Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana,ozon, dan N2O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahariyang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global yang dapat meningkatnya suhu rata-rata bumi, pencairan es di kutub, perubahan iklim regional dan global, perubahan siklus hidup flora dan fauna. Kerusakan lapisan ozon, lapisan ozon yang berada di stratosfer (ketinggian 20-35 km) merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon (O3) terjadi secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer danbersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozonlebih cepat dari pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) selain berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi. Komitmen Pemprov Sumsel meningkatkan kontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen hingga 2020. Langkah nyata untuk mewujudkan komitmen tersebut dilakukan dengan mengkaji ulang dokumen rencana aksi daerah dan pemantauan evaluasi pelaporan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya ini melibatkan seluruh *stakeholder*, kaji ulang dan evaluasi RAD perlu dilakukan untuk menyesuaikan target pengurangan emisi dengan perkembangan signifikan di sektor transportasi.

Sampai saat ini, Pemprov Sumsel terus mengupayakan perbaikan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Ada tiga bidang yang menjadi sasaran utama, yakni sektor lahan yang terdiri atas pertanian dan lahan gambut, energi, transportasi, dan industri, dan pengelolaan limbah baik padat maupun cair. Proyeksi *Business as Usual* (BAU) Provinsi Sumsel tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi menunjukkan bidang berbasis lahan masih menempati porsi

penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 98,0596. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 1,8496 dan 0,11 persen dari total BAU 2020 di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tahun 2016, Sumatera Selatan telah berhasil menekan angka titik api sampai dengan 90 persen dan di 2017 tetap dapat dipertahankan walaupun sempat terjadi beberapa kebakaran kecil namun dapat segera ditanggulangi. Upaya inilah yang akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca sudah menjadi kebutuhan yang harus terus dilanjutkan. Hal ini akan menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target penurunan emisi. Target penurunan emisi Sumsel sendiri awalnya sebesar 10,16 persen di tahun 2020, kemudian disesuaikan di tahun 2030 sebesar 11,79 persen. Keberlanjutan rencana aksi tersebut telah didukung oleh regulasi Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, pada dasarnya peraturan ini mengatur keterlibatan seluruh pihak khususnya kabupaten/kota dan pihak swasta di Sumatera Selatan. Kondisi Emisi Gas Rumah Kaca dari empat sektor di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel II.75
Target Penurunan Emisi GRK (AKSARA) Sektor Transportasi

No	Sektor	Baseline (Ton CO2eq)					Perkiraan Penurunan Emisi Kumulatif (sd 2030)	
		Tahunan (2030)	Kumulatif		Inti	Pendukung	Ton CO2eq	Persen
1.	Energi dan Transportasi	14.664.196	209.246.468	2010-2030	6	9	1.264.441	0,60

Sumber : Hasil Analisis Pokja Kaji Ulang RAD GRK Provinsi Sumsel, 2017

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk menurunkan kinerja Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi melalui aktivitas sebagai berikut :

1. Pembinaan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan baku mutu lingkungan yang sudah ditetapkan;
2. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada daerah rawan kemacetan serta menggunakan teknologi pengaturan persimpangan dengan alat Automatic Traffic Control System (ATCS), sehingga dapat mengurai tundaan kendaraan per ruas jalan dan hal ini berdampak pada penguraian emisi CO_2 dari gas buang kendaraan dari epidemi ruas jalan/persimpangan;
3. Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi terhadap hasil kajian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai akibat bangkitan dan tarikan perjalanan dari pusat aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kemacetan;
4. Terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat dan pegawai ASN Pemprov. Sumsel untuk menggunakan transportasi umum yang ramah lingkungan, dengan kampanye naik LRT sebagai moda transportasi ramah lingkungan dan beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum;
5. Mendukung program penggunaan bahan bakar *eco green* yang saat ini dikembangkan oleh Pertamina, agar pelepasan dari pembakaran CO_2 lebih efektif dan ramah lingkungan jika dilepas di proses industry bukan melalui pembakaran gas buang kendaraan;
6. Ujicoba penerapan kebijakan penggunaan kendaraan dengan metode ganjil genap sebagai bentuk pengurangan mobilitas penduduk dengan menggunakan kendaraan pribadi.

2.2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah dan menjawab tantangan sektoral transportasi di Provinsi Sumatera Selatan, telah diidentifikasi sejumlah isu strategis yang relevan dengan kewenangan dan tugas Dinas Perhubungan. Isu-isu ini berangkat dari potensi, permasalahan aktual, serta dinamika lingkungan strategis baik secara global, nasional, maupun regional.

Pertama, rendahnya tingkat keselamatan transportasi masih menjadi tantangan utama. Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya fasilitas keselamatan seperti rambu, penerangan, marka jalan, fasilitas penyeberangan, serta sistem pengawasan di jalan provinsi dan kawasan sungai. Perilaku pengguna jalan yang belum sepenuhnya mencerminkan budaya tertib dan selamat turut memperburuk situasi. Isu ini sejalan dengan agenda global (SDGs) mengenai transportasi yang aman dan inklusif, serta RPJMN yang mendorong peningkatan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem, infrastruktur, dan budaya keselamatan transportasi secara berkelanjutan.

Kedua, layanan transportasi umum dan simpul transportasi masih menghadapi permasalahan dalam hal keterpaduan antar moda dan keterjangkauan layanan, khususnya di wilayah perdesaan dan hinterland. Transportasi publik yang belum menarik bagi masyarakat menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi. Kondisi ini berisiko memperburuk kemacetan, polusi, dan ketimpangan akses. Sejalan dengan prioritas nasional dan regional, diperlukan penguatan integrasi layanan transportasi serta perluasan aksesibilitas yang adil dan efisien.

Ketiga, dalam aspek kelembagaan, masih ditemukan kelemahan dalam tata kelola dan koordinasi sektor transportasi di tingkat daerah. Rendahnya kapasitas SDM, lemahnya fungsi pengawasan internal, dan kurang optimalnya pemanfaatan sistem digital menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola organisasi perangkat daerah (OPD) yang lebih adaptif, profesional, serta mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Ketiga isu strategis ini menjadi dasar penyusunan sasaran strategis Renstra Dinas Perhubungan, yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan transportasi provinsi;
2. Meningkatnya layanan transportasi publik dan simpul transportasi;
3. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah sektor transportasi.

Tabel II.76 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pengelolaan jaringan jalan provinsi, pelabuhan sungai, dan terminal	Rendahnya tingkat keselamatan transportasi provinsi akibat belum optimalnya sarana prasarana keselamatan serta rendahnya kesadaran perilaku pengguna jalan	Tingginya emisi sektor transportasi serta rendahnya kesadaran terhadap wawasan lingkungan	SDGs : Transportasi aman, inklusif dan berkelanjutan	RPJMN : Peningkatan keselamatan transportasi	Masih rendahnya tingkat keselamatan transportasi di sejumlah koridor jalan provinsi dan kawasan sungai di Sumatera Selatan akibat keterbatasan fasilitas pendukung dan serta lemahnya sistem pengawasan	Keselamatan Transportasi
Simpul Transportasi darat dan sungai (terminal, pelabuhan)	Layanan transportasi publik belum terintegrasi, tidak merata dan belum menarik bagi masyarakat	Kesenjangan aksesibilitas wilayah dan ketimpangan antar kelompok sosial	Agenda global: Transportasi inklusif dan terjangkau	RPJMN : Integrasi antar moda transportasi	Belum optimalnya konektivitas wilayah perdesaan dan kawasan hinterland	Pelayanan Transportasi
Kelembagaan dan manajemen transportasi daerah	Tata kelola organisasi dan koordinasi sektoral belum optimal	Perlunya integrasi perencanaan transportasi dan tata ruang	Global : Smart Governance & transport digitalization	Reformasi Birokrasi dan SPBE	Terbatasnya kepasitas sumber daya manusia serta lemahnya sistem pengawasan internal transportasi daerah	Penguatan kelembagaan serta perbaikan tata kelola sektor transportasi daerah

Tabel II.77
Identifikasi Isu Strategis Penyelenggaraan Urusan Transportasi
Berdasarkan Kewenangan

NO	KEWENANGAN	ISU STRATEGIS
A	Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
1.	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Jaringan LLAJ belum menyentuh sampai ke pelosok daerah
		Belum terealisasinya jaringan baru angkutan batu bara
2.	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Belum adanya prioritas pemasangan perlengkapan jalan terhadap daerah rawan kecelakaan
		Proporsional penurunan angka kecelakaan terhadap realisasi pemasangan perlengkapan jalan
3.	Pengelolaan terminal penumpang tipe B	Belum terpadunya jaringan lintas batas antar provinsi
		Belum optimalnya kinerja pelayanan di terminal type B
4.	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Belum terpadunya jaringan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
		Belum berjalannya evaluasi dan tindaklanjut atas manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan dengan LHR tinggi
5.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi	Belum terpadunya jaringan LLAJ dengan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Anda Lalin
6.	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi	Belum terpadunya jaringan antar moda transportasi
		Belum berjalannya tim terpadu audit dan inspeksi keselamatan LLAJ lintas stakeholders
7.	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Belum terpenuhinya kinerja SPM angkutan umum
		Belum optimalnya keterpaduan antar moda angkutan
		Masih rendahnya load factor angkutan
		Maraknya angkutan umum berbasis online
8.	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum adanya regulasi penetapan kawasan terintegrasi perkotaan sebagai kota peyanggah ibukota provinsi

NO	KEWENANGAN	ISU STRATEGIS
9.	Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Belum ditetapkannya kawasan aglomerasi perkotaan, salah satu potensial kawasan yaitu Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung
10.	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Standart Pelayanan Minimal menjadi Standart Pelayanan Prima
11.	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota / kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Adanya konsep Transit Oriented Development (TOD) pada salah satu terminal
12.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Izin trayek saat ini baru 25 trayek, belum mencakup 17 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
13.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum optimalnya pelayanan terminal sesuai dengan fungsinya
14	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum seluruhnya manajemen dan rekayasa persimpangan di jalan provinsi dengan penggunaan IT
B.	Sub Urusan Pelayaran	
1.	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten / kota dalam wilayah Daerah Provinsi	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
2.	Penertiban izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah Daerah Provinsi, pelabuhan antar Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
3.	Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan	Belum ditetapkannya trayek tetap dan teratur pada penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
4.	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan / atau jaringan jalur kereta api provinsi.	*Moda share* angkutan penyeberangan dengan angkutan jalan masih sangat rendah
5.	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	*Moda share* angkutan penyeberangan dengan angkutan jalan masih sangat rendah
6.	Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang

NO	KEWENANGAN	ISU STRATEGIS
	laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas	mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
7.	Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah Provinsi	*Moda share* angkutan penyeberangan dengan angkutan jalan masih sangat rendah
8.	Penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
9.	Pembangunan, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
10.	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Moda share angkutan sungai dengan angkutan jalan raya masih sangat rendah
11.	Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
12.	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
13.	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
14.	Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
15.	Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
16.	Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang

NO	KEWENANGAN	ISU STRATEGIS
		mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
C.	Sub Urusan Perkeretaapian	
1.	Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi	Rencana induk jaringan perkeretaapian belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur
2.	Penerbitan izin usaha, isin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten / kota	Tingginya biaya investasi pembangunan kereta api umum namun KPBU belum optimal dikarenakan dukungan jaminan atas risiko dari Pemerintah masih rendah
3.	Penetapan jaringan jalur kereta api uang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan jalur kereta api masih melihat pangsa pasar yang ada
4.	Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi	Penetapan kelas stasiun harus diikuti dengan pengembangan kawasan menjadi *Transit Oriented Development* (TOD) atau pun Kawasan Industri sehingga dapat meningkatkan kinerja *Land Value Capture*
5.	Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian unum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingginya biaya investasi pembangunan kereta api umum namun KPBU belum optimal dikarenakan dukungan jaminan atas risiko dari Pemerintah masih rendah
6.	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi	Moda share angkutan kereta api masih sangat rendah dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk jaringan pelayanan jarak dekat dan menengah
7.	Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Perekertaapian khusus masih harus diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya seperti integrasi pelabuhan, sehingga pengeluaran angkutan barang melalui moda transportasi kereta api lebih optimal (membangun dengan konsep *bundling* dengan moda transportasi lainnya)

2.2.9 Dukungan Lintas Sektoral

Sebagai bagian dari pembangunan transportasi yang berkelanjutan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen mendukung program lintas sektor yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah, antara lain:

1. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

mendukung konektivitas antara pusat produksi pertanian dengan pasar dan simpul transportasi untuk memperlancar distribusi hasil pangan, sehingga dapat menunjang ketahanan pangan dan stabilitas pasokan kebutuhan masyarakat.

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba
   Melalui penyelenggaraan transportasi yang aman, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam mendukung upaya pencegahan peredaran narkoba dengan meningkatkan pengawasan pada simpul dan jaringan transportasi serta memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum.
3. Kabupaten/Kota Sehat (KKS)
   Transportasi berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan sehat melalui pengendalian polusi udara dari kendaraan bermotor, peningkatan penggunaan angkutan umum ramah lingkungan, serta penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) untuk menekan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan.
4. Kota Layak Anak (KLA)
   Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mendorong tersedianya sarana transportasi yang ramah anak, termasuk penyediaan fasilitas keselamatan jalan (zebra cross, rambu, trotoar, dan halte aman), serta melaksanakan edukasi keselamatan lalu lintas sejak dini guna menumbuhkan budaya tertib lalu lintas.
5. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
   Dengan fokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menyediakan fasilitas transportasi yang inklusif dan aksesibel, seperti terminal, pelabuhan dan halte ramah kursi roda, guiding block, signage braille, informasi audio-visual, serta pelatihan petugas dalam memberikan layanan transportasi inklusif.
6. Pengarusutamaan Gender (PUG)
   Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mendukung terwujudnya kesetaraan gender dalam sektor

transportasi dengan memastikan akses dan manfaat layanan transportasi yang adil bagi perempuan dan laki-laki, termasuk penyediaan sarana transportasi publik yang aman bagi perempuan, fasilitas khusus (seperti ruang tunggu ramah perempuan dan anak), serta peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bidang transportasi.

7. Serta Program lainnya lintas sektoral yangterkait dengan bidang Perhubungan sesuai kewenangan Provinsi.

dishub_sumsel

BAB III

Tujuan, Sasaran & Arah Kebijakan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 – 2029

Penetapan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Orgaisasi Dinas Perhubungan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dokumen RPJMD.

Mendasari Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Perhubungan pada tahun 2025 – 2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPJMD dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi keempat RPJMD yaitu: “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.”, dapat dicapai melalui salah tujuan OPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan. Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2025- 2029 adalah “Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas”

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan OPD tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Rasio Konektivitas Transportasi, dimana Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Tahun 2024 capaian 0,629 Rasio;
2. V/C Rasio Jalan, dimana V/C Rasio Jalan Provinsi Tahun 2024 capaian 0.390 Rasio;
3. Rata-rata load factor penumpang angkutan umum, dimana rata – rata load factor penumpang angkutan umum Tahun 2024 capaian 70%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 - 2029, bahwa tujuan akhir RPJMD pada tahun 2029 yaitu ***Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua*** untuk sektor transportasi dengan *majunya infrastruktur transportasi Sumatera Selatan untuk pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas sehingga mempunyai daya saing daerah untuk pemerataan dan keseimbangan wilayah.*

Sasaran strategis pembangunan transportasi Sumatera Selatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program nomenklatur dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pembangunan sektor transportasi dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2023 - 2024 serta menjabarkan misi Kepala Daerah dalam RPJMD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis OPD Tahun 2025 - 2029 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini,

maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 (SS.1) Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi

Untuk mewujudkan tujuan :

1. Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Jalan untuk mengurangi kecelakaan
2. Meningkatkan Pemenuhan Pintu Perlintasan Sebidang
3. Meningkatkan Pemenuhan Sarana Angkutan Sungai yang memenuhi standar

Sasaran Strategis 1 (SS.2) Meningkatnya Layanan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan :

1. Meningkatnya Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Sumatera Selatan
2. Meningkatnya Penggunaan Moda Transportasi Umum
3. Meningkatnya Layanan Simpul Transportasi

Sasaran Strategis 3 (SS.3) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Renstra PD tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, yang dijabarkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective, costumer perspective, internal process perspective and leaming and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Stakeholders Perspective*

   Mencakup SS.1 dengan Indikator Kinerja Utama :

   - IKSS 1 Rasio Konektivitas Transportasi

   Mencakup SS.2 dengan Indikator Kinerja Utama :

   - IKSS 2 V/C Rasio

2. *Customer Perspective*

   Mencakup SS.3 dengan Indikator Kinerja Utama :

   - IKSS 3 Rata – rata load factor angkutan umum

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA BASELINE (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio	Rasio	0,392	0,390	0,388	0,385	0,383	0,382	0,381
				2. Rata – rata load factor angkutan umum	Persentase	70	71	71,5	72	72,5	73	73,5
			Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi	3. Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi	Persentase	97	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Layanan Transportasi	4. Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,630	0,634	0,660	0,685	0,710	0,735	0,760
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	5. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	94,67	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan Pemerintah Provinsi di Bidang Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 menjadi acuan dan pedoman Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025 – 2029. Tujuan dan sasaran Pembangunan Dinas Perhubungan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel III.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	DATA BASELINE	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,630	0,634	0,660	0,685	0,710	0,735	0,760
2.	V/C Rasio	Rasio	0,392	0,390	0,388	0,385	0,383	0,382	0,381
3.	Rata – rata load factor angkutan umum	Persentase	70	71	71,5	72	72,5	73	73,5

Tabel III.3
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	DATA BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	35	40	45	47	50	53	55	
4	Cakupan/Persentase Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	18	20	22	24	26	28	30	
5	Persentase sarana Angkutan Sungai yang memenuhi standar	%	48	50	51	52	53	54	55	
6	Persentase Trayek Angkutan Umum yang Terlayani	%	60	63	65	68	70	73	76	
7	Load Factor Angkutan Umum Darat (AKDP)	%	47	50	53	56	59	62	65	
8	Load Factor Angkutan Umum Sungai (Lintas Kab/Kota)	%	57	60	63	66	69	72	75	
9	Persentase Simpul Transportasi Kewenangan Provinsi yang sesuai Standar	%	70	72	73	74	75	76	77	
10	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase meningkatnya Pelayanan BLUD	%	100	100	100	100	100	100	100	

3.2 POHON KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disajikan dalam tabel pohon kinerja (pohon kinerja lengkap terlampir dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan) sebagai berikut :

Tabel III.4
Tabel Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

VISI RPJMD	:	Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua		
MISI 4 RPJMD	:	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan		
Tujuan OPD	:	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas		
Indikator Tujuan	:	Rasio Konektivitas	:	0.634 Rasio
		V/C Rasio Jalan Provinsi	:	0.390 Rasio
	:	Rata – rata Load Factor Penumpang Angkutan Umum	:	70 %

Sasaran Strategis	Intermediate Outcome 1	Intermediate Outcome 2
1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan keselamatan jalan yang sesuai standar	Tersedianya rencana keselamatan transportasi jalan yang terintegrasi
		Tersusunnya data lokasi rawan kecelakaan dan rekomendasi perlengkapan keselamatan
		Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi perlengkapan keselamatan jalan
		Terbitnya standar teknis dan spesifikasi perlengkapan keselamatan jalan
		Terlaksananya penganggaran prioritas untuk perlengkapan keselamatan
		Tersedianya data titik rawan kecelakaan dan kebutuhan perlengkapan keselamatan jalan berbasis hasil analisis lalu lintas
		Terlaksananya audit keselamatan jalan secara berkala terhadap ruas jalan provinsi
		Tersedianya sistem pengaturan dan pengendalian lalu lintas berbasis teknologi di kawasan prioritas

		Terbitnya jadwal operasional dan skema pengaturan lalu lintas pada hari atau jam tertentu di ruas padat lalu lintas
	Meningkatnya keterpenuhan fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang	Tersedianya rencana penyediaan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang
		Terbitnya standar teknis keselamatan perlintasan sebidang
		Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi petugas penjaga perlintasan
		Terlaksananya sosialisasi keselamatan pengguna jalan di sekitar perlintasan sebidang
		Terbitnya kemitraan dengan komunitas lokal untuk pengawasan dan pelaporan pelanggaran di perlintasan sebidang
		Tersedianya peta lokasi dan kebutuhan fasilitas keselamatan fisik pada perlintasan sebidang berbasis survei teknis
		Terbitnya pedoman teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang (rambu, palang, sinyal, marka)
		Terbitnya SOP pengaturan prioritas lalu lintas kereta api dan kendaraan di perlintasan sebidang
		Tersedianya sistem monitoring waktu tunggu dan volume lalu lintas di perlintasan sebidang
	Tersedianya sarana angkutan sungai yang memenuhi standar keselamatan	Terbitnya standar teknis keselamatan sarana angkutan sungai
		Tersedianya sistem sertifikasi dan uji kelayakan teknis angkutan sungai
		Tersedianya fasilitas tambat dan sarana keselamatan dermaga sesuai standar keselamatan pelayaran sungai
		Terbitnya dokumen hasil inspeksi dan audit keselamatan dermaga secara berkala
		Terbitnya regulasi teknis dan SOP operasional keselamatan bagi badan usaha pelayaran sungai

		Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan kelayakan kapal oleh petugas pengawas pelayaran secara periodik
		Tersedianya daftar kapal angkutan rakyat yang telah memenuhi standar keselamatan minimum
		Terlaksananya sosialisasi keselamatan dan pelatihan tanggap darurat bagi awak kapal dan pengguna jasa
2. Meningkatnya Layanan Transportasi	Meningkatnya konektivitas trayek angkutan antar wilayah dalam provinsi	Tersedianya rencana induk jaringan trayek angkutan umum antar wilayah dalam provinsi
		Tersusunnya basis data trayek eksisting, trayek prioritas, dan daerah tidak terlayani (blank spot)
		Terbitnya kebijakan pengembangan trayek angkutan antar wilayah berbasis kebutuhan dan konektivitas antar pusat kegiatan wilayah
		Tersedianya sistem informasi dan peta digital trayek angkutan umum provinsi
		Tersedianya forum koordinasi lintas kabupaten/kota dalam perencanaan trayek angkutan antar wilayah
		Terbitnya regulasi dan standar pelayanan minimum trayek antar wilayah
		Tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi konektivitas trayek secara periodik
		Terbitnya regulasi dan zonasi operasional angkutan barang untuk mendukung kelancaran dan keselamatan lalu lintas
	Meningkatnya penggunaan moda transportasi umum	Terbitnya kebijakan tarif yang kompetitif dan regulasi subsidi angkutan umum
		Tersedianya sistem informasi layanan angkutan umum berbasis digital
		Terbitnya standar pelayanan minimum (SPM) angkutan umum provinsi
		Tersedianya kampanye publik edukatif dan promosi penggunaan angkutan umum

		Tersedianya program insentif bagi operator yang menjaga tingkat keterisian (load factor) tertentu
		Tersedianya hasil evaluasi berkala terhadap trayek, kepadatan, dan perilaku pengguna
		Tersedianya sistem pengaduan dan respon cepat terkait pelayanan angkutan umum
	Meningkatnya Layanan Simpul Transportasi	Tersedianya rencana induk pengembangan terminal penumpang tipe B
		Terbitnya standar pelayanan minimum terminal penumpang
		Tersedianya sistem manajemen operasional terminal penumpang berbasis digital
		Terbitnya regulasi operasional dan jadwal layanan terminal penumpang
		Tersedianya sistem pengaduan dan pemantauan kepuasan pengguna terminal
		Terbitnya izin pengelolaan terminal sesuai ketentuan perundang-undangan
		Terbitnya perjanjian kerja sama pengelolaan terminal dengan pelaku usaha
		Tersedianya rencana induk pengembangan pelabuhan pengumpan regional
		Terbitnya standar pelayanan minimum pelabuhan pengumpan regional
		Tersedianya sistem manajemen jadwal dan sandar kapal berbasis digital
		Terbitnya regulasi operasional pelabuhan pengumpan regional
		Tersedianya sistem pemantauan Berth Occupancy Ratio (BOR) dermaga
		Terbitnya izin pengelolaan pelabuhan pengumpan sesuai ketentuan
		Terbitnya skema kemitraan pengelolaan pelabuhan dengan sektor swasta

		Terlaksananya pengaturan jadwal operasional dan sandar kapal secara tepat waktu di pelabuhan penyeberangan
		Tersedianya sistem pemantauan real-time lalu lintas penumpang dan kendaraan di pelabuhan
		Tersedianya sistem administrasi pelaporan dan dokumentasi operasional pelabuhan secara digital dan tepat waktu
		Terbitnya laporan evaluasi pelayanan pelabuhan secara berkala sebagai dasar peningkatan kinerja layanan
	Meningkatnya layanan transportasi perkeretaapian	Tersedianya jadwal perjalanan kereta api komuter yang terintegrasi dengan moda lanjutan di Stasiun Indralaya
		Terlaksananya pemantauan keselamatan operasional dan penumpang di lingkungan Stasiun Indralaya secara rutin
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata kelola perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah	Tersedianya sistem informasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah
		Terbitnya pedoman teknis perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja
		Tersedianya indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung yang terdokumentasi dan terukur
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan dan penganggaran berbasis digital
		Terbitnya pedoman teknis penganggaran berbasis kinerja dan prioritas pembangunan daerah
		Tersedianya laporan keuangan berkala yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)
		Terbitnya kebijakan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan penganggaran
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi manajemen kepegawaian terintegrasi
		Terbitnya pedoman pengelolaan kepegawaian berbasis merit sistem

		Tersedianya peta jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah yang mutakhir
		Tersedianya sistem evaluasi kinerja pegawai yang terukur dan terstandar
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah	Tersedianya sistem informasi pengelolaan BMD yang terintegrasi antar perangkat daerah
		Terbitnya pedoman teknis dan SOP pengelolaan BMD sesuai ketentuan perundang-undangan
		Tersedianya hasil inventarisasi dan penilaian ulang BMD secara berkala
	Meningkatnya Pelayanan BLUD	Tersedianya sistem informasi manajemen keuangan dan layanan BLUD yang terintegrasi
		Tersedianya mekanisme evaluasi kinerja BLUD secara berkala dan transparan
		ersedianya program peningkatan kapasitas manajerial dan teknis SDM BLUD

	Program Nomenklatur Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 sebagai berikut :
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

Tabel III.5
Meta Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		FORMULASI	META INDIKATOR
IKU.1	Rasio Konektivitas Transportasi	*Rasio Konektivitas = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)* • IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi) *Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)*	• Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0,5 • Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30). 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50). 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot

			angkutan jalan = 70). 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).
IKU.2	V/C Rasio	Volume per Capacity (V/C) Ratio Jalan Provinsi : $\frac{\sum(VC1 + \cdots . + VC73)}{73}$ Dimana : Volume kendaraan = Jumlah perhitungan kendaraan (emp/smp) pada satu ruas jalan per satuan waktu pengamatan Capacity = C = Co x Fcw x FCsp x FCsf Dimana : C : Kapasitas Co : Kapasitas Dasar FCw : Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas FCsp : Faktor penyesuaian pemisahan arah FCsf : Faktor penyesuaian hambatan samping	Ruas Jalan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tentang Penetapan Ruas – Ruas Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2 (sebanyak 88 ruas jalan dengan panjang 1.779,27 KM)
IKU.3	Rata – rata load factor angkutan umum	Load Factor = Jumlah Penumpang dalam 1 (satu) tahun layanan/ kapasitas daya angkut x 100% LF_{AKDP} = Jumlah Penumpang AKDP dalam 1	Jumlah Penumpang Bus AKDP merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 25 trayek AKDP eksisting

		(satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100% LF_S = Jumlah Penumpang Angkutan Sungai dalam 1(satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100% LF_P = Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan dalam 1 (satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100% Rata – rata load factor angkutan umum = LF_{AKDP} + LFs + LF_P / jumlah moda Dimana : LF_{AKDP} = Load Factor penumpang AKDP LF_S = Load Factor penumpang angkutan sungai LF_P = Load Factor penumpang angkutan penyeberangan	Jumlah Penumpang Angkutan Sungai merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 29 lintasan eksisting Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 1 lintasan eksisting

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Renstra Sektor Perhubungan pada periode tahun 2025–2029 merupakan pendekatan dalam memecahkan isu permasalahan, tantangan, peluang, serta hambatan yang dihadapi sektor transportasi, dalam skala prioritas yang perlu segera ditangani pada kurun waktu 2025–2029. Strategi dan arah kebijakan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD, serta mendukung sasaran strategis sektor perhubungan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Strategi dan arah kebijakan ini memuat langkah konkret berupa program, kegiatan, dan sub-kegiatan sektoral maupun lintas sektor, yang bersifat indikatif dalam menjawab permasalahan transportasi seperti rendahnya tingkat keselamatan, terbatasnya konektivitas antarwilayah, menurunnya kinerja jalan, rendahnya penggunaan angkutan umum, serta belum optimalnya pelayanan transportasi publik.

Program dan kegiatan tersebut disusun untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Renstra sektor perhubungan tahun 2025–2029 secara efektif dan efisien, serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan transportasi yang berkelanjutan, aman, terintegrasi, dan inklusif. Sebagai bagian dari sistem mobilitas masyarakat dan logistik daerah, sektor perhubungan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan mendukung sektor-sektor prioritas lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan arah kebijakan Renstra Perhubungan Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan organisasi dirumuskan sebagai berikut:

Tabel III.6

Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Jangka Menengah Pelayanan PD

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ISU STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
							2025	2026	2027	2028	2029
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio	Menurunnya kinerja jaringan jalan akibat kemacetan	Pengendalian V/C Ratio dan manajemen lalu lintas	Survei dan evaluasi kapasitas ruas jalan	Peningkatan kapasitas dan manajemen lalu lintas	Implementasi pengendalian lalu lintas berbasis ITS	Penataan ruang dan jalur kendaraan berat	Optimalisasi peran jalan alternatif
				2. Rata – rata load factor angkutan umum	Rendahnya tingkat keterisian angkutan umum	Revitalisasi angkutan umum	Pemetaan potensi dan trayek prioritas	Pengadaan Angkutan Perintis	Revitalisasi rute dan manajemen trayek	Promosi dan insentif penggunaan angkutan umum	Evaluasi load factor dan sistem subsidi
			Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi	3.Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi	Masih rendahnya tingkat keselamatan transportasi provinsi	Penanganan titik rawan kecelakaan dan keselamatan	Identifikasi dan pemetaan titik rawan kecelakaan	Pembangunan dan penyediaan sarana keselamatan transportasi (rambu dan marka jalan)	Pelatihan pengemudi dan sosialisasi keselamatan	Penegakan hukum dan pengawasan keselamatan transportasi	Evaluasi dan penguatan sistem keselamatan transportasi daerah

			Meningkatnya Layanan Transportasi	4.Rasio Konektivitas Transportasi	Rendahnya tingkat konektivitas antarwilayah	Penguatan simpul transportasi	Identifikasi missing link dan simpul prioritas	Sinkronisasi perencanaan konektivitas dengan kab / kota	Pembangunan jaringan konektivitas strategis berbasis data	Integrasi jaringan moda darat dan laut	Evaluasi dan pemutakhiran konektivitas wilayah
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	5.Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja layanan transportasi belum optimal	Digitalisasi dan peningkatan layanan public transportasi	Penetapan Indikator Layanan Minimum	Digitalisasi data dan Sistem informasi transportasi	Penguatan Sistem Pengaduan dan Monev layanan	Perlibatan masyarakat dalam penilaian layanan	Evaluasi kinerja dan reformasi kelembagaan
				6. Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Belum terpasangnya Perlengkapan Jalan Provinsi sesuai kondisi ideal	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 5%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 2%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 3%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 3%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 2%
				7. Cakupan / Persentase Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Belum optimalnya fasilitas keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Sosialisasi Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Penyusunan Dokumen Inventarisasi Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Sertifikasi Kompetensi SDM Penjaga Pintu Perlintasan Sebidang	Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi

				8. Persentase sarana Angkutan Sungai yang memenuhi standar	Belum optimalnya konektivitas angkutan umum di Sumatera Selatan	Mendorong penyediaan angkutan umum pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Umum pada Daerah yang belum terlayani
				9. Persentase Trayek Angkutan Umum yang Terlayani	Belum optimalnya penggunaan angkutan umum Darat	Optimalisasi Penggunaan Angkutan Umum Darat	Survei Load Factor Angkutan Umum	Survei Inventarisasi Angkutan Umum	Survei Interview pada Masyarakat dan melakukan pemetaan Demand Angkutan Umum	Mendorong penggunaan angkutan umum darat dengan analisa harga dan kebutuhan armada	Mendorong penggunaan angkutan umum dengan peningkatan fasilitas
				10. Load Factor Angkutan Umum Darat (AKDP)	Belum optimalnya angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Sumatera Selatan	Optimalisasi Penggunaan Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan	Survei Load Factor Angkutan Sungai danau dan penyeberangan	Survei Inventarisasi Angkutan Sungai danau dan penyeberangan	Survei Interview pada Masyarakat terkait keselamatan perjalanan	Optimalisasi Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai danau dan penyeberangan	Mendorong penggunaan angkutan sungai danau dan penyeberangan dengan peningkatan keselamatan dan penertiban izin operasi
				11. Load Factor Angkutan Umum Sungai (Lintas Kab/Kota)	Belum terpenuhinya simpul transportasi kewenangan provinsi yang sesuai standar	Mendorong peningkatan kualitas simpul transportasi yang sesuai standar	Survei Inventarisasi simpul	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar

					Belum optimalnya infrastruktur batubara	Mendorong percepatan jalan khusus sesuai aturan dan percepatan operasional alur sungai musi 24 jam	Pengawasan ODOL	Survey Alur Sungai Musi	Penyusunan DED terkait alur sungai musi 24 jam	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam
					Belum Optimalnya transportasi multimoda	Optimalisasi transportasi multimoda	Melaksanakan pemetaan terminal integrasi dan terminal multimoda	Melaksanakan evaluasi terhadap fasilitas integrasi pada simpul	Pembahasan Rencana Pebaikan Fasilitas Integrasi dan Multimoda bersama Stakeholder	Mendorong Rencana Pebaikan Fasilitas Integrasi dan Multimoda bersama Stakeholder	Penyusunan DED terkait Integrasi dan Multimoda
					Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat	Mendukung Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat	Mendukung pemenuhan dokumen administrasi, dokumen teknis dan sertifikasi lahan	Mendukung pemenuhan dokumen administrasi, dokumen teknis dan sertifikasi lahan	Mendukung penyiapan berbagai dokumen dan fasilitasi, baik pembangunan fisik pelabuhan maupun operasional	Mendukung pembangunan fisik New Palembang Port Tanjung Carat	Mendukung pembangunan fisik New Palembang Port Tanjung Carat
					Belum Optimalnya pengawasan angkutan barang	Optimalisasi Pengawasan Angkutan Barang	Pengawasan ODOL	Pengawasan ODOL	Pengawasan ODOL	Pengawasan ODOL	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Barang

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan sector transportasi di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk berbagai tantangan seperti rendahnya konektivitas antarwilayah, belum optimalnya sarana dan prasarana keselamatan, serta rendahnya kesadaran perilaku pengguna jalan, maka diperlukan perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi jangka menengah pelayanan perhubungan yang responsif gender untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan transportasi memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki - laki

1. Isu Strategis
   a. Menurunnya kinerja jaringan jalan akibat kemacetan
      ➡Kemacetan jalan menurunkan kenyamanan dan keamanan perjalanan, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan.
   b. Rendahnya tingkat keterisian angkutan umum
      ➡Layanan angkutan umum belum aman dan nyaman bagi perempuan serta kelompok rentan, sehingga tingkat penggunaannya rendah.
   c. Masih rendahnya tingkat keselamatan transportasi provinsi
      ➡Keselamatan transportasi belum memperhatikan kebutuhan keamanan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
   d. Rendahnya tingkat konektivitas antarwilayah
      ➡Konektivitas antarwilayah belum menjamin akses transportasi yang setara bagi perempuan dan kelompok rentan.
   e. Kinerja layanan transportasi belum optimal
      ➡Layanan transportasi belum sepenuhnya ramah dan aman bagi perempuan dan kelompok rentan.
   f. Belum terpasangnya perlengkapan jalan provinsi sesuai kondisi ideal
      ➡Perlengkapan jalan belum memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan bagi perempuan serta kelompok rentan.
   g. Belum optimalnya fasilitas keselamatan pada perlintasan kereta api di jalan provinsi
      ➡Fasilitas keselamatan di perlintasan kereta api belum aman dan mudah diakses oleh perempuan dan kelompok rentan.
   h. Belum optimalnya konektivitas angkutan umum di Sumatera Selatan
      ➡Konektivitas angkutan umum belum mendukung mobilitas perempuan dan kelompok rentan secara aman dan nyaman.

i. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum darat

➡Angkutan umum darat belum menyediakan layanan yang aman dan nyaman bagi perempuan serta kelompok rentan.

j. Belum optimalnya angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di Sumatera Selatan

➡Layanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan belum ramah gender dan belum memperhatikan keamanan seluruh pengguna.

k. Belum terpenuhinya simpul transportasi kewenangan provinsi yang sesuai standar

➡Simpul transportasi belum memenuhi standar layanan yang aman, nyaman, dan mudah diakses bagi perempuan dan kelompok rentan.

2.Arah Kebijakan

a. Pengendalian V/C Ratio dan manajemen lalu lintas

➡ Dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan mobilitas yang aman dan nyaman bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

b. Revitalisasi angkutan umum

➡ Dilakukan agar layanan angkutan umum menjadi lebih aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan serta kelompok rentan.

c. Penanganan titik rawan kecelakaan dan keselamatan

➡Menitikberatkan pada peningkatan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan, terutama perempuan dan anak.

d. Penguatan simpul transportasi

➡Dikembangkan dengan memperhatikan aksesibilitas dan keamanan bagi perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

e. Digitalisasi dan peningkatan layanan publik transportasi

➡Mendorong sistem layanan yang mudah diakses, informatif, dan aman bagi seluruh kelompok pengguna, termasuk perempuan.

f. Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi

➡Dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memperhatikan keamanan pengguna perempuan dan kelompok rentan, seperti penerangan dan rambu jelas.

g. Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi

➡Disiapkan untuk menjamin keamanan seluruh pengguna jalan, terutama perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

h. Mendorong penyediaan angkutan umum pada daerah yang belum terlayani

➡Dilakukan agar perempuan dan kelompok rentan di wilayah terpencil memiliki akses transportasi yang aman dan terjangkau.

i. Optimalisasi penggunaan angkutan umum darat

➡Didorong melalui peningkatan kenyamanan, keamanan, dan rasa aman bagi perempuan serta kelompok rentan.

j. Optimalisasi penggunaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

➡Ditingkatkan agar sarana dan prasarana lebih ramah gender, mudah diakses, dan aman bagi semua pengguna.

k. Mendorong peningkatan kualitas simpul transportasi yang sesuai standar

➡Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan akses yang setara bagi perempuan dan kelompok rentan.

3. Strategi

a. Menurunnya kinerja jaringan jalan akibat kemacetan

Strategi responsif gender:

- Mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk memastikan keamanan bagi pengguna jalan perempuan, anak, dan lansia.
- Menyediakan fasilitas pendukung seperti penerangan jalan dan area aman di titik kemacetan agar lebih ramah bagi kelompok rentan.

b. Rendahnya tingkat keterisian angkutan umum

Strategi responsif gender:

- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan angkutan umum dengan penyediaan CCTV, penerangan cukup, dan pelatihan sopir terkait pelayanan inklusif.

- Menyusun jadwal dan trayek yang mempertimbangkan kebutuhan mobilitas perempuan (seperti jam antar jemput anak atau perjalanan ke pasar).

c. Masih rendahnya tingkat keselamatan transportasi provinsi.

Strategi responsif gender:

- Menerapkan program keselamatan transportasi yang mempertimbangkan risiko berbeda antara laki-laki dan perempuan.
- Melibatkan perempuan dalam forum keselamatan lalu lintas dan pelatihan pengemudi berperspektif gender.

d.Rendahnya tingkat konektivitas antarwilayah

Strategi responsif gender:

- Merancang sistem transportasi antarwilayah yang menjamin akses bagi seluruh kelompok, termasuk perempuan di daerah terpencil.
- Mendorong integrasi moda transportasi dengan fasilitas publik yang sering digunakan oleh perempuan (pasar, sekolah, puskesmas).

e. Kinerja layanan transportasi belum optimal

Strategi responsif gender:

- Melibatkan perempuan dalam survei kepuasan pengguna transportasi untuk memperbaiki kualitas layanan.
- Mengembangkan standar pelayanan minimal (SPM) yang memuat indikator ramah gender dan inklusif.

f. Belum terpasangnya perlengkapan jalan provinsi sesuai kondisi ideal

Strategi responsif gender:

- Memastikan rambu, marka, dan penerangan jalan dirancang dengan mempertimbangkan keamanan perempuan dan penyandang disabilitas.
- Melibatkan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, dalam pemetaan titik rawan jalan.

g. Belum optimalnya fasilitas keselamatan pada perlintasan kereta api di jalan provinsi

Strategi responsif gender:

- Menyediakan fasilitas keselamatan seperti zebra cross, penerangan, dan rambu yang ramah bagi pengguna perempuan dan anak-anak.
- Memberikan pelatihan kepada penjaga perlintasan tentang pelayanan berperspektif gender dan kelompok rentan.

h. Belum optimalnya konektivitas angkutan umum di Sumatera Selatan

Strategi responsif gender:

- Mengintegrasikan trayek angkutan umum yang menjangkau pusat kegiatan perempuan seperti sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan.
- Menyusun kebijakan tarif dan waktu operasional yang mempertimbangkan kebutuhan mobilitas perempuan pekerja informal.

i. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum darat

Strategi responsif gender:

- Meningkatkan kenyamanan dan keamanan angkutan darat dengan ruang aman bagi perempuan dan fasilitas ramah disabilitas.
- Kampanye “Naik Angkutan Umum Aman untuk Semua” dengan pesan kesetaraan gender dan keselamatan.

j. Belum optimalnya angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di Sumatera Selatan

Strategi responsif gender:

- Menyediakan sarana keselamatan (jaket pelampung, akses tangga aman) yang sesuai kebutuhan perempuan dan anak.
- Memastikan fasilitas penyeberangan (toilet, ruang tunggu) ramah gender dan aksesibel bagi kelompok rentan.

k. Belum terpenuhinya simpul transportasi kewenangan provinsi yang sesuai standar

Strategi responsif gender:

- Mendesain simpul transportasi (terminal, pelabuhan) dengan fasilitas aman seperti ruang tunggu khusus perempuan dan penerangan memadai.
- Melibatkan organisasi perempuan dalam perencanaan dan pengawasan standar pelayanan simpul transportasi.

Hubungan kinerja pembangunan mulai dari tujuan, sasaran strategis, sasaran kinerja intermediate outcomes, output, input, outcomes, impact menggambarkan suatu hubungan hierarki yang saling keterkaitan dan berkesinambungan dan dapat digambarkan pada arsitektur kinerja pembangunan daerah sebagai berikut :

Gambar III.1

Konsep Hubungan RPJMD dan Renstra

3.4 Manajemen Pengelolaan Risiko

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negative terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sementara manajemen risiko merupakan budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedure dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko serta pemantauan dan reviu, sehingga proses dimaksud digambarkan sebagai berikut :

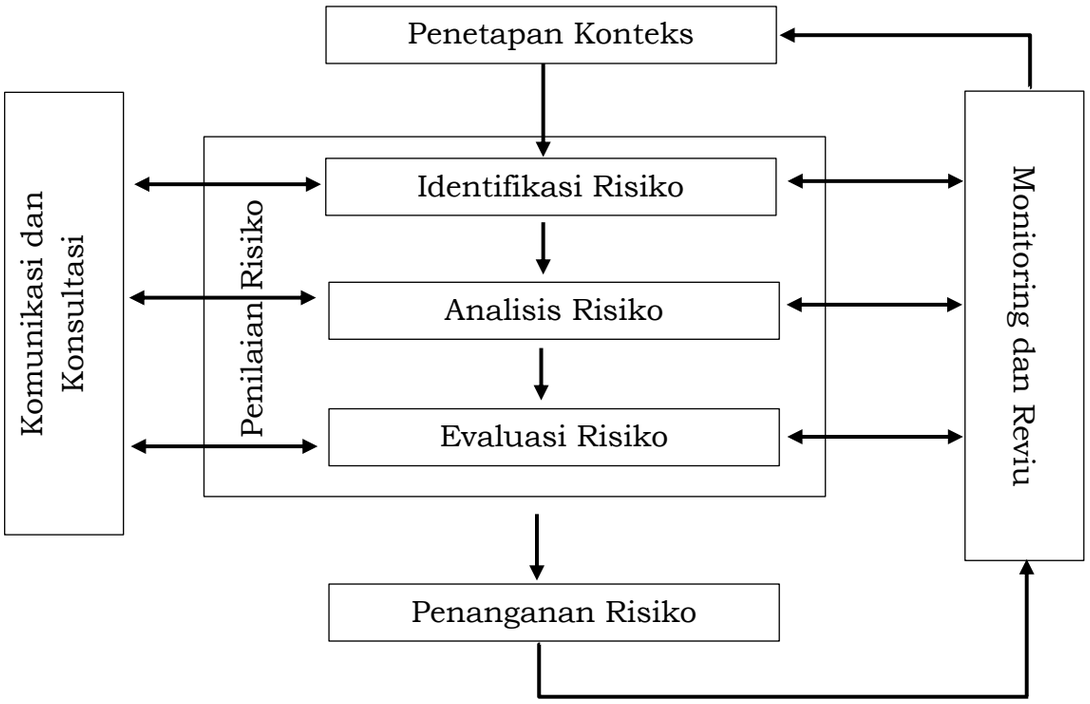

Gambar III.2

Proses Manajemen Risiko

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sektor perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025–2029, diperlukan identifikasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi menghambat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan strategis. Risiko strategis adalah potensi terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat memengaruhi pencapaian kinerja organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam jangka menengah.

1. Risiko Strategis

Identifikasi risiko strategis dilakukan sebagai bentuk upaya preventif dan responsif guna meningkatkan ketahanan pelaksanaan program perhubungan terhadap dinamika lingkungan internal maupun eksternal, seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian kebijakan antar level pemerintahan, perubahan regulasi, kondisi infrastruktur, serta partisipasi pemangku kepentingan.

Risiko-risiko yang diidentifikasi disusun berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran Renstra, dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dan strategi pengendalian

atau mitigasi yang dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor perhubungan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat akuntabilitas kinerja pembangunan transportasi daerah.

Tabel III.7

Risiko Strategis Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Resiko Strategis	Dampak	Upaya Mitigasi / Pengendalian
Meningkatnya Pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi	1.Keterbatasan Anggaran untuk pengadaan perlengkapan keselamatan dan rekayasa lalu lintas 2.Kurangnya kesadaran pengguna moda transportasi terhadap keselamatan	1. Tingginya angka kecelakaan 2. Citra buruk transportasi daerah	1. Prioritas anggaran untuk program keselamatan 2. Edukasi dan sosialisasi keselamatan secara massif 3.Penerapan teknologi (CCTV, ATCS dsb)
	Meningkatnya Layanan Transportasi	1.Ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan layanan yang disediakan 2.Terbatasnya armada dan sarana prasarana yang memadai	1. Rendahnya penggunaan transportasi umum 2. Ketidakpuasan masyarakat	1. Survei Kepuasan dan kebutuhan secara berkala 2. Revitalisasi sarana dan prasarana transportasi 3. Integrasi moda transportasi
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	1. Kinerja SDM belum optimal 2. Sistem Pelaporan dan perencanaan belum optimal	1. Lemahnya akuntabilitas dan efektivitas program 2. Lambatnya proses perencanaan dan pengambilan keputusan	1.Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan 2. Optimalisasi Sistem perencanaan dan pelaporan 3. Monitoring dan evaluasi berkala

2. Risiko Operasional

Dalam penyelenggaraan sistem transportasi, risiko operasional merupakan potensi gangguan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang bersifat teknis maupun administratif. Risiko ini dapat berdampak pada terganggunya kelancaran layanan transportasi, menurunnya keselamatan dan kenyamanan pengguna, serta kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan transportasi.

Risiko operasional pada sektor transportasi dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti keterbatasan armada atau infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana, kesalahan prosedur kerja, hingga keterbatasan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan. Selain itu, gangguan cuaca, kondisi geografis yang sulit, serta lemahnya sistem informasi dan pengendalian operasional turut memperbesar potensi terjadinya insiden.

Untuk meminimalkan dampak risiko operasional, perlu dilakukan upaya identifikasi dini, penetapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, serta peningkatan kapasitas personel operasional. Selain itu, penting untuk memastikan ketersediaan anggaran pemeliharaan rutin, penguatan sistem pemantauan dan pengendalian, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan gangguan transportasi.

Dengan pengelolaan risiko operasional yang baik, sektor transportasi diharapkan mampu memberikan layanan yang aman, handal, dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kelancaran konektivitas antarwilayah.

Tabel III.8

Risiko Operasional Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Resiko Operasional	Dampak	Upaya Mitigasi/ Pengendalian
Meningkatnya Pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi	1.Minimnya Perlengkapan Jalan 2.Minimnya palang pintu pada perlintasan sebidang dan petugas 3.Minimnya perlindungan keselamatan jiwa pengguna jasa angkutan sungai	1. Meningkatnya resiko kecelakaan 2. Penurunan kualitas keselamatan	1.Penyediaan perlengkapan jalan keselamatan 2. Penempatan petugas jaga 3.Pengadaan Alat Keselamatan Sungai
	Meningkatnya Layanan Transportasi	1.Armada tidak menjangkau wilayah terpencil 2.Pelaksanaan subsidi angkutan lambat	1. Masyarakat tidak terlayani 2. Ketergantungan pada kendaraan pribasi	1. Penyediaan angkutan perintis 2. Penyusunan peta trayek dan evaluasi load factor
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	1. Kurangnya SDM yang Kompoten	1. Penurunan akuntabilitas dan kinerja organisasi	1.Pelatihan rutin SDM perencanaan, keuangan, dan pealporan2 2. Optimalisasi Sistem perencanaan dan pelaporan 3. Monitoring dan evaluasi berkala

dishub_sumsel

BAB IV

Program, Kegiatan, Subkegiatan, & Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Penyusunan program ini meliputi penetapan program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, serta pagu indikatif sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah.

Indikasi program berfungsi sebagai arah prioritas pembangunan sektor perhubungan untuk periode 2025–2029, sedangkan pagu indikatif mencerminkan estimasi kebutuhan pendanaan yang akan dialokasikan guna menjamin keberlangsungan program. Dengan demikian, perangkat daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, dan terukur.

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR

Untuk mencapai tujuan strategis pembangunan sektor perhubungan, ditetapkan beberapa program utama sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan dasar bagi keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, kepegawaian, dan aset, program ini memastikan perangkat daerah mampu menjalankan fungsi strategisnya secara optimal. Penyediaan sarana dan prasarana kantor, pemeliharaan barang milik daerah, serta dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi

pilar untuk meningkatkan profesionalitas aparatur serta kualitas layanan publik. Dengan dukungan program ini, penyelenggaraan urusan transportasi dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdaya guna.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang tertib, aman, dan nyaman. Fokus kegiatan mencakup penetapan dan pengendalian rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, serta pengelolaan dan pengembangan terminal tipe B. Program ini juga mengedepankan manajemen dan rekayasa lalu lintas, forum lalu lintas dan angkutan jalan, serta audit keselamatan. Selain itu, penyediaan, pengendalian, dan pengawasan angkutan umum dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan penumpang. Dengan implementasi program ini, diharapkan tercipta kelancaran arus lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang berkualitas di wilayah provinsi.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran dilaksanakan untuk memperkuat konektivitas maritim melalui pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan pelabuhan serta penataan badan usaha jasa kepelabuhanan. Program ini meliputi penyusunan dan penetapan rencana induk pelabuhan, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan pengumpan regional, hingga pengembangan pelabuhan sungai dan danau. Selain itu, pemberian izin usaha jasa terkait dan fasilitasi perizinan secara elektronik dilakukan guna mendukung iklim usaha kepelabuhanan yang sehat. Pengawasan terhadap badan usaha pelabuhan turut dijalankan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa, serta memperkokoh peran transportasi air sebagai penunjang ekonomi daerah.

4. Program Perkeretaapian

Program Perkeretaapian berfokus pada pengembangan sistem transportasi massal yang berdaya saing, efisien, dan ramah lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penetapan jaringan jalur kereta api kewenangan provinsi, penetapan jaringan pelayanan

perkeretaapian, serta sosialisasi dan uji coba kebijakan jaringan perkeretaapian. Di samping itu, program ini juga mencakup penerbitan izin pembangunan dan operasi perkeretaapian khusus serta fasilitasi perizinan melalui sistem elektronik. Implementasi program ini diharapkan mampu memperluas aksesibilitas, memperlancar mobilitas barang dan penumpang, serta mendorong integrasi antar moda transportasi di tingkat provinsi.

Dengan adanya keempat program utama tersebut, arah pembangunan sektor perhubungan diharapkan dapat berjalan secara lebih terukur dan terintegrasi. Untuk mewujudkan pembangunan sektor perhubungan secara sistematis, tujuan dan sasaran strategis dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Struktur ini dirancang agar setiap langkah pembangunan transportasi dapat terukur, berjenjang, serta memiliki keterkaitan langsung antara kebijakan makro dan implementasinya di lapangan.

Tujuan pembangunan perhubungan menjadi dasar bagi pencapaian sasaran, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program utama. Program-program tersebut selanjutnya dijabarkan secara rinci ke dalam kegiatan dan sub-kegiatan, yang dapat diukur melalui indikator kinerja dan dievaluasi pencapaiannya setiap tahun.

Secara lebih jelas, hubungan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

TABEL 4.1
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	**Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas** **INDIKATOR :** **1). Waktu Tempuh Jalan Provinsi (km/jam)** **2). V/C Rasio Jalan** **3).Rata-Rata Load Factor Penumpang Angkutan Umum**	**Meningkatnya Kemantapan jalan Provinsi (CROSS CUTTING)** **Indikator** **(1). Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)** **(2). Persentase Jembatan Dengan Kondisi Mantap (%)**					
1. Rasio Konektivitas Transportasi		**Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi** **Indikator :** **Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi**	**Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan** **Indikator :** **Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	
2). V/C Rasio Jalan						**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	
3).Rata-Rata Load Factor Penumpang Angkutan Umum				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
				Terbangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Peningkatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan PemenuhanPersyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	
				Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
				Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	
				Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
				Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
				Terbangunnya Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	
				Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	
				Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
						Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
				Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu)Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
						Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
				Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	
				Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	
			Meningkatnya Kelengkapan Perlintasan Sebidang Jalan dan Kereta Api **Indikator :** **Cakupan/Persentase Perlintasan Kereta Api yang Ditangani**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	
						Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	
				Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	
				Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	
						Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	
						Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersusunnya Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	
						Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	
				Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi yang ditetapkan	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	
						Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	
						Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan jalur Perkeretaapian Provinsi	
				Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian padaJaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	
						Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	
				Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi yang disediakan	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi yang dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya Sarana Angkutan Sungai yang memenuhi Standar Keselamatan **Indikator :** **Persentase sarana Angkutan Sungai yang memenuhi standar**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	
				Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat perizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi Syarat Perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan ProvinsI	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	
						Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten / Kota	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	
						Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi	
				Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / Kota	Pengendaliandan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / Kota	
				Tersedianya PelabuhanSungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi	
						Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yangelayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	
				Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil dibidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
				Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Meningkatnya Layanan Transportasi **Indikator :** **Rasio Konektivitas Transportasi**	**Meningkatnya Konektivitas Transportasi Provinsi** **Indikator :** **Persentase Trayek Angkutan Umum yang Terlayani**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	
						Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
						Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaanyang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
						Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu)Daerah Kabupaten / Kota	
				Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar kota Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar kota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar kota Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	
						Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupatendalam1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Perumusan Kebijakan Rencana UmumJaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	
						Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
				Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	
				Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat perizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi Syarat Perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan ProvinsI	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	
						Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	
				Tersedianya Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronikyang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	
						Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut PelayaranRakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	
				Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya Penggunan Moda Transportasi Umum Indikator : 1). Load Factor Angkutan Umum Darat (AKDP) 2). Load Factor Angkutan Umum Sungai (Lintas Kab/Kota)			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	
				Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang dilaksanakan	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaanjalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia	
				Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang dilaksanakan	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
						Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan / atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	
				Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan / atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	
						Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
				Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi	
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
						Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi, angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha JasaTerkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa PengurusanTransportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha JasaTerkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	
						Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah	
				Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tarif angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah	
			Meningkatnya Layanan Simpul Transportasi Indikator : Persentase Simpul Transportasi Kewenangan Provinsi yang sesuai Standar			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	
						Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersusunnya Rencana PembangunanTerminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Penyusunan Rencana PembangunanTerminal Penumpang Tipe B	
				Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	
				TerlaksananyaRevitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	JumlahTerminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	
				Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe B	
				Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
						Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan RegionaL	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	
						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	
						Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	
						Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	
						Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	
						Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	
						Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	
						Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR / DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	
						Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Terlaksananya penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Jumlah Laporan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional yang dilaksanakan	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	
						Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	
				Terlaksananya penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Jumlah Laporan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional yang dilaksanakan	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah **Indikator :** **Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah** **Indikator :** **Persentase Dokumen PEP yang tersusun**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yangTelah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah **Indikator :** **Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian Indikator : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	
					Peningkatan Pelayanan BLUD		
			Meningkatnya Pelayanan BLUD **Indikator :** **Persentase meningkatnya Pelayanan BLUD**	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

Palembang, September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. M. ARZHARESA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19[illegible]002

4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN

Rencana pembangunan sektor perhubungan disusun secara terstruktur melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang saling terintegrasi. Setiap program didasarkan pada tujuan strategis, kemudian dijabarkan menjadi kegiatan dan subkegiatan operasional agar pelaksanaannya dapat diukur dan dievaluasi secara berkala.

Setiap program dan kegiatan dilengkapi indikator kinerja untuk mengukur pencapaian outcome dan output, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, pengguna transportasi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Rencana ini mencakup baseline, target tahunan, dan pagu anggaran untuk lima tahun ke depan. Penyusunan target dan alokasi anggaran yang jelas bertujuan agar program dapat berjalan efisien, akuntabel, dan selaras dengan prioritas pembangunan, serta mendukung keberlanjutan kegiatan.

Perencanaan ini juga memperhatikan keterkaitan dengan 12 PS sebagai acuan program strategis sektoral dan ProSN sebagai indikator nasional, sehingga setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional dan regional.

Dengan pendekatan ini, seluruh program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan disusun agar dapat dijalankan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta memudahkan evaluasi kinerja.

Rincian program, kegiatan, subkegiatan, kelompok sasaran, indikator kinerja, target tahunan, dan pagu anggaran disajikan dalam Tabel IV.2, sedangkan proyeksi lima (5) tahun per komponen belanja dapat dilihat pada Tabel IV.3

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)			
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	ProSN
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**42,285,846,437**	**100%**	**42,384,681,353**	**100%**	**46,090,584,223**	**100%**	**47,211,113,434**	**100%**	**49,048,419,106**	**100%**	**50,566,840,061**	Sumsel Interkoneksi	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**75%**	**77%**	**657,500,000**	**79%**	**610,000,000**	**81%**	**1,170,000,000**	**82%**	**970,000,000**	**83%**	**970,000,000**	**84%**	**970,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	452,500,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yangTelah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			-		-	14 Data	50,000,000	14 Data	50,000,000		-		-	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	1 Berita Acara	50,000,000	1 Berita Acara	50,000,000		-		-	Sumsel Interkoneksi	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			-		-	1 dokumen	50,000,000		-	1 dokumen	50,000,000		-	Sumsel Interkoneksi	
Penyusunan dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			-		-	1 dokumen	50,000,000		-	1 dokumen	50,000,000		-	Sumsel Interkoneksi	
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			-		-	1 Berita Acara	50,000,000		-		-	1 Berita Acara	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			-		-	1 Subtansi	50,000,000		-		-	1 Subtansi	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase dokumen keuangan yang tersusun**	**85%**	**87%**	**23,558,030,353**	**89%**	**26,851,471,753**	**90%**	**28,190,584,223**	**91%**	**29,581,113,434**	**93%**	**31,051,669,106**	**95%**	**32,595,752,561**	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	139 ASN	139 ASN	23,058,808,000	139 ASN	26,282,249,400	139 ASN	27,596,361,870	139 ASN	28,976,179,964	139 ASN	30,424,988,962	139 ASN	31,946,238,410	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-		-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	414,222,353	1 dokumen	419,222,353	1 dokumen	414,222,353	1 dokumen	434,933,471	1 dokumen	456,680,144	1 dokumen	479,514,151	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		-	1 dokumen	10,000,000	-	-	-	-	-	-	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD					-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase penataan BMD yang terlaksana**	**83%**	**85%**	**332,500,000**	**87%**	**837,500,000**	**89%**	**400,000,000**	**91%**	**400,000,000**	**93%**	**320,000,000**	**95%**	**320,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah		1 dokumen	207,500,000	1 dokumen	212,500,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	Mewujudkan New Palembang	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	625,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi Pendapatan Daerah yang terlaksana**	**83%**	**85%**	**-**	**87%**	**-**	**89%**	**130,000,000**	**91%**	**135,000,000**	**93%**	**140,000,000**	**95%**	**145,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			-		-	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			-		-	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			-		-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	25,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah			-		-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Pengolahan Data Retribusi Daerah			-		-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah			-		-	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			-		-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pelayanaan kepegawaian yang terlaksana**	**80%**	**82%**	**511,110,250**	**84%**	**628,850,000**	**86%**	**1,020,000,000**	**87%**	**610,000,000**	**88%**	**1,000,000,000**	**89%**	**600,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia			-		-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang Tersedia			-		-	348 stel	400,000,000		-	348 stel	400,000,000		-	Sumsel Interkoneksi	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Analisa Kepegawaian			-		-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	32,500,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Orang Pemulangan Pegawai yang Pensiun			-		-	1 ASN	10,000,000		-		-		-	Sumsel Interkoneksi	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Orang yang Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			-		-	1 ASN	10,000,000		-		-		-	Sumsel Interkoneksi	
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pemindahan Tugas ASN			-		-		-	1 ASN	10,000,000		-		-	Sumsel Interkoneksi	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10 ASN	5 ASN	282,500,000	5 ASN	235,000,000	5 ASN	300,000,000	5 ASN	300,000,000	5 ASN	300,000,000	5 ASN	300,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	156,110,250	200 Orang	268,850,000	200 Orang	150,000,000	200 Orang	150,000,000	200 Orang	150,000,000	200 Orang	150,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 ASN	10 ASN	40,000,000	10 ASN	75,000,000	10 ASN	70,000,000	10 ASN	70,000,000	10 ASN	70,000,000	10 ASN	70,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pelayananan asministrasi umum yang terlaksana**	**85%**	**87%**	**945,500,000**	**89%**	**1,762,000,000**	**91%**	**2,000,000,000**	**93%**	**2,000,000,000**	**95%**	**1,700,000,000**	**97%**	**1,700,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	330,000,000	1 Paket	330,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	61,000,000	11 Paket	315,000,000	11 Paket	200,000,000	11 Paket	200,000,000	11 Paket	200,000,000	11 Paket	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			-		-	5 Paket	10,000,000	5 Paket	10,000,000	5 Paket	10,000,000	5 Paket	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-		-	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	120,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100,000,000	10 Paket	100,000,000	10 Paket	150,000,000	10 Paket	150,000,000	10 Paket	150,000,000	10 Paket	150,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1Laporan	1Laporan	100,000,000	1Laporan	150,000,000	1Laporan	100,000,000	1Laporan	100,000,000	1Laporan	100,000,000	1Laporan	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1Laporan	1Laporan	492,500,000	1Laporan	990,000,000	1 Laporan	980,000,000	1 Laporan	980,000,000	1 Laporan	980,000,000	1 Laporan	980,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-		-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah BMD yang dibeli**	**10 Unit**	**19 unit**	**1,490,000,000**	**21 Unit**	**-**		**860,000,000**		**1,360,000,000**		**1,360,000,000**		**1,360,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 R4	4 R4	-	4 R4	-	1 R4	500,000,000	1 R4	500,000,000	1 R4	500,000,000	1 R4	500,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau lapangan yang disediakan	9 R2	9 R2	1,490,000,000	9 R2	-	5 R2		5R2	500,000,000	5R2	500,000,000	5 R2	500,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang tersedia			-		-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang tersedia			-		-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang tersedia			-		-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia			-		-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang tersedia			-		-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tak Berwujud yang tersedia			-		-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia			-		-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia			-		-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia			-		-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kantor yang terlaksana**	**82%**	**84%**	**7,616,251,000**	**86%**	**6,089,859,600**	**87%**	**5,870,000,000**	**88%**	**5,405,000,000**	**89%**	**5,456,750,000**	**90%**	**5,576,087,500**	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Surat Menyurat yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	768,000,000	1 Laporan	734,000,000	1 Laporan	700,000,000	1 Laporan	735,000,000	1 Laporan	771,750,000	1 Laporan	810,337,500	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Laporan		-		-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	6,838,251,000	1 Laporan	5,345,859,600	1 Laporan	5,150,000,000	1 Laporan	4,650,000,000	1 Laporan	4,665,000,000	1 Laporan	4,745,750,000	Sumsel Interkoneksi	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD yang terpelihara**	**78%**	**80%**	**2,385,353,950**	**82%**	**1,605,000,000**	**84%**	**1,950,000,000**	**86%**	**1,950,000,000**	**87%**	**2,050,000,000**	**89%**	**2,000,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 R4	12 R4	225,500,000	12 R4	285,000,000	12 R4	250,000,000	12 R4	250,000,000	12 R4	250,000,000	12 R4	250,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 R2 R4	32 R2 R4	611,500,000	32 R2 R4	650,000,000	32 R2 R4	600,000,000	32 R2 R4	600,000,000	32 R2 R4	600,000,000	32 R2 R4	600,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besarr yang dipelihara			-		-		-		-		-	1 unit	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara			-		-		-		-	1 unit	50,000,000		-	Sumsel Interkoneksi	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara			-		-	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			-		-	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	285,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 unit	1 unit	100,000,000	1 unit	70,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 gedung	2 gedung	300,000,000	2 gedung	210,000,000	2 gedung	200,000,000	2 gedung	200,000,000	2 gedung	200,000,000	2 gedung	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	633,353,950		-	1 gedung	200,000,000	1 gedung	200,000,000	1 gedung	200,000,000	1 gedung	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	412 unit	412 unit	230,000,000	412 unit	290,000,000	412 unit	200,000,000	412 unit	200,000,000	412 unit	200,000,000	412 unit	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Luasan Tanah yang dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi			-		-	10 Ha	-	10 Ha	-	1 Ha	50,000,000	10 Ha	-	Sumsel Interkoneksi	
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**	**0**	**78%**	**4,789,600,884**	**79%**	**4,000,000,000**	**80%**	**4,500,000,000**	**81%**	**4,800,000,000**	**82%**	**5,000,000,000**	**83%**	**5,300,000,000**		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	4,789,600,884	1 Unit Kerja	4,000,000,000	1 Unit Kerja	4,500,000,000	1 Unit Kerja	4,800,000,000	1 Unit Kerja	5,000,000,000	1 Unit Kerja	5,300,000,000	Sumsel Interkoneksi	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhdap Kondisi Ideal**	**58% / 49%**	**60% / 51%**	**16,407,902,510**	**61% / 52%**	**16,454,250,179**	**62% / 53%**	**30,311,859,620**	**63% / 54%**	**28,702,520,588**	**64% / 55%**	**34,087,500,000**	**65% / 56%**	**54,012,301,486**	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	**Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**0.65**	**67%**	**-**	**69%**	**911,500,000**	**71%**	**500,000,000**	**73%**	**700,000,000**	**75%**	**600,000,000**	**77%**	**600,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			-		-		-	1 dokumen	300,000,000		-		-	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			-	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			-		-	1 dokumen	200,000,000		-		-		-	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			-	1 dokumen	611,500,000		-		-	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			-		-	1 dokumen	200,000,000		-		-		-	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			-		-		-	1 Laporan	200,000,000		-		-	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	**Persentase Jumlah perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang terpasang**	**35%**	**40%**	**5,702,161,710**	**45%**	**7,517,194,326**	**47%**	**13,961,859,620**	**50%**	**13,327,520,588**	**53%**	**18,562,500,000**	**55%**	**39,787,301,486**	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Unit Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang terbangun		-	-		-	2 Unit	200,000,000	2 Unit	200,000,000	2 Unit	200,000,000	2 Unit	200,000,000		Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	6 unit	6 unit	5,702,161,710	6 unit	7,517,194,326	250 unit	13,361,859,620	350 unit	12,727,520,588	450 unit	17,962,500,000	550 unit	39,187,301,486		Pertumbuhan Ekonomi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Unit Prasarana Jalan yang terpelihara			-		-	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000		Pertumbuhan Ekonomi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan yang terpelihara			-		-	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000		Pertumbuhan Ekonomi
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	**Jumlah terminal tipe B yang dikelola**	**7 Terminal**	**7 terminal**	**7,456,000,000**	**7 terminal**	**1,831,000,000**	**7 terminal**	**4,925,000,000**	**7 terminal**	**3,900,000,000**	**7 terminal**	**4,300,000,000**	**7 terminal**	**3,100,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B		-	-		-	1 dokumen	300,000,000		-		-		-	Sumsel Interkoneksi	
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi						2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	7 unit	7 unit	6,908,500,000	7 unit	1,080,000,000	7 unit	3,625,000,000	7 unit	800,000,000	7 unit	800,000,000	7 unit	800,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B						1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi						10 Orang	100,000,000	15 Orang	200,000,000	10 Orang	100,000,000	10 Orang	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang						1 Unit	200,000,000	1 Unit	2,200,000,000	1 Unit	2,700,000,000	1 Unit	1,500,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	7 unit	7 unit	547,500,000	7 unit	751,000,000	2 Unit	500,000,000	2 Unit	500,000,000	2 Unit	500,000,000	2 Unit	500,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**Persentase terlaksananya Manajemen dan Rekaysa Lalu Luntas untuk jaringan jalan provinsi**	**50%**	**50%**	**562,000,800**	**51%**	**1,181,000,000**	**52%**	**1,700,000,000**	**53%**	**1,600,000,000**	**54%**	**1,600,000,000**	**55%**	**1,600,000,000**		Pertumbuhan Ekonomi
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	144,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000		Pertumbuhan Ekonomi
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			-		-	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000		Pertumbuhan Ekonomi
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	472,000,800	1 Laporan	937,000,000	1 Laporan	600,000,000	1 Laporan	600,000,000	1 Laporan	600,000,000	1 Laporan	600,000,000		Pertumbuhan Ekonomi
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaanForum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	90,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000		Pertumbuhan Ekonomi
Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			-		-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000		Pertumbuhan Ekonomi
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			-		-	1 Unit	650,000,000	1 Unit	550,000,000	1 Unit	550,000,000	1 Unit	550,000,000		Pertumbuhan Ekonomi

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	**Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yang terlaksana**	**33%**	**35%**	**27,900,000**	**37%**	**75,000,000**		**325,000,000**		**325,000,000**		**275,000,000**		**275,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			-		-	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	1 Laporan	1 Laporan	27,900,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	75,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi			-		-	3 Orang	50,000,000	5Orang	100,000,000	3 Orang	50,000,000	3 Orang	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Persetujuan dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Persentase laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana**	**75%**	**77%**	**250,000,000**	**79%**	**400,000,000**	**81%**	**1,350,000,000**	**83%**	**1,400,000,000**	**85%**	**1,350,000,000**	**87%**	**1,350,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi Auditor dan Inspektor LLAJ	8 ASN	8 ASN	100,000,000		-	4 ASN	100,000,000	4 ASN	100,000,000	4 ASN	100,000,000	4 ASN	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang dilakukan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	7 terminal	7 terminal	150,000,000	7 terminal	250,000,000	7 terminal	350,000,000	7 terminal	400,000,000	7 terminal	350,000,000	7 terminal	350,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pengemudi yang mengikuti Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			-	34 pengemudi	150,000,000	34 pengemudi	100,000,000	34 pengemudi	100,000,000	34 pengemudi	100,000,000	34 pengemudi	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah dokumen Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan			-		-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun			-		-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi			-		-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute AmanSekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi			-		-	1 Laporan / dokumen	50,000,000	1 Laporan / dokumen	50,000,000	1 Laporan / dokumen	50,000,000	1 Laporan / dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya			-		-	3 Orang	100,000,000	3 Orang	100,000,000	3 Orang	100,000,000	3 Orang	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	JumlahTerbangunnyaZonaSelamat Sekolah (ZOSS)			-		-	1 Lokasi	100,000,000	1 Lokasi	100,000,000	1 Lokasi	100,000,000	1 Lokasi	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan			-		-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan			-		-	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporanUji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			-		-	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**75%**	**77%**	**1,862,500,000**	**79%**	**4,391,215,853**		**5,500,000,000**		**5,500,000,000**		**5,500,000,000**		**5,500,000,000**		Pertumbuhan Ekonomi
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah dokumen Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	165,000,000	1 dokumen	536,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000		Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Unit	6 Unit	1,697,500,000	6 Unit	3,855,215,853	10 Unit	5,000,000,000	10 Unit	5,000,000,000	10 Unit	5,000,000,000	10 Unit	5,000,000,000		Pertumbuhan Ekonomi & Pengentasan Kemiskinan
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase Penetapan Kawasan Perkotaan yang terlaksana**	**65%**	**66%**	**-**	**67%**	**-**	**68%**	**100,000,000**	**69%**	**100,000,000**	**70%**	**100,000,000**	**71%**	**100,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			-		-		-	1 dokumen	100,000,000		-	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			-		-	1 kali	100,000,000		-	1 kali	100,000,000		-	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tersedianya dokumen rencana umum jaringan trayek antarkota**	**65%**	**66%**	**405,000,000**	**67%**	**-**	**68%**	**400,000,000**	**69%**	**400,000,000**	**70%**	**400,000,000**	**71%**	**400,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	405,000,000		-	1 dokumen	200,000,000		-	1 dokumen	200,000,000		-	Sumsel Interkoneksi	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Frekuensi Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi			-		-		-	4 kali	200,000,000		-	4 kali	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi			-		-		-	1 dokumen	200,000,000		-	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi			-		-	1 dokumen	200,000,000		-	1 dokumen	200,000,000		-	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase tersedianya dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan**	**65%**	**66%**	**-**	**67%**	**-**	**68%**	**200,000,000**	**69%**	**100,000,000**	**70%**	**200,000,000**	**71%**	**100,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi			-		-	1 dokumen	200,000,000		-	1 dokumen	200,000,000		-	Sumsel Interkoneksi	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Frekuesni Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi			-		-		-	1 Kali	100,000,000		-	1 Kali	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase tersedia nya dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang menggunakan taksi**	**65%**	**66%**	**-**	**67%**	**-**	**68%**	**450,000,000**	**69%**	**450,000,000**	**70%**	**300,000,000**	**71%**	**300,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Frekuensi Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi			-		-	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa KhususdalamKawasanPerkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi			-		-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa KhususdalamKawasanPerkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalamKawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi			-		-	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan**	**65%**	**66%**	**142,340,000**	**67%**	**147,340,000**	**68%**	**200,000,000**	**69%**	**200,000,000**	**70%**	**200,000,000**	**71%**	**200,000,000**		Pengentasan Kemiskinan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikeluarkan izinnya	25 Unit	25 Unit	142,340,000	25 Unit	147,340,000	25 Unit	100,000,000	25 Unit	100,000,000	25 Unit	100,000,000	25 Unit	100,000,000		Pengentasan Kemiskinan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			-		-	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000		Pengentasan Kemiskinan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase Izin penyelenggaraan angkutan taksi dalam wilayah operasi yang diterbitkan**	**65%**	**66%**	**-**	**67%**	**-**	**68%**	**200,000,000**	**69%**	**200,000,000**	**70%**	**200,000,000**	**71%**	**200,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan AngkutanTaksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi			-		-	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan AngkutanTaksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	JumlahAngkutanTaksi tidakdalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan			-		-	25 Unit	100,000,000	25 Unit	100,000,000	25 Unit	100,000,000	25 Unit	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang terlaksana**	**50%**	**51%**	**-**	**52%**	**-**	**53%**	**500,000,000**	**54%**	**500,000,000**	**55%**	**500,000,000**	**56%**	**500,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi			-		-	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi			-		-	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	Sumsel Interkoneksi	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Konektivitas Laut**	**29%**	**31%**	**11,653,737,500**	**32%**	**6,178,025,000**	**33%**	**10,035,000,000**	**34%**	**19,035,000,000**	**35%**	**21,163,466,402**	**36%**	**10,035,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi yang terlaksana**	**42%**	**43%**	**-**	**44%**	**-**	**45%**	**300,000,000**	**46%**	**300,000,000**	**47%**	**300,000,000**	**48%**	**300,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi yang tersedia			-		-	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang terlaksana**	**65%**	**66%**	**-**	**67%**	**-**	**68%**	**300,000,000**	**69%**	**300,000,000**	**70%**	**300,000,000**	**71%**	**300,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi yang tersedia			-		-	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	**Persentase Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan yang terlaksana**	**65%**	**66%**	**638,997,500**	**67%**	**550,000,000**	**68%**	**200,000,000**	**69%**	**200,000,000**	**70%**	**200,000,000**	**71%**	**200,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	638,997,500		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi yang tersedia			-	1 Laporan	550,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	**Jumlah Lintasan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah yang ditetapkan**	**1 Lintasan**	**1 Lintasan**	**228,730,000**	**1 Lintasan**	**-**	**1 Lintasan**	**200,000,000**	**1 Lintasan**	**200,000,000**	**1 Lintasan**	**200,000,000**	**1 Lintasan**	**200,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		1 lintas	228,730,000		-	1 lintas	200,000,000	1 lintas	200,000,000	1 lintas	200,000,000	1 lintas	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Lintasan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah yang ditetapkan**	**1 Lintasan**	**1 Lintasan**	**-**	**1 Lintasan**	**200,000,000**	**1 Lintasan**	**300,000,000**	**1 Lintasan**	**300,000,000**	**1 Lintasan**	**300,000,000**	**1 Lintasan**	**300,000,000**	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			-		-	1 Lintasan	200,000,000	1 Lintasan	200,000,000	1 Lintasan	200,000,000	1 Lintasan	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasanJaringanLintasSungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			-	1 kali	200,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	**Persentase Jumlah Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang diterbitkan**	**66%**	**67%**	**108,155,000**	**68%**	**311,275,000**	**69%**	**300,000,000**	**70%**	**300,000,000**	**71%**	**300,000,000**	**72%**	**300,000,000**		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atauPeralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atauPeralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	108,155,000	1 dokumen	311,275,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang tersedia			-		-	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	**Persentase dokumen Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan**	**40%**	**42%**	**-**	**44%**	**-**	**45%**	**400,000,000**	**46%**	**400,000,000**	**47%**	**400,000,000**	**48%**	**400,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar DaerahKabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar DaerahKabupaten/Kota yang disediakan			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Frekuensi Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar DaerahKabupaten/Kota yang dilaksanakan			-		-	4 kali	100,000,000	4 kali	100,000,000	4 kali	100,000,000	4 kali	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	**Persentase dokumen rencana DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional yang ditetapkan**	**1 Pelabuhan**	**1 Pelabuhan**	**952,040,000**	**1 Pelabuhan**	**550,000,000**	**1 Pelabuhan**	**700,000,000**	**1 Pelabuhan**	**700,000,000**	**1 Pelabuhan**	**700,000,000**	**1 Pelabuhan**	**700,000,000**		
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	952,040,000	1 dokumen	550,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang disediakan			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Frekuensi Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			-		-	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang diterbitkan izin dan beroperasi**	**1 Pelabuhan**	**1 Pelabuhan**	**8,669,720,000**	**1 Pelabuhan**	**782,500,000**	**1 Pelabuhan**	**3,635,000,000**	**1 Pelabuhan**	**12,635,000,000**	**1 Pelabuhan**	**14,763,466,402**	**1 Pelabuhan**	**3,635,000,000**	Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian		1 unit	53,320,000	1 unit	657,500,000	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000	Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat	Pengentasan Kemiskinan
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional		1 Unit	7,825,000,000		-	1 Unit	2,885,000,000	1 Unit	11,885,000,000	1 Unit	14,013,466,402	1 Unit	2,885,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional		1 Plbh	791,400,000	1 Plbh	125,000,000	1 Plbh	300,000,000	1 Plbh	300,000,000	1 Plbh	300,000,000	1 Plbh	300,000,000		Pengentasan Kemiskinan & Pertumbuhan Ekonomi
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			-		-	1 Plbh	200,000,000	1 Plbh	200,000,000	1 Plbh	200,000,000	1 Plbh	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional			-		-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun dan diterbitkan izin**	**1 Pelabuhan**	**1 Pelabuhan**	**696,095,000**	**1 Pelabuhan**	**3,434,250,000**	**1 Pelabuhan**	**1,500,000,000**	**1 Pelabuhan**	**1,500,000,000**	**1 Pelabuhan**	**1,500,000,000**	**1 Pelabuhan**	**1,500,000,000**	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	191,365,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000		Pengentasan Kemiskinan
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-		-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-		-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil dibidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau			-		-	10 Orang	100,000,000	10 Orang	100,000,000	10 Orang	100,000,000	10 Orang	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	504,730,000	1 Laporan	3,234,250,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	500,000,000		Pengentasan Kemiskinan
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia			-		-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	**Persentase Izin Usaha untuk BUP di Pelabuhan Pengumpan Regional yang diterbitkan**	**1 Pelabuhan**	**1 Pelabuhan**	**360,000,000**	**1 Pelabuhan**	**350,000,000**	**1 Pelabuhan**	**400,000,000**	**1 Pelabuhan**	**400,000,000**	**1 Pelabuhan**	**400,000,000**	**1 Pelabuhan**	**400,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	360,000,000	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	**Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional yang diterbitkan**	**1 Pelabuhan**	**1 Pelabuhan**	**-**	**1 Pelabuhan**	**-**	**1 Pelabuhan**	**300,000,000**	**1 Pelabuhan**	**300,000,000**	**1 Pelabuhan**	**300,000,000**	**1 Pelabuhan**	**300,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	**Persentase izin pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk pengumpan regional yang diterbitkan**	**1 Pelabuhan**	**1 Pelabuhan**	**-**	**1 Pelabuhan**	**-**	**1 Pelabuhan**	**300,000,000**	**1 Pelabuhan**	**300,000,000**	**1 Pelabuhan**	**300,000,000**	**1 Pelabuhan**	**300,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional DalamSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	**Persentase Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional yang diterbitkan**	**20%**	**22%**	**-**	**23%**	**-**	**24%**	**400,000,000**	**25%**	**400,000,000**	**26%**	**400,000,000**	**27%**	**400,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	**Persentase izin reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional yang diterbitkan**	**10%**	**11%**	**-**	**12%**	**-**	**13%**	**400,000,000**	**14%**	**400,000,000**	**15%**	**400,000,000**	**16%**	**400,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regiona	Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	**Persentase Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional yang terlaksana**	**20%**	**21%**	**-**	**22%**	**-**	**23%**	**400,000,000**	**24%**	**400,000,000**	**25%**	**400,000,000**	**26%**	**400,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	**Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani**	**78%**	**80%**	**518,858,550**	**81%**	**342,650,000**	**82%**	**2,070,000,000**	**83%**	**2,070,000,000**	**84%**	**2,070,000,000**	**85%**	**2,070,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	**Persentase dokumen Rencana Induk Keretaapi yang ditetapkan**	**50%**	**52%**	**-**	**54%**	**-**	**1**	**670,000,000**	**1**	**670,000,000**	**1**	**670,000,000**	**1**	**670,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian			-		-	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi						1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	**Persentase tersedianya Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah**	**13%**		**-**	**15%**	**-**	**16%**	**300,000,000**	**17%**	**300,000,000**	**18%**	**300,000,000**	**19%**	**300,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia**	**40%**	**41%**	**358,497,000**	**42%**	**100,000,000**	**43%**	**200,000,000**	**44%**	**200,000,000**	**45%**	**200,000,000**	**46%**	**200,000,000**	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)		12 PS	ProSN
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang	358,497,000	200 Orang	100,000,000	200 Orang	100,000,000	200 Orang	100,000,000	200 Orang	100,000,000	200 Orang	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	**Persentase Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi yang ditetapkan**	**20%**	**21%**	**-**	**22%**	**-**		**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan**	**28%**	**29%**	**-**	**30%**	**-**		**200,000,000**		**200,000,000**		**200,000,000**		**200,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	**Persentase Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi yang ditetapkan**	**21%**	**22%**	**106,493,650**	**24%**	**142,650,000**	**26%**	**300,000,000**	**28%**	**300,000,000**	**30%**	**300,000,000**	**32%**	**300,000,000**	Sumsel Interkoneksi	
Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi			-		-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	300 orang	300 orang	106,493,650	300 orang	142,650,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	100 orang	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan**	**26%**	**27%**	**53,867,900**	**28%**	**100,000,000**	**29%**	**300,000,000**	**30%**	**300,000,000**	**31%**	**300,000,000**	**32%**	**300,000,000**	Sumsel Interkoneksi	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Kinerja Program (outcome dan kegiatan output)	BASELINE 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun												KETERANGAN	
			Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-6 (2030)			
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	ProSN
[1]	[2]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	53,867,900	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	Sumsel Interkoneksi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi yang tersedia			-		-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	Sumsel Interkoneksi	
				70,866,344,997		**65,359,606,532**		**88,507,443,843**		**97,018,634,022**		**106,369,385,508**		**116,684,141,547**		

Palembang, September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs [redacted] S
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 1999101 1 002

TABEL 4.3

RINCIAN KOMPONEN BELANJA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I.	**BELANJA OPERASI**	**56,215,127,924**	**56,736,861,706**	**66,545,584,127**	**68,101,113,434**	**70,552,169,106**	**71,793,027,561**	
1.	**Belanja Pegawai :**	**23,058,808,000**	**26,282,249,400**	**27,596,361,870**	**28,976,179,964**	**30,424,988,962**	**31,946,238,410**	
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**13,272,767,000**	**16,041,816,400**	**16,843,907,220**	**17,686,102,581**	**18,570,407,710**	**19,498,928,096**	
	1) Belanja Gaji Pokok ASN	9,254,619,000	11,732,928,239	12,319,574,651	12,935,553,383	13,582,331,053	14,261,447,605	
	2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	976,401,980	1,300,548,335	1,365,575,752	1,433,854,539	1,505,547,266	1,580,824,630	
	3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	419,419,000	461,360,900	484,428,945	508,650,392	534,082,912	560,787,057	
	4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	44,658,000	62,906,400	66,051,720	69,354,306	72,822,021	76,463,122	
	5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	397,025,000	612,717,100	643,352,955	675,520,603	709,296,633	744,761,465	
	6) Belanja Tunjangan Beras ASN	572,605,400	715,917,296	751,713,161	789,298,819	828,763,760	870,201,948	
	7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	73,459,000	60,601,200	63,631,260	66,812,823	70,153,464	73,661,137	
	8) Belanja Pembulatan Gaji ASN	188,545	359,500	377,475	396,349	416,166	436,974	
	9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1,401,495,415	877,485,160	921,359,418	967,427,389	1,015,798,758	1,066,588,696	
	10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	21,596,915	34,768,754	36,507,192	38,332,551	40,249,179	42,261,638	
	11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	64,783,745	102,299,641	107,414,623	112,785,354	118,424,622	124,345,853	
	12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	46,515,000	79,923,875	83,920,069	88,116,072	92,521,876	97,147,970	
	b. Belanja Pegawai Lainnya ASN	**9,786,041,000**	**10,240,433,000**	**10,752,454,650**	**11,290,077,383**	**11,854,581,252**	**12,447,310,314**	
	1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**9,786,041,000**	**10,240,433,000**	**10,752,454,650**	**11,290,077,383**	**11,854,581,252**	**12,447,310,314**	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9,786,041,000	10,240,433,000	10,752,454,650	11,290,077,383	11,854,581,252	12,447,310,314	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN							
	2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah							
	- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD							
	- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD							
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN							

	- Belanja Honorarium (Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Unit Kerja Pengadaan/Jasa)							
	- Belanja Jasa Pengelolaan BMD							
	3) Belanja Pegawai BOS							
	4) Belanja Pegawai BLUD							
	5) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD							
	6) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH							
2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**31,856,319,924**	**27,104,612,306**	**34,599,222,257**	**34,774,933,471**	**35,777,180,144**	**35,496,789,151**	
3.	**Belanja Bunga**							
4.	**Belanja Subsidi**	**1,300,000,000**	**3,350,000,000**	**4,350,000,000**	**4,350,000,000**	**4,350,000,000**	**4,350,000,000**	
5.	**Belanja Hibah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	1) Hibah Kepada.....							
	2) Hibah Kepada.....							
	5) dst.....							
6.	**Belanja Bantuan Sosial**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	1) Bantuan Sosial Kepada.....							
	2) Bantuan Sosial Kepada.....							
	5) dst.....							
II.	**BELANJA MODAL**	**14,651,217,073**	**8,622,744,826**	**21,961,859,716**	**28,917,520,588**	**35,817,216,402**	**44,891,113,986**	
	a. Belanja Modal Tanah							
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,089,217,073	8,184,344,826	16,161,859,620	21,417,520,588	29,017,216,402	39,391,113,986	
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,229,000,000	438,400,000	5,700,000,096	7,500,000,000	6,500,000,000	5,500,000,000	
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi							
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	333,000,000		100,000,000		300,000,000		
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud							
III.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**							
IV.	**BELANJA TRANSFER**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.	**Belanja Bagi Hasil**							
2.	**Belanja Bantuan Keuangan**							
TOTAL BELANJA (I + II + III + IV)		**70,866,344,997**	**65,359,606,532**	**88,507,443,843**	**97,018,634,022**	**106,369,385,508**	**116,684,141,547**	

Palembang, September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. [illegible]NARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 1[illegible]9101 1 002

4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, perlu dilakukan identifikasi subkegiatan yang memiliki peran strategis dan dampak langsung terhadap sasaran pembangunan. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan kriteria kontribusi terhadap tujuan pembangunan, urgensi pelaksanaan, manfaat bagi masyarakat, serta keselarasan dengan kebijakan dan target pembangunan nasional maupun regional.

Subkegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya, baik anggaran maupun tenaga pelaksana, difokuskan pada kegiatan yang memberikan hasil nyata dan signifikan. Dengan penentuan subkegiatan prioritas, pemerintah daerah dapat lebih mudah memonitor pelaksanaan, mengevaluasi capaian, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, sehingga efektivitas program dan kegiatan dapat meningkat.

Selain itu, subkegiatan prioritas menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Identifikasi ini juga mendukung keterpaduan antarunit kerja dan mempermudah koordinasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Daftar subkegiatan prioritas disusun secara sistematis dan rinci agar memudahkan pemangku kepentingan dalam memantau pelaksanaan, mengevaluasi hasil, dan menilai dampak pembangunan. Rincian subkegiatan prioritas beserta kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel IV.4

TABEL IV.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
2	Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat	Meningkatnya Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
3	Sumsel Interkoneksi	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
4	Sumsel Interkoneksi	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	
5	Sumsel Interkoneksi	Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
6	Sumsel Interkoneksi	Tersusunnya Rencana PembangunanTerminal Penumpang Tipe B	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	
7	Sumsel Interkoneksi	Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Pembangunan Terminal PenumpangTipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	

4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Perhubungan menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur strategis untuk menilai pencapaian kinerja sektor transportasi. Indikator ini digunakan untuk memantau efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan bahwa pelayanan transportasi berjalan secara optimal dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Tiga indikator utama yang menjadi fokus pengukuran kinerja Dinas Perhubungan antara lain:

1. Rasio Konektivitas, yang mengukur persentase hubungan antar wilayah yang dapat diakses melalui jaringan transportasi;
2. Rata-rata Load Factor Angkutan Umum, yang menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat duduk pada angkutan umum sebagai ukuran efisiensi operasional dan pelayanan;
3. v/c Rasio (Volume/Kapasitas), yang menilai rasio antara volume kendaraan yang melintas dengan kapasitas jalan utama untuk memantau kelancaran arus lalu lintas dan kepadatan jalan.

Dengan pemantauan ketiga indikator ini secara konsisten, Dinas Perhubungan dapat mengambil kebijakan strategis yang tepat, menyesuaikan kapasitas layanan dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengendalikan kepadatan dan kelancaran transportasi.

Rincian indikator kinerja utama beserta target capaian dan satuan pengukuran disajikan dalam tabel IV.5

TABEL IV.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,634	0,660	0,685	0,710	0,735	0,760	
2	V/C Rasio	Rasio	0,390	0,388	0,385	0,383	0,382	0,381	
3	Rata - rata Load Factor Angkutan Umum	%	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50	

4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Selain Indikator Kinerja Utama, Dinas Perhubungan juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk memantau aspek-aspek kritis dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional. IKK berfungsi sebagai tolok ukur tambahan yang menekankan hasil nyata dan capaian strategis pada tingkat teknis atau spesifik, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan cepat.

Indikator Kinerja Kunci mencakup pengukuran terhadap efisiensi, kualitas, dan capaian program yang langsung mempengaruhi layanan transportasi. Melalui pemantauan IKK, Dinas Perhubungan dapat menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan, memastikan target tercapai sesuai perencanaan, dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. IKK juga berperan penting dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama, sehingga keseluruhan kinerja sektor transportasi dapat terukur secara menyeluruh.

Rincian Indikator Kinerja Kunci beserta target capaian dan satuan pengukuran disajikan dalam tabel IV.6.

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	40	45	47	50	53	55	
4	Cakupan/Persentase Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	20	22	24	26	28	30	
5	Persentase sarana Angkutan Sungai yang memenuhi standar	%	50	51	52	53	54	55	

6	Persentase Trayek Angkutan Umum yang Terlayani	%	63	65	68	70	73	76	
7	Load Factor Angkutan Umum Darat (AKDP)	%	50	53	56	59	62	65	
8	Load Factor Angkutan Umum Sungai (Lintas Kab/Kota)	%	60	63	66	69	72	75	
9	Persentase Simpul Transportasi Kewenangan Provinsi yang sesuai Standar	%	72	73	74	75	76	77	
10	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase meningkatnya Pelayanan BLUD	%	100	100	100	100	100	100	

dishub_sumsel

BAB V

Penutup

BAB V

PENUTUP

Rencana Startegis [Renstra PD] merupakan dokumen rencana detail terinci teknis dari Organisasi Perangkat Daerah sebagai implementasi penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Periode 2025 – 2029.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi urusan perhubungan. Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tidak terlepas dari arah kebijakan yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029.

Visi RPJMD yaitu ”Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua” serta misi RPJMD :

Misi 1:

Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.

Misi 2:

Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Misi 3:

Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4:

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5:

Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6:

Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 7:

Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan local.

Tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas dengan Sasaran Strategis yaitu :

[1] Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi,
[2] Meningkatnya Layanan Transportasi,
[3] Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah;

Untuk mengukur tercapainya Sasaran Strategis telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang pada akhir periode Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2029 sebagai berikut :

[1] Rasio konektivitas transportasi sebesar 0,735
[2] V/C Ratio Jalan Provinsi 0,382
[3] Rata – rata load faktor angkutan umum 73%

Dalam pelaksanaan pembangunan transportasi, Dinas Perhubungan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip pengarusutamaan pembangunan yang menjadi kaidah utama dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Prinsip-prinsip ini akan menjadi pedoman agar pembangunan sektor transportasi di Sumatera Selatan mampu menghadirkan manfaat yang berkeadilan, inklusif, serta berkelanjutan. Adapun 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan yang relevan dan harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan, meliputi:

1. Gender dan inklusi sosial: memastikan pelayanan transportasi yang ramah, aman, dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat,

termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

2. Pembangunan berkelanjutan: memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efisien serta ramah lingkungan.
3. Transformasi digital: mendorong penerapan sistem digitalisasi transportasi, seperti manajemen lalu lintas berbasis teknologi, integrasi data transportasi, dan layanan publik berbasis aplikasi.
4. Pembangunan rendah karbon: mengupayakan pengurangan emisi sektor transportasi melalui peningkatan angkutan umum massal, penggunaan energi terbarukan, serta pengembangan moda transportasi ramah lingkungan.
5. Pembangunan berketahanan iklim: memperkuat infrastruktur dan layanan transportasi agar adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, sehingga mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Dengan mengacu pada kelima pengarusutamaan tersebut, diharapkan pembangunan sektor transportasi di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak nyata dalam meningkatkan keselamatan, pelayanan, serta konektivitas wilayah. Pada akhirnya, perwujudan transportasi yang andal, selamat, berkelanjutan, dan inklusif akan menjadi fondasi penting bagi tercapainya tujuan pembangunan daerah maupun nasional.

LAMPIRAN

- Rambu Lalu Lintas;
- Marka Jalan;
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- Alat penerangan Jalan;
- Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandangcacat; dan
- Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 25.

dishub_sumsel

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN
Kapten A. Rivai No.51 Palembang Kotak Pos No. 1132 Telepon 352005 – 363125
Kode Pos: 30129

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 551.10 / 0009 / Dishub/ 2025

t e n t a n g

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINASI SUMATERA SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa sebagai bentuk implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah serta Rencana Strategis perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, para pejabat/pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap serta memenuhi syarat untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
13. Inmendagri Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 – 2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029.

P E R T A M A : Membagi tugas kewenangan kepada pejabat / pegawai tersebut sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang diserahi tugas kewenangan sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029;
2. Menyelaraskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029;
3. Menyusun program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025 - 2029;
4. Menyelaraskan indikator kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja RPJMD 2025– 2029;

KETIGA : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1.	Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
2.	Ketua Tim	:	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
3.	Wakil Ketua Tim	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4.	Sekretariat		
	a. Koordinator	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	b. Wk. Koordinator I	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	c. Wk. Koordinator II	:	Plh Kepala Sub Bagian Keuangan
	d. Anggota	:	Staf Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5.	Kelompok I	:	Ruang Lingkup Perhubungan Darat
	a. Koordinator	:	Kepala Bidang Angkutan Jalan
	b. Wk. Koordinator I	:	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
	c. Wk, Koordinator II	:	Kepala UPTD Pengelolaan Terminal
	d. Anggota	:	Seluruh Pejabat Eselon IV Bidang Angkutan Jalan, Bidang Lalu Lintas Jalan serta UPTD Pengelolaan Terminal
6.	Kelompok II	:	Ruang Lingkup Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan
	a. Koordinator	:	Kepala Bidang Pelayaran
	b. Wk. Koordinator I	:	Kepala UPTD PASDPL
	c. Wk. Koordinator II	:	Kepala UPTD PP Tanjung Api - api dan Kertalaya
	d. Anggota	:	Seluruh Pejabat Eselon IV Bidang Pelayaran dan UPTD PASDPL serta UPTD PP Tanjung Api – api dan Kertalaya
7.	Kelompok III	:	Ruang Lingkup Perkeretaapian
	a. Koordinator	:	Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan
	b. Anggota	:	Seluruh Pejabat Eselon IV Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

KEEMPAT : Masing-masing Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 mempunyai uraian tugas berikut :

1. Uraian tugas Penanggungjawab :
   a. Bertanggungjawab dan mengawal atas tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029;
   b. Bertanggungjawab dan menetapkan atas program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029;
   c. Bertanggungjawab dan menetapkan atas keselarasan indikator kinerja Perangkat Daerah dengan indikator RPJMD.
   d. Bertanggungjawab atas penetapan RENSTRA
2. Uraian tugas Ketua Tim :
   a. Mengawal tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bidang dan UPTD untuk diarahkan menjadi visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
   b. Merumuskan program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran Bidang dan UPTD untuk menjadi program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran Perangkat Daerah agar diselaraskan dengan RPJMD;
   c. Merumuskan indikator kinerja Bidang dan UPTD untuk menjadi indikator kinerja Perangkat Daerah agar selaras dengan indikator RPJMD;
   d. Merumuskan isu-isu strategi Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bidang dan UPTD agar menjadi isu-isu strategi Perangkat Daerah.
3. Uraian tugas Sekretariat :
   a. Membantu Ketua Tim Penyusun dalam merumuskan RENSTRA;
   b. Mengumpulkan dan menganalisa data masing-masing Bidang dan UPTD untuk dirumuskan di dalam RENSTRA;
   c. Mengarsipkan data dan informasi terkait penyusunan RENSTRA;
   d. Mengelompokan program dan kegiatan masing-masing Bidang dan UPTD sesuai dengan urusannya;
   e. Membantu administrasi perumusan RENSTRA
4. Uraian tugas Kelompok I :
   a. Mengawal tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Perhubungan Darat;
   b. Merumuskan program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Perhubungan Darat;
   c. Merumuskan isu-isu strategi di Ruang Lingkup Perhubungan Darat;
   d. Koordinator dan masing-masing wakil koordinator selain merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Perhubungan Darat, diharuskan menyusun arah kebijakan Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Uraian tugas Kelompok II :
   a. Mengawal tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Perhubungan Laut dan ASDP;
   b. Merumuskan program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Perhubungan Laut dan ASDP;
   c. Merumuskan isu-isu strategi di Ruang Lingkup Perhubungan Laut dan ASDP;
   d. Koordinator dan wakil koordinator selain merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Perhubungan Laut dan ASDP, diharuskan menyusun arah kebijakan Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Uraian tugas Kelompok III :
   a. Mengawal tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Perkeretaapian;
   b. Merumuskan program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Perkeretaapian;
   c. Merumuskan isu-isu strategi di Ruang Lingkup Perkeretaapian;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di: Palembang
Pada tanggal: 14 Maret 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Sumatera Selatan, sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Prov. Sumsel;
3. Kepala Bappeda Prov. Sumsel;
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

AGENDA KERJA TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEGIATAN : PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
LOKASI : SUMATERA SELATAN
TAHUN : 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN / BULAN / MINGGU 2025																								Ket.
		MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
A	Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah																									
	1 Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah																									Kepala Dinas
	2 Orientasi Renstra Perangkat Daerah																									Kepala Dinas
	3 Pengumpulan Data dan Informasi																									Sekretariat
B	Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah																									
	1 Penyusuan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah																									Seluruh Tim Pokja
	a Pembahan kebijakan nasional																									Seluruh Tim Pokja
	b Pembahan partisipatif masyarakat																									Seluruh Tim Pokja
	c Pembahan Renja K/L dan Kabupaten/Kota																									Seluruh Tim Pokja
	d Penurunan Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi																									Seluruh Tim Pokja
	e Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah																									Seluruh Tim Pokja
	f Analisa SPM																									Seluruh Tim Pokja
	g Telaahan visi dan misi RPJMD																									Seluruh Tim Pokja
	h Perumusan Tujuan																									Seluruh Tim Pokja
	i Perumusan Sasaran																									Seluruh Tim Pokja
	j Perumusan Strategi dan Kebijakan																									Seluruh Tim Pokja
	k Perumusan Indikator Program/Kegiatan																									Seluruh Tim Pokja
	l Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah																									Seluruh Tim Pokja
	2 Penyajian Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah																									
	a Kajian Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah																									Kepala Dinas
	b Perbaikan Atas Saran dan Masukan Point 1 huruf a s/d l																									Sekretariat
	c Rapat Draft Final Rancangan Awal Renstra PD																									Kepala Dinas
	d Masa Perbaikan Saran dan Masukan																									Sekretariat

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN / BULAN / MINGGU 2025																										Ket.
		MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
C	Rapat Koordinasi Teknis																													
	1 Diskusi dan Pembahasan Ketik Perangkat Daerah																													Kepala Dinas
	2 Masa Perbaikan Hasil Pembahasan Ketik Perangkat Daerah																													Sekretariat
D	Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah																													
	1 Rapat Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD																													Kepala Dinas
	2 Penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah																													Kepala Dinas
F	Penetapan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah																													Kepala Dinas

Palembang, 5 Maret 2025

Ditetapkan Oleh
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dra. Hj. ARLISARSA JS
NIP. 197108031991011002

Disusun Oleh
an. SEKRETARIAT
KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAMBANG SUHARDI, SE, MM
NIP. 197810051999031004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kapten A. Rivai no. 51 Palembang Kotak Pos no. 1132 Telepon 352005– 363125

Palembang, 2 , Desember 2024

Nomor : 005/5994/I/DISHUB/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Rapat Persiapan Renstra 2025-2029

Kepada Yth,
Kepala Bappeda Prov. Sumsel
di –
PALEMBANG

Menindaklanjuti Rapat FGD Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 Melalui Video Conference Zoom Meeting pada hari senin 25 November 2024 dan Nota Dinas Perihal Laporan Pelaksanaan Rapat Zoom FGD Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 Tanggal 24 November 2024.

Bersama ini mohon berkenan menugaskan personil terkait untuk menghadiri Rapat Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 yang akan dilaksanakan Pada :

Hari / tanggal	:	Senin / 02 Desember 2024.
Pukul	:	09:00 s.d. Selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Lt.II)
Acara	:	Rapat Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002

Tembusan Yth, :
Pj. Gubernur Sumatera Selatan (Sebagai Laporan)

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	1. Sekretaris 2. Kepala Bidang 3. Kepala UPTD Di Lingkungan Dishub Prov. Sumsel
Dari	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal	:	2 Desember 2024
Hal	:	Rapat Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Menindaklanjuti Rapat FGD Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 Melalui Video Conference Zoom Meeting pada hari senin 25 November 2024 dan Nota Dinas Perihal Laporan Pelaksanaan Rapat Zoom FGD Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 Tanggal 24 November 2024.

Bersama ini mohon berkenan menugaskan personil terkait untuk menghadiri Rapat Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 yang akan dilaksanakan Pada :

Hari / tanggal	:	Senin / 02 Desember 2024.
Pukul	:	09:00 s.d. Selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Lt.II)
Acara	:	Rapat Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Demikian, atas kerjasamanya diucapan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
Dari : Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Tanggal : 24 November 2024
Hal : Laporan Pelaksanaan Rapat Zoom FGD Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sehubungan dengan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tanggal 19 November 2024 bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KASUBBAG PERENCANAAN
EVALUASI DAN PELAPORAN

BAMBANG SUHARDI, SE, MM.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19781005 199903 1 004

(1) Yth. Sekretaris
- ... Copy & Copies dg ... & ... UPTD
- ... dalam ... & ...
- TL.
28/11

(2) Yth. Kasubbag Perencanaan
- Unk. TL.
- Informasi. 28/11-24.

Yth Agus / Andri / Rifan / Bima
- Copy bahan distribusi ke Bidang/UPTD.
- Buat NID untuk rapat
- Buat Surat undangan ke Bappeda
- Buat bahan paparan
- Koordinasikan.

28/11 2024

NOTULEN RAPAT

I. DASAR PELAKSANAAN

Undangan Rapat Via Zoom Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

II. PELAKSANAAN RAPAT VIA ZOOM

Hari	: Senin
Tanggal	: 25 November 2024
Jam	: 08.00 WIB - Selesai
Media	: Video Conference melalui Aplikasi ZOOM Meeting Meeting ID : 930 9685 9583 Passcode : FGD2529
Agenda	: FGD Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029
Peserta Rapat	: Daftar Undangan Terlampir

III. HASIL RAPAT :

1) Struktur Muatan Renstra Kementerian Perhubungan 2025 – 2029

a) Visi Kementerian Pehubungan 2025 – 2029 yaitu Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045

b) 8 Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yaitu

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama
6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim

c) 4 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional pada RPJMN 2025-2045
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

d) 9 Sasaran terdiri dari 3 Sasaran Nasional dan 6 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.
   - Tiga Sasaran dalam RPJMN yaitu
     1) Penurunan biaya logistic mendukung Asta Cita Presiden (PN5)
     2) Penurunan emisi GRK mendukung Asta Cita Presiden (PN2)
     3) Peningkatan stok infrastruktur Mendukung Asta Cita Presiden (PN3)
   - Enam Sasaran Strategis
     1) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional
     2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional
     3) Meningkatnya keselamatan transportasi nasional
     4) Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional
     5) Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten
     6) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik

e) 7 Indikator Kemenhub 2025-2029
   1) Rasio Konektivitas Transportasi Nasional
   2) Rasio Integrasi Transportasi Nasional
   3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public sector transportasi
   4) Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional
   5) Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian
   6) Indeks Peningkatan SDM transportasi
   7) Indeks RB Kementerian Perhubungan

f) Arah kebijakan nasional (multi sektoral) dalam RPJMN 2025-2029 dalam rangka :
   - Penurunan biaya logistic
   - Penurunan emisi GRK
   - Peningkatan stok infrastruktur

g) 21 Arah KebijakanKementerian Perhubungan 2025-2029
   1) Peningkatan Konektivitas Internasional yang didukung inndustri transportasi berorientasi global
   2) Peningkatan Efektivitas konektivitas backbone antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan
   3) Peningkatan efesiensi system distribusi hinterland dalam pulau untuk mengurangi biaya logistic
   4) Pengembangan system angkutan massal perkotaan terintegrasi
   5) Pemerataan jaringan transportasi ke kawasan perdesaan dan DTPK
   6) Peningkatan Integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi
   7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan public sebagai bagian dari pelayanan dasar
   8) Peningkatan Efesiensi dan kualitas pelayanan pada melalui digitalisasi
   9) Peningkatan aksesibilitas public terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan
   10) Percepatan Transisi energy serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim
   11) Pemenuhan (compliancy) standar teknis sarana dan prasarana transportasi
   12) Peningkatan pefektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan
   13) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamtatan transportasi

14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak disabilitas, kemiskinan)
15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi
16) Peningkatan Efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi
17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industry, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi
18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan
19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan
20) Peningkatan Efektifitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi
21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

2) Dengan adanya Struktur Muatan Renstra Kementerian Perhubungan di harapkan Strategi dan Arah Kebijakan serta Isu – isu Strategis yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mendukung Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
3) Berkaitan dengan Poin Ke 2, maka diperlukan dukungan dari Bidang dan UPTD untuk memberikan masukan dan saran pada forum terbuka dalam mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029.

Demikianlah notulen rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

BAMBANG SUHARDI, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19781005 199903 1 004

Palembang, 25 November 2024

Notulis,

WAHYU INDRIA NINGSIH, S.Kom, M.Si
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19880218 200902 2 001

Tembusan Yth.
1. Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Sumsel

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Adi Sucipto Jakabaring Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 714808 Faksimile (0711) 714808 Kode Pos 30121

Palembang, 19 Maret 2025

Nomor : 460 / 1113 /PUGPP/DPPPA/2025
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth.

Daftar terlampir
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, serta hasil evaluasi mandiri Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di daerah tahun 2023 yang menunjukkan masih banyak RENSTRA OPD yang belum responsif gender, untuk itu diharapkan kesediaan Saudara menugaskan pejabat perencanaan dan focal point PUG untuk menjadi peserta aktif pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis/ 20 Maret 2025 (jadwal terlampir)
Waktu	:	08.00 – sd. Selesai
Tempat	:	Zoom Meeting (disampaikan kemudian)
Acara	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah yang Responsif Gender
Contact Person	:	Titin +62 853 8394 5121

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

FITRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 196903281989082002

Tembusan Yth.
- **Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan)**

JADWAL ACARA (TENTATIVE)

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD dan RENSTRA Yang Responsif Gender bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, Kamis, 20 Maret 2025

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30-09.00	Registrasi Pembacaan Doa Sambutan Kepala Dinas PPPA	Panitia
09.00-12.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah yang Responsif Gender	Diskusi dan Tanya Jawab
12.00-12.00	Penutupan	DPPPA Sumsel

KEPALA DINAS,

EITRIANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 196903281989082002

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Telepon: (021) 7942651 – 7942653, Faksimile: (021) 7942631, Laman: bangda.kemendagri.go.id

2 Mei 2025

Nomor : 500.7.1/2422/Bangda
Sifat : Segera
Lampiran : Dua berkas
Hal : Undangan

Yth.Daftar terlampir

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Urusan Perhubungan, akan dilaksanakan rapat secara daring pada:

hari : Selasa
tanggal : 6 Mei 2025
waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
media : Aplikasi *Zoom Meeting*
Meeting id : 958 4063 3819
Password : Bangda25
acara : Koordinasi Sinkronisasi Renstra Urusan Perhubungan dengan RPJMN 2025-2029
pemimpin rapat : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada rapat dimaksud.

Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri u.p. Dit. Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Tlp 021 -7942644 atau menghubungi *contact person* Sdr. Amos Sihite (085159436255) dan Sdri. Siti Hadijah (081362469328).

Atas kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah,

Sri Purwaningsih, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197004161995032001

Tembusan:
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : 500.7.1/2422/Bangda
Tanggal : 2 Mei 2025

DAFTAR UNDANGAN

PESERTA PUSAT

1. Direktur Transportasi Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
9. Kepala Sub Direktorat Perhubungan, Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Perhubungan, Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
11. Aparatur Sipil Negara pada Subdit Perhubungan, Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

PESERTA DAERAH

1. Kepala Bappeda Aceh;
2. Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu;
6. Kepala Bappeda Provinsi Riau;
7. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau;
8. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
10. Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung;
11. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat;
12. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
13. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16. Kepala Bappeda Provinsi Banten;
17. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
18. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
19. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Bapperida Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;
22. Kepala Bappeda Provinsi Bali;
23. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo;
26. Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat;
27. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara;
29. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara;
32. Kepala Bappeda Provinsi Maluku;
33. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat;
34. Kepala Bapperida Provinsi Papua;
35. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah;
36. Kepala Bappeda Provinsi Papua Pegunungan;
37. Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan;
38. Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya;
39. Kepala Dinas Perhubungan Aceh;
40. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
41. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
42. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
43. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
44. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
45. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
46. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
47. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
48. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung;
49. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
50. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
51. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
52. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
53. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;
54. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
55. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
56. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
57. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
58. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
59. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
60. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

61. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
62. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
63. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo;
64. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat;
65. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
66. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara;
67. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
68. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
69. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
70. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
71. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat;
72. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
73. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah;
74. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan;
75. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan, dan
76. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Telepon: (021) 7942651 – 7942653, Faksimile: (021) 7942631, Laman: bangda.kemendagri.go.id

2 Mei 2025

Nomor : 500.7.1/2422/Bangda
Sifat : Segera
Lampiran : Dua berkas
Hal : Undangan

Yth.Daftar terlampir

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Urusan Perhubungan, akan dilaksanakan rapat secara daring pada:

hari : Selasa
tanggal : 6 Mei 2025
waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
media : Aplikasi *Zoom Meeting*
Meeting id : 958 4063 3819
Password : Bangda25
acara : Koordinasi Sinkronisasi Renstra Urusan Perhubungan dengan RPJMN 2025-2029
pemimpin rapat : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada rapat dimaksud.

Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri u.p. Dit. Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Tlp 021 -7942644 atau menghubungi *contact person* Sdr. Amos Sihite (085159436255) dan Sdri. Siti Hadijah (081362469328).

Atas kehadiran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah,

Sri Purwaningsih, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197004161995032001

Tembusan:
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : 500.7.1/2422/Bangda
Tanggal : 2 Mei 2025

DAFTAR UNDANGAN

PESERTA PUSAT

1. Direktur Transportasi Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
9. Kepala Sub Direktorat Perhubungan, Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Perhubungan, Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
11. Aparatur Sipil Negara pada Subdit Perhubungan, Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

PESERTA DAERAH

1. Kepala Bappeda Aceh;
2. Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu;
6. Kepala Bappeda Provinsi Riau;
7. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau;
8. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
10. Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung;
11. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat;
12. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
13. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16. Kepala Bappeda Provinsi Banten;
17. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
18. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
19. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Bapperida Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;
22. Kepala Bappeda Provinsi Bali;
23. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo;
26. Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat;
27. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara;
29. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara;
32. Kepala Bappeda Provinsi Maluku;
33. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat;
34. Kepala Bapperida Provinsi Papua;
35. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah;
36. Kepala Bappeda Provinsi Papua Pegunungan;
37. Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan;
38. Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya;
39. Kepala Dinas Perhubungan Aceh;
40. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
41. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
42. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
43. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
44. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
45. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
46. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
47. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
48. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung;
49. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
50. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
51. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
52. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
53. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;
54. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
55. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
56. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
57. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
58. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
59. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
60. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

61. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
62. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
63. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo;
64. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat;
65. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
66. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara;
67. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
68. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
69. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
70. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
71. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat;
72. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
73. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah;
74. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan;
75. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan; dan
76. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai No. 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon : (0711) 352388, Laman: www.sumselprov.go.id, Pos-el: sumsel@sumselprov.go.id

Palembang, 11 Juni 2025

Nomor : 000.7.2.2/1421/Bappeda-V/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan**

Yth. ***Daftar Terlampir***

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan sesuai amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 dibahas dalam Forum PD/Lintas PD, bersama ini diharapkan Saudara dapat menugaskan Pejabat Eselon III untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Selasa s.d. Kamis / 17 s.d. 19 Juni 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai (*Jadwal Desk Pembahasan Terlampir*)
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Acara : Forum Lintas PD Pembahasan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon untuk hadir tepat waktu dengan membawa bahan-bahan terkait dengan rapat tersebut (Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 beserta Pohon Kinerja/*cascading*, dan bahan terkait lainnya).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Edward Candra

Tembusan Yth.:
Gubernur Sumatera Selatan, di Palembang (sebagai laporan).

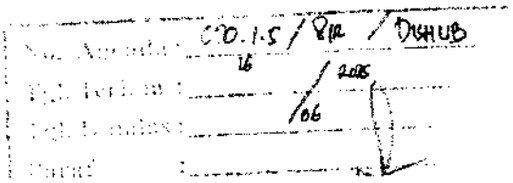

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 000.7.2.2/1421/Bappeda-V/2025
Tanggal : 11 Juni 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10. Kepala Badan Penghubung
11. Kepala Dinas Pendidikan
12. Kepala Dinas Kesehatan
13. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
14. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
15. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Kepala Dinas Perhubungan ✓
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Kepala Dinas Sosial
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Kepala Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28. Kepala Dinas Kearsipan
29. Kepala Dinas Perpustakaan
30. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
31. Kepala Dinas Perkebunan
32. Kepala Dinas Kehutanan
33. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
34. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
35. Kepala Dinas Perindustrian
36. Kepala Dinas Perdagangan
37. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
38. Direktur Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar
39. Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah Az- Zahra
40. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
41. Direktur Rumah Sakit Khusus Mata
42. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
43. Sekretaris Dewan DPRD
44. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
45. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
46. Kepala Biro Hukum dan HAM
47. Kepala Biro Perekonomian
48. Kepala Biro Administasi Pembangunan
49. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
50. Kepala Biro Humas dan Protokol
51. Kepala Biro Organisasi
52. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 000.7.2.2/1421/Bappeda-V/2025
Tanggal : 11 Juni 2025

PEMBAGIAN DESK PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Waktu	Agenda dan Pelaksana		
Selasa / 17 Juni 2025			
08.30 – 12.00	Desk Pembahasan Tujuan 1: "**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**" Tempat: Ruang Rapat Bidang PKK Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Pimpinan Desk: Plh. Kabid PKK Perangkat Daerah: 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Perpustakaan 5. Dinas Pemuda dan Olahraga 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. RSUD Siti Fatimah Az-Zahra 8. RS dr. Ernaldi Bahar 9. RS Khusus Gigi dan Mulut 10. RS Khusus Mata	Desk Pembahasan Tujuan 2: "**Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah**" Tempat: Ruang Rapat Dapunta Hyang Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Pimpinan Desk: Kabid PPP Perangkat Daerah: 1. Dinas Pertanian TPH 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Dinas Perdagangan 10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 11. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 12. Biro Perekonomian	Desk Pembahasan Tujuan 5: "**Meningkatnya Kualitas Konektivitas Daerah**" Tempat: Ruang Rapat Parameswara Lt. I Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Pimpinan Desk: Plh. Kabid IPW Perangkat Daerah: 1. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruan 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu	Agenda dan Pelaksana	
ıu / 18 Juni 2025		
3.30 – 12.00	Desk Pembahasan Tujuan 3: **"Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air"** Tempat: Ruang Rapat Dapunta Hyang Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Pimpinan Desk: Kabid PPP Kasubbid Infrastruktur Kasubbid Pengembangan Wilayah Perangkat Daerah: 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 2. Dinas Pertanian TPH 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Perindustrian 7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Desk Pembahasan Tujuan 6: **"Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar Masyarakat"** Tempat: Ruang Rapat Balaputra Dewa Lt. II Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Pimpinan Desk: Plh. Kabid IPW Perangkat Daerah: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.00 – 13.00	*ISHOMA*	

Waktu	Agenda dan Pelaksana	
13.00 – 16.00	Desk Pembahasan Tujuan 8: "**Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**" Tempat: Ruang Rapat Bidang PKK Lt. III Bappeda Prov. Sumsel Pimpinan Desk: Plh. Kabid PKK Brilliant Faisal, S.Pi., M.Si (Fungsional Perencana Ahlli Madya) Perangkat Daerah: 1. Dinas Sosial 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Koperasi dan UMKM	Desk Pembahasan Tujuan 4: "**Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan**" Tempat: Ruang Rapat Parameswara Lt. III Bappeda Prov. Sumsel Pimpinan Desk: Plh. Kabid IPW Kasubbid Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Kasubbid SDA dan IPTEK Perangkat Daerah: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Dinas Pertanian TPH 7. Dinas Perindustrian 8. Dinas Kelautan dan Perikanan
Kamis / 19 Juni 2025		
08.30 – 12.00	Desk Pembahasan Tujuan 10: "**Mempertahankan Stabilitas Sosial**" Tempat: Ruang Rapat Bidang PKK Lt. III Bappeda Prov. Sumsel Pimpinan Desk: Plh. Kabid PKK Kasubbid Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Perangkat Daerah: 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Biro Kesejahteraan Rakyat	Desk Pembahasan Tujuan 7: "**Meningkatnya Pengelolaan Bencana**" Tempat: Ruang Rapat Balaputra Dewa Lt. II Bappeda Prov. Sumsel Pimpinan Desk: Plh. Kabid IPW Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Waktu	Agenda dan Pelaksana
12.00 – 13.00	*ISHOMA*
13.00 – 16.00	Desk Pembahasan Tujuan 9: **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"** Tempat: Ruang Rapat Dapunta Hyang Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Pimpinan Desk: Plh. Kabid PKK Kabid PEPS Kabid PPP Plh. Kabid IPW Perangkat Daerah: 1. Dinas Kearsipan 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 5. Badan Pendapatan Daerah 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 8. Badan Kepegawaian Daerah 9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 10. Badan Penghubung 11. Dinas Komunikasi dan Informatika 12. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 13. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15. Inspektorat 16. Sekretariat DPRD 17. Satuan Polisi Pamong Praja 18. Biro Organisasi 19. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 20. Biro Hukum dan HAM 21. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 22. Biro Perekonomian 23. Biro Administrasi Pembangunan 24. Biro Humas dan Protokol 25. Biro Umum dan Perlengkapan 26. Biro Kesejahteraan Rakyat

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 23 Palembang Telp. (0711) 356018 - 321181 Fax. (0711) 314586 - 356116
Website : www.bappeda.sumselprov.go.id E-mail : info@bappeda.sumselprov.go.id

Palembang, 21 Juli 2025

Nomor : 000.1.5/1684/Bappeda-IV/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rapat Pembahasan Lanjutan Renstra OPD Tahun 2025-2029 Mitra Subbid Infrastruktur

Yth. (**Daftar Undangan Terlampir**)
di –
Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Pembahasan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 bersama Pansus I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tema Infrastruktur tanggal 18 Juli 2025, dengan ini diharapkan kehadirannya pada Rapat Pembahasan Lanjutan Renstra OPD Tahun 2025-2029 Mitra Subbid Infrastruktur. Adapun acara tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : ***Daftar Terlampir***
Pukul : ***Daftar Terlampir***
Tempat : Ruang Rapat Bidang IPW Lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Acara : Pembahasan Lanjutan Renstra OPD Tahun 2025-2029 Mitra Subbid Infrastruktur

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut kami mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS,

M. ADHIE MARTADHIWIRA, S.Sos., M. Pol. Admin
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197303291998031001

Lampiran I Undangan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 000.1.5/1684/BappedaIV/2025
Tanggal : 21 Juli 2025

JADWAL PEMBAHASAN LANJUTAN RENSTRA OPD TAHUN 2025-2029
SUBBID INFRASTRUKTUR

No.	Hari/Tanggal	Waktu	OPD
1.	Selasa / 22 Juli 2025	09.00 – 12.00 WIB	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
		14.00 – 16.00 WIB	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
2.	Rabu / 23 Juli 2025	09.00 – 12.00 WIB	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
		14.00 – 16.00 WIB	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kapten. A. Rivai No. 23 Palembang Telp. (0711) 356018-356118 Fax. (0711) 314586-356118
website: www.bappeda.sumselprov.go.id, email: info@bappeda.sumselprov.go.id

Palembang, 29 Juli 2025

Nomor : 000.7.2.2/1771/Bappeda-V/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Pansus**

Yth. **Daftar Terlampir**
di –
Tempat

Menindaklanjuti Pembahasan Pansus I tentang Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, bersama ini disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar segera menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil Pansus terhadap masing-masing Perangkat Daerah (terlampir). Renstra PD dimaksud agar dapat disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk diinput ke dalam aplikasi SIPD RI paling lambat tanggal 5 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan,

Regina Ariyanti, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 000.7.2.2/1771/Bappeda-V/2025
Tanggal : 29 Juli 2025

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10. Kepala Badan Penghubung
11. Kepala Dinas Pendidikan
12. Kepala Dinas Kesehatan
13. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
14. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
15. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Kepala Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Kepala Dinas Sosial
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Kepala Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28. Kepala Dinas Kearsipan
29. Kepala Dinas Perpustakaan
30. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
31. Kepala Dinas Perkebunan
32. Kepala Dinas Kehutanan
33. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
34. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
35. Kepala Dinas Perindustrian
36. Kepala Dinas Perdagangan
37. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
38. Direktur Rumah Sakit dr. Ernaldi Bahar
39. Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah Az- Zahra
40. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
41. Direktur Rumah Sakit Khusus Mata
42. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
43. Sekretaris Dewan DPRD
44. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
45. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
46. Kepala Biro Hukum dan HAM
47. Kepala Biro Perekonomian
48. Kepala Biro Administasi Pembangunan
49. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
50. Kepala Biro Humas dan Protokol
51. Kepala Biro Organisasi
52. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NOTA DINAS

Kepada	:	Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
Dari	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal	:	Agustus 2025
Lampiran	:	
Hal	:	Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029

Menindaklanjuti Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.1.2.2/1771/Bappeda V/2025 hal Permintaan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mencermati rapat bersama Pansus DPRD Prov. Sumsel pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, bersama ini diminta kehadirannya pada

Hari / Tanggal : Selasa / 05 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumsel

Acara : Pembahasan Rancangan Akhir Renstra Dishub Prov Sumsel Tahun 2025-2029

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Saudara dapat memberikan masukan untuk kesempurnaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS

H. M. GUNAWAN, ST, MM
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197405261998031001

NOTA DINAS

Kepada Yth	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
Dari	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Tanggal	05 Agustus 2025
Hal	Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029

Sehubungan dengan Nota Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 4 Agustus 2025 hal Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029 bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih

KASUBBAG PERENCANAAN
EVALUASI DAN PELAPORAN

BAMBANG SUHARDI SE. MM
Pembina / (IV/a)
NIP 19781005 199903 1 004

① Yth Sekretaris
Tgl 9/8

② Yth Kasub perencanaan.
— Lak TL 7/08/25

LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT

Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029

Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2025 bertempat di Ruang rapat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan Bidang dan UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil Rapat Sebagai Berikut

1. Perlu Menyesuaikan Indikator V/C Rasio dengan Indikator kecepatan rata – rata kendaraan km/jam yang ada pada Renstra PU Bina Marga
2. Dalam mendukung Misi ke IV Gubernur Sumatera Selatan dalam Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten / kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan telah disepakati Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 ada 3 (tiga) Indikator yaitu
    1) Rasio Konektivitas
    2) V/C Rasio
    3) Rata – rata Load Factor Angkutan Umum
3. Perlu adanya penyempurnaan data pada BAB II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah dari Bidang dan UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
4. Telah disepakati Isu Strategis untuk Tahun 2025 – 2029 yaitu Keselamatan Transportasi, Pelayanan Transportasi dan Penguatan Kelembagaan serta telah disusun Arah Kebijakan untuk menjawab Isu Strategis Tersebut

Demikianlah laporan rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RAPAT

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI TANGGAL : Jakarta, 5 Agustus 2016
TEMPAT : Ruang Rapat Kepala Dishub Prov. SS
JAM : 09.00 s/d selesai
AGENDA : Rapat koordinasi pembahasan kelengkapan Akhir Ranwal Akhir 2016- Tetap

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TTD
1.				
2.	M. Ramadan	Dishub SS		
3.	Jonwar Siregar	DISHUB Sumsel	Kabid Lalin	
4.	Raja Jonwar Syah	Kasi Ta		
5.	Andreas	UPTD TAM	Kasi Ops Pantura	
6.	Eka Wanda S	UPTD Terminal	Kasubbag TU	
7.	Fansyuri	Dishub Provinsi Prov. Sumsel	Kabid Angkutan	
8.	Sigit Herdady	Pasti KA	Kasi Lenga PKB	
9.	Yusrizal	Dishub SS	Kasi Mell	
10.	Fatlan	[illegible]	[illegible]	
11	Sri Ramadhanti	Bid angkutan	Kasi angk. Orang	
12.	Rina Wijayanti	Angk. perkeretaapian	Pengatur Barang Penggunaan	
13	R.A. Yulia	Bidang [illegible]	Kasi [illegible]	
14.	Wawan Indra Nirgasih	Subbag PKP	Staf	
15	Pedro Wawan Nirgasih	Subbag PKP	Staf	
16.	Rifan	— " —	— " —	
17	Agung Kurnia R.	UPTD Terminal	Staff	
18	Arfend Eka P	Dishub SS	Staff	
19	Yuni Permata Sari	Keuangan	Staf	
20	Destini Erlisa	Staf PKP	Staf	
21	Devi Anindya Putri	Staf PKP	Staf	
22.	Ulula G.	Staf PKP	Dishub	
23.	Amina P.	Staf PKP	"	
24	B — y SH.	PKP	Dishub	

DOKUMENTASI

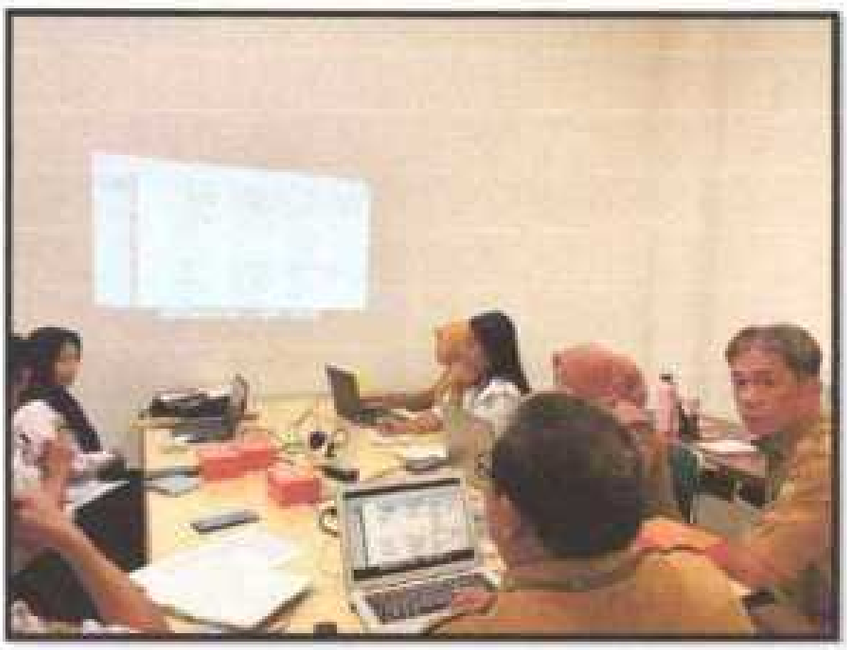

DISHUB
SUMATERA SELATAN

COPYRIGHT 2025, RENSTRA TAHUN 2025 – 2029
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
JALAN KAPTEN A. RIVAI NO. 51 PALEMBANG